

# BAMSOET JANGAN KAGET, INI BUATAN INDONESIA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.05/TH.XVII/MEI 2023

PPHN TANPA AMANDEMEN

## MPR BISA MENETAPKAN PPHN SEBAGAI KONVENSI KETATANEGARAAN



ISSN 0854-6371



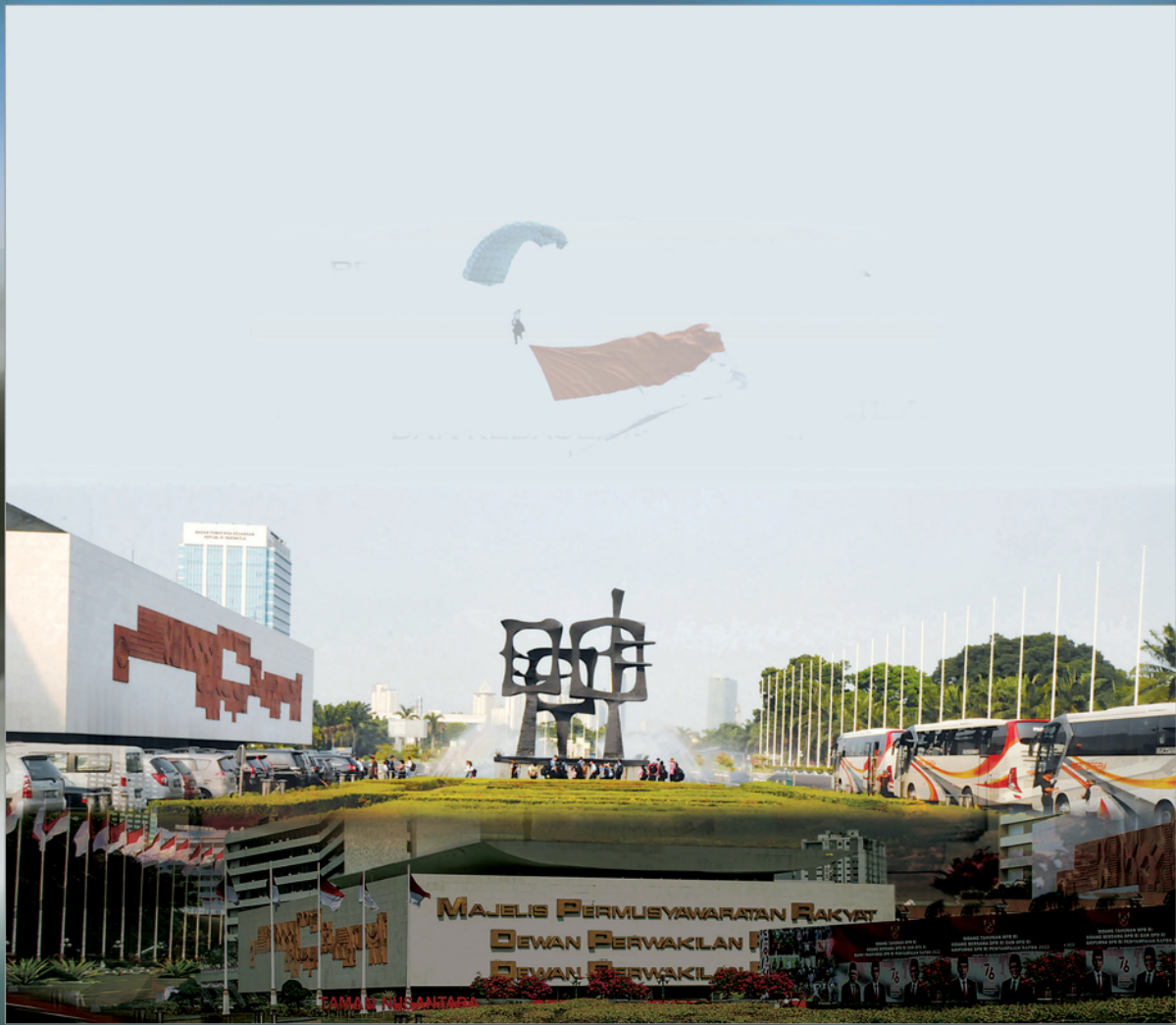
9 770854 637158

**06** Refleksi  
Mampukah Sistem Hukum  
Ketatanegaraan

**28** Nasional  
Dorong UMKM Perkuat  
Pasar Internasional

**39** Selingan  
Masjid Hibah  
Putra Mahkota

**58** Sosialisasi  
Percuma Ada Pemilu Jika  
Ujungnya Perpecahan



# Daftar Isi

EDISI NO.05/TH.XVII/MEI 2023



## 08 BERITA UTAMA

### PPHN Tanpa Amandemen

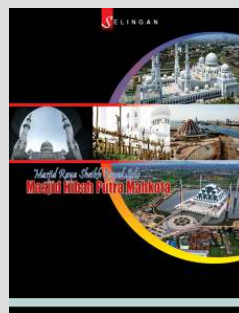
PPHN bisa dihadirkan tanpa perlu khawatir bakal membuka kotak pandora, yang bisa memantik terjadinya amandemen pasal-pasal lain dalam konstitusi dan menyulut gaduh politik. Sebagai jalan keluar, MPR menetapkan PPHN sebagai konvensi ketatanegaraan. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR.



## 16 Nasional Pembukaan Teksedo Exhibit 2013



## 56 Sosialisasi Ajaran Mulia Islam Tercermin dalam Pancasila



## 39 SELINGAN Masjid Hibah Putra Mahkota



## 76 Profil KH. Ir. Abdul Hakim, MM.

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Kolom .....	34
Aspirasi Masyarakat .....	47
Gema Pancasila .....	48
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	80
Rehal .....	82



### COVER

Edisi No.05/TH.XVII/Mei 2023  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

## MPR Bisa Menetapkan PPHN Atas Dasar Konvensi Ketatanegaraan

**M**PR masa jabatan 2014-2019 di bawah kepemimpinan Ketua MPR Zulkifli Hasan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR masa jabatan 2019-2024 di bawah kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019. Salah satu rekomendasi tersebut terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dalam Pasal 2 keputusan tersebut berbunyi: "MPR masa jabatan 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR RI masa jabatan 2014-2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum PPHN, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR, dengan catatan terdapat pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa PPHN juga dimungkinkan diwujudkan dalam bentuk undang-undang."

Kala itu sudah disebut-sebut soal amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk mewujudkan PPHN. Amandemen terbatas itu untuk memberi kewenangan kepada MPR menetapkan PPHN, apakah dengan menyisipkan pasal dalam konstitusi atau memberikan kembali kewenangan MPR untuk mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengatur. Namun, langkah amandemen terbatas ini masih mengundang berbagai kontroversi.

Untuk itu, Pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian MPR guna melakukan pendalaman hasil kajian MPR RI masa jabatan 2014-2019. Setelah bekerja selama 2 tahun 9 bulan, Badan Pengkajian MPR menyelesaikan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Terkait dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945, Badan Pengkajian MPR menyepakati untuk tidak mengambil pilihan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

"Melihat situasi sosial politik saat ini, Badan Pengkajian MPR, baik pimpinan maupun anggota badan, menyepakati untuk tidak melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kita menolak pilihan memasukkan PPHN ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Kita juga tidak mengambil jalan amandemen terbatas. Kalau dilakukan amandemen UUD saat ini maka seperti membuka kotak pandora. Berbagai kepentingan bisa masuk. Karena itu kita tutup peluang amandemen UUD

NRI Tahun 1945," tegas Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, saat menyampaikan laporan kajian Badan Pengkajian kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi, serta Kelompok DPD dalam Rapat Gabungan pada akhir Juli 2022.

Di sisi lain, dalam waktu yang beriringan, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga meneliti soal PPHN untuk disertasi doktor. Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, berhasil mempertahankan disertasinya berjudul: "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan, dalam Menghadapai Industri 5.0 dan Indonesia Emas" dalam Sidang Terbuka Promosi Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, pada 28 Januari 2023. Bamsuet meraih predikat Cumlaude dengan IPK 4.0.

Sejalan dengan Badan Pengkajian MPR, Bamsuet pun menyatakan, PPHN bisa dihadirkan tanpa perlu khawatir bakal membuka kotak pandora, yang bisa memantik terjadinya amandemen pasal-pasal lain dalam konstitusi, utamanya terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang selalu menyulut gaduh politik. Disertasi itu kemudian menjadi sebuah buku dengan judul: "PPHN Tanpa Amandemen".

Lalu, apa pilihan payung hukum untuk PPHN tanpa melakukan amandemen? Badan Pengkajian MPR, sama seperti pendapat Bamsuet, menyebutkan perlu terobosan supaya PPHN bisa diterima dan menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggara negara, bukan hanya presiden tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya. Posisi payung hukum PPN harus berada di atas UU. Terobosan tersebut adalah bentuk hukum PPHN dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR tanpa harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu Konvensi Ketatanegaraan.

Konvensi Ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik ber hukum di Indonesia maupun di dunia internasional. Untuk menyelenggarakan Konvensi Ketatanegaraan diperlukan konsensus nasional yang melibatkan lembaga-lembaga negara, termasuk kepresidenan. Konvensi Ketatanegaraan itu kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR. □



### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

### **DEWAN REDAKSI**

Dyastasita, Heri Herawan,  
Maifrizal

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Indro Gutomo

### **KOORDINATOR REPORTASE**

Euis Karmila

### **REDAKTUR FOTO**

Oni Arief Benyamin,  
Slamet Eko Suprayitno

### **REPORTER**

Yenita Revi, Try Syilvani,  
Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,  
Alfonso DK Tahapary

### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,  
Restu, Suprianto, Faridz Rizky,  
Wira, Subhan

### **PENANGGUNG JAWAB/**

### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayat

### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Anggun Permana,  
Achmad Farobi,  
Widya Permataningrum

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

### **TIM AHLI**

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

### **ALAMAT REDAKSI**

Biro Hubungan Masyarakat dan  
Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal MPR-RI  
Gedung Nusantara III, Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,  
Senayan, Jakarta 10270.  
Telp. (021) 57895237, 57895238,  
57895251 Fax.: (021) 57895237  
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

**INI BARU**  
**INDONESIA**



  
**EMPAT PILAR MPR RI**  
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara


## Memampukan Sistem Hukum Ketatanegaraan Kelola Ragam Krisis

**N**EGARA-bangsa harus mampu mengantisipasi, mengelola, dan mengatasi aneka krisis demi tegaknya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya dengan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif, dan komprehensif, Indonesia akan dimampukan mengelola dan mengatasi aneka krisis, termasuk krisis politik.

Selain berfungsi merespons, mengelola, dan mengatasi ragam krisis, sistem hukum ketatanegaraan yang solutif dan efektif hendaknya juga dipahami sebagai instrumen yang sangat dibutuhkan. Bahkan keniscayaan untuk menjaga dan merawat aspek ketahanan nasional, serta aspek persatuan dan kesatuan negara-bangsa. Sistem Hukum ketatanegaraan tentu saja harus berlandaskan Undang-undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Dan, berpijak pada kodrat kebhinnekaan bangsa, sistem hukum ketatanegaraan Indonesia hendaknya selalu dijiwai oleh akar budaya serta kearifan lokal yang menjadi sistem nilai semua komunitas anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Apa pun masalah atau krisis yang dihadapi negara-bangsa, termasuk krisis politik sekali pun, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan. Strategi merespons krisis, mengelola dan mengatasi rangkaian masalah yang muncul akibat krisis, hingga kebijakan-kebijakan penyelesaiannya harus tetap berpijak pada sistem hukum ketatanegaraan. Setiap individu warga negara tentu saja memiliki hak untuk bereaksi dan bersikap menanggapi dampak atau ekses krisis. Namun, berpijak pada hukum ketatanegaraan itu pula amuk krisis pada skala sebesar apa pun tidak pernah boleh menoleransi sikap dan tindakan-tindakan inskonstitusional yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional atau mengarah pada upaya merusak persatuan dan kesatuan negara bangsa.

Dalam konteks ini, pernyataan atau catatan yang dikedepankan oleh pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra patut digarisbawahi, untuk kemudian direnungkan oleh segenap elemen bangsa. Patut pula disyukuri karena potensi masalah yang ditunjuk Prof. Yusril dikedepankan ke ruang publik ketika negara bersama segenap elemen bangsa sedang melakoni aneka perubahan. Memang benar bahwa perubahan zaman menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan bernegara-berbangsa, namun perubahan itu nyata-nyata pula telah menghadirkan potensi masalah. Semua potensi masalah itu wajib diwaspadai untuk kemudian disikapi.

Prof. Yusril kemudian mengajak semua pihak untuk mengenang kembali krisis politik tahun 1966/67 dan krisis politik tahun 1998. Krisis politik 1966/67 terjadi akibat pergolakan berdarah yang dikenang sebagai peristiwa G-30-S/PKI. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menilai Presiden Soekarno gagal memberi pertanggungjawaban. Pada Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno untuk kemudian menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Tahun 1998, faktor ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah dicatat sebagai awal krisis. Kegagalan pemerintah mengatasi krisis ekonomi menimbulkan ketidakpuasan berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa turun ke jalan melancarkan protes atas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kegagalan pemerintah menanggapi protes yang meluas saat itu memicu krisis politik

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ. Habibie. Dasar hukum pengangkatan BJ. Habibie sebagai Presiden adalah Tap MPR No. VII/MPR/1973. Tap MPR ini menetapkan bahwa "Jika Presiden berhalangan maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden."

Pada dua krisis politik itu, MPR masih menggenggam amanat penugasannya sesuai UUD 1945 untuk menjalankan kedaulatan rakyat dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah Mandataris MPR. Presiden wajib melaksanakan Ketetapan MPR, dan juga diwajibkan memberi laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR.

Pasca amandemen ke-empat UUD 1945, MPR bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Per status, MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, namun tidak sama. Sebab, DPR berwenang membuat UU, sementara Presiden berwenang menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu). MPR pasca amandemen tidak bisa lagi membuat ketetapan-ketetapan yang mengikat atau regeling (pengaturan yang mengikat). Bahkan, pada momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sekali pun, MPR RI tidak lagi memiliki kewajiban membuat ketetapan tentang pelantikan itu, melainkan hanya mengeluarkan Berita Acara Pelantikan.

## H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



Faktor minimnya peran dan fungsi MPR pada aspek hukum ketatanegaraan inilah yang menjadi catatan atau perhatian khusus Prof. Yusril. Dia mengemukakan aspirasinya agar peran dan fungsi MPR RI diperkuat kembali. Penguatan itu hendaknya ditandai dengan memulihkan atau mengembalikan wewenang konstitusional MPR membuat ketetapan yang mengikat. Apalagi, hirarki perundang-undangan sudah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni UUD, ketetapan MPR, Undang Undang, Perpu hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda).

Tidak ada tujuan lain di balik aspirasi pemulihan atau penguatan wewenang MPR. Satu-satunya tujuan strategis di balik aspirasi ini adalah menghadirkan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif, dan komprehensif agar negara-bangsa selalu dimampukan mengelola dan mengatasi aneka krisis, termasuk krisis politik.

Tentu saja, siapa pun tidak pernah menghendaki terjadinya krisis politik. Semua orang tahu, harga yang harus dibayar oleh sebuah krisis politik sangatlah mahal. Namun, kendati krisis politik atau krisis konstitusi tidak pernah diinginkan tetap saja sebuah negara-bangsa harus antisipatif dengan memberlakukan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif, dan komprehensif.

Sekadar pengandaian, krisis politik akan terjadi jika Pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan kedaruratan. Tentang penundaan Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 431 UU ini telah mengatur tentang penundaan Pemilu. Ditetapkan bahwa Pemilu bisa ditunda karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Sudah bisa diperkirakan bahwa begitu Pemilu harus ditunda, ragam permasalahan pada aspek

ketatanegaraan segera mengemuka. Paling utama misalnya, belum tentu semua elemen masyarakat dapat menerima keputusan penundaan Pemilu. Mengelola persoalan seperti ini jelas tidak mudah. Penolakan seperti itu praktis menjadi benih krisis politik.

Kemudian, Pemilu yang tertunda berkonsekuensi pada potensi kekosongan pemerintahan jika diasumsikan pemerintah hasil Pemilu sebelumnya sudah demisioner. Sambil menunggu hasil Pemilu untuk mendapatkan pemerintahan baru yang legitimate, haruskah Republik Indonesia dibiarkan begitu tanpa administrasi pemerintahan yang memerintah? Krisis politik menjadi kenyataan tak terhindarkan oleh karena tidak adanya ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan yang mengatur tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan kekosongan pemerintahan akibat penundaan Pemilu.

Belajar dari catatan sejarah tentang krisis politik 1966/67 dan krisis politik 1998, menjadi relevan ketika Prof. Yusril menyuarakan aspirasinya tentang urgensi penguatan atau pemulihan tugas dan fungsi MPR. Aspirasi yang sama sudah berulang kali disuarakan unsur pimpinan MPR RI. Aspirasi ini tentu saja tidak semata-mata tentang pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara, melainkan dilandasi keniscayaan negara-bangsa berkemampuan mengelola dan mengatasi krisis politik dengan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif, dan komprehensif.

Untuk tujuan itu, kedudukan, fungsi, dan tugas MPR patut diperkuat kembali tanpa harus mengubah UUD 1945. Penguatan itu bisa diwujudkan dengan kesediaan semua elemen bangsa untuk kembali pada hirarki perundang-undangan, agar negara-bangsa mampu mengantisipasi, mengelola dan mengatasi aneka krisis demi tegaknya eksistensi NKRI.

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023.*

*Minal Aidin Wal Faizin. Mohon Maaf Lahir dan Batin.*

## PPHN Tanpa Amandemen

# MPR Bisa Manetapkan **PPHN** Sebagai Konvensi Ketatanegaraan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PPHN bisa dihadirkan tanpa perlu khawatir bakal membuka kotak pandora, yang bisa memantik terjadinya amandemen pasal-pasal lain dalam konstitusi dan menyulut gaduh politik. Sebagai jalan keluar, MPR menetapkan PPHN sebagai konvensi ketatanegaraan. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR.

**R**UANG Media Center MPR/DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi tempat peluncuran sekaligus bedah buku terbaru Ketua MPR Bambang Soesatyo. Di hadapan jurnalis yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, meluncurkan buku terbaru berjudul “PPHN Tanpa Amandemen”. Dikemas dalam Diskusi Empat Pilar MPR, peluncuran dan bedah buku yang berlangsung pada Rabu, 29 Maret 2023, menghadirkan pembicara Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, Fahri Hamzah; Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil; dan Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangsi Syarwi Chaniago.

Buku “PPHN Tanpa Amandemen” ini ditulis berdasarkan disertasi Bamsoet, dengan judul “Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan, dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas.” Bamsoet berhasil mempertahankan disertasi itu dalam Sidang Terbuka Promosi Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, pada 28 Januari 2023. Bamsoet meraih

predikat yudisal Cumlaude dengan IPK 4.0.

Beberapa hari sebelumnya, Selasa 21 Maret 2023, Bamsoet juga menyelenggarakan peluncuran buku serupa di Universitas Terbuka Convention Center, Kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. “Ini merupakan buku ketiga karya saya yang fokus mengupas urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dua seri buku tentang PPHN terdahulu adalah, ‘Cegah Negara Tanpa Arah’ dan ‘Negara Butuh Haluan’,” ujar Bamsoet.

Apa inti dari buku “PPHN Tanpa Amandemen” ini? Buku atau disertasi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan Bamsoet selama berbulan-bulan. Dari penelitian itu diperoleh sebuah novelty atau temuan baru. Gagasannya adalah merekonstruksi GBHN menjadi PPHN tanpa amandemen. Dengan kata lain, GBHN dengan nomenklatur PPHN bisa dihadirkan tanpa amandemen pasal-pasal tertentu UUD NRI Tahun 1945.

Lebih jauh, ungkapan “Tanpa Amandemen” merupakan upaya Bamsoet memberi jawaban pamungkas atas diskursus soal PPHN yang menahun (lihat bagian dua: “Menengok Kembali Jalan Panjang





PPHN”). “PPHN Tanpa Amandemen” seperti jalan keluar dari diskursus soal PPHN. Diskursus soal PPHN yang menahun terkait dengan payung hukum PPHN.

Dalam buku itu, Bamsuet menjelaskan pilihan-pilihan payung hukum untuk PPHN. Pertama, kata dia, melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, yang memasukkan substansi kewenangan MPR menyusun PPHN dan pengawasan pelaksanaan PPHN oleh DPR.

Kedua, dilakukan tanpa amandemen, mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga, lanjut dia, mengubah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memasukkan substansi mengenai

kewenangan MPR membentuk PPHN dengan produk hukum berupa Tap MPR. Keempat, PPHN ditetapkan dalam sebuah UU yang mencabut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Cara kelima, MPR menetapkan PPHN sebagai konvensi ketatanegaraan, tanpa mengubah produk hukum sebagaimana dalam berbagai poin sebelumnya. Artinya, PPHN bisa dihadirkan tanpa perlu khawatir bakal membuka kotak pandora, yang bisa memantik terjadinya amandemen pasal-pasal lain dalam konstitusi, utamanya terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang selalu menyulut gaduh politik,” jelas dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, konsep kedua dan kelima merupakan konsep terbaik. Sebab, judicial review dengan mengembalikan kewenangan MPR mengeluarkan Tap baru yang bersifat

mengatur atau regeling dan konvensi ketatanegaraan, merupakan sumber hukum tata negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik ber hukum di Indonesia maupun di dunia internasional.

Untuk menyelenggarakan konvensi ketatanegaraan diperlukan konsensus nasional yang melibatkan delapan lembaga tinggi negara, termasuk lembaga kepresidenan. Jika sepakat melakukan konvensi maka perlu dibentuk dan disusun substansinya. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR. Sampai saat ini MPR masih memiliki kewenangan membentuk Tap MPR yang sifatnya keputusan (*beschikking*).

Tetapi, akan lebih kuat lagi kalau MPR bisa memiliki Tap MPR yang sifatnya regeling, yakni dengan cara melakukan judicial review terhadap penghapusan penjelasan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

### Sejalan dengan Badan Pengkajian MPR

Disertasi Bamsoet sejalan dengan kajian Badan Pengkajian MPR tentang substansi dan materi serta bentuk hukum PPHN. Hasil kajian Badan Pengkajian MPR itu tertuang dalam dua berkas, yaitu “Rancangan PPHN” yang berisi tentang substansi dan materi PPHN, dan “Kajian Bentuk Hukum PPHN” yang berisi kajian tentang bentuk hukum PPHN. Itulah hasil Badan Pengkajian MPR telah bekerja selama dua tahun 9 bulan sejak dilantik pada Oktober 2019 silam.

Badan Pengkajian MPR telah melaksanakan beragam metode kajian, baik berupa rapat-rapat pembahasan, diskusi, seminar, *focus group discussion*, dan penyerapan aspirasi masyarakat serta kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan melibatkan para pakar/ahli, praktisi, serta akademisi.

Hasil kajian Badan Pengkajian tersebut pun telah dilaporkan dan disampaikan di depan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD, pada Senin, 25 Juli 2022. Dalam Ragab itu, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyerahkan dua berkas hasil kajian Badan Pengkajian MPR terkait PPHN itu kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Hampir tidak jauh berbeda dengan buku dan disertasi Bamsoet (“PPHN Tanpa Amandemen”), Badan Pengkajian MPR pun menyodorkan beberapa macam pilihan atau opsi bentuk hukum PPHN. “Karena PPHN ini hanya menyangkut garis-garis besar saja maka akan membawa konsekuensi apa bentuk dan dasar hukumnya. Kalau bahasa PPHN seperti itu maka di mana PPHN itu harus ditempatkan?” kata Djarot Saiful Hidayat saat itu.

Beberapa opsi bentuk hukum PPHN itu adalah: *Pertama*, PPHN dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, perlu dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR. Caranya, melalui amendemen terbatas UUD



Djarot Saiful Hidayat

FOTO-FOTO: ISTMENWA

NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Cara lain adalah Tap MPR tanpa melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR mengeluarkan keputusan MPR dalam bentuk Ketetapan MPR tentang PPHN sebagai Konvensi Ketatanegaraan.

*Ketiga*, mengatur PPHN dengan undang-undang (UU). Namun, karena bahasa substansi dan materi PPHN adalah garis-garis besar, lebih filosofis dan directive maka tidak cocok untuk menjadi UU yang lebih bersifat teknokratis. Oleh karena itu, opsi PPHN diatur dengan UU perlu juga dikaji lagi.

“Melihat situasi sosial politik saat ini, Badan Pengkajian MPR, baik pimpinan maupun anggota badan, menyepakati untuk tidak melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Kita menolak pilihan memasukkan PPHN ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Kita juga tidak mengambil jalan amendemen terbatas. Kalau dilakukan amendemen UUD saat ini maka seperti membuka kotak pandora. Berbagai kepentingan bisa masuk. Karena itu kita tutup peluang amendemen UUD NRI Tahun 1945,” papar Djarot.

Namun, Djarot mengakui perlu terobosan supaya PPHN bisa diterima dan menjadi



Fadel Muhammad

payung bagi seluruh penyelenggara negara, bukan hanya presiden tetapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Karena itu, bentuk hukum PPHN harus dalam posisi di atas UU. Badan Pengkajian sendiri, hampir sama seperti pendapat Bamsuet dalam buku “PPHN Tanpa Amandemen”, menawarkan terobosan, yaitu bentuk hukum PPHN dalam Ketetapan (Tap) MPR tanpa harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu Konvensi Ketatanegaraan.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad juga sepakat tidak perlu amandemen untuk mewujudkan PPHN. Menurut Fadel, UUD NRI Tahun 1945 tidak perlu diganggu. “Tidak perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kita tidak ingin mengganggu UUD. Setelah sekian lama berembuk dan berdiskusi untuk mencari payung hukum yang tepat untuk PPHN ini, kesimpulannya adalah bahwa kita tidak ingin mengganggu UUD,” katanya kepada *Majelis*.

Bagi Fadel Muhammad, apapun payung hukum untuk PPHN sebenarnya tidak masalah. Apakah payung hukum PPHN dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR atau dalam bentuk UU tidak masalah. “Sebenarnya apapun payung hukumnya tidak menjadi masalah. Asal PPHN itu harus dilihat baik dan membawa dampak bagi rakyat dan negara. Jadi, sekarang kita harus meyakinkan kepada rakyat bahwa PPHN itu sangat baik buat kehidupan rakyat,” kata Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Lanjut Fadel, bila rakyat menganggap PPHN adalah sesuatu yang baik, pastilah rakyat akan menguatkan PPHN itu sendiri. “Jadi, kalau misalnya, payung hukum PPHN itu adalah dalam bentuk undang-undang, maka karena rakyat menganggap PPHN sesuatu yang baik maka tidak mungkin rakyat akan menggugat PPHN (misalnya melakukan judicial review atas UU yang menjadi payung hukum PPHN) atau mengganggu sesuatu yang menyejahterakan mereka,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tb. Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, melihat situasi dan kondisi saat ini memang tidak

tepat untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya memasukkan PPHN dalam konstitusi. Bentuk hukum dengan memasukkan PPHN dalam konstitusi memang lebih kuat dan mengikat, namun “timing”-nya saat ini kurang tepat.

“Bila melalui amandemen UUD maka kedudukan PPHN lebih kuat dan mengikat, tetapi sekali lagi, kami melihat timingnya belum tepat saat ini (untuk melakukan amandemen UUD),” katanya beberapa waktu lalu.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Hasanuddin, menunggu hasil pembahasan di Panitia Ad Hoc. Setelah melakukan pembahasan dan kajian, Panitia Ad Hoc juga akan mengambil

diwujudkan dengan landasan hukum yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan. “Sesungguhnya jika PPHN dibuat dengan undang-undang sebagai landasan hukumnya maka akan lebih baik karena undang-undang lebih mengikat sebagai produk hukum, dan sekaligus dapat menggantikan UU RPJPM yang akan segera berakhir,” ucapnya.

Seperti diketahui, Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang juga diikuti Pimpinan Badan Pengkajian MPR menyepakati pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR berupa rancangan



**Tb. Hasanuddin**

keputusan. “Intinya, kami menyerahkan kepada Panitia Ad Hoc, bagaimana sebaiknya payung hukum PPHN ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena, menolak bentuk Konvensi Ketatanegaraan untuk PPHN. Sebab, Konvensi Ketatanegaraan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap lembaga negara lainnya, apalagi untuk mengikat seluruh warga negara Indonesia.

“Kalau Konvensi Ketatanegaraan yang dijadikan contoh adalah Sidang Tahunan MPR setiap tanggal 16 Agustus dilaksanakan tanpa diatur oleh konstitusi, tentu saja berbeda karena pidato tahunan itu bukan produk hukum,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Idris Laena mengharapkan PPHN tidak

substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dan bentuk hukum PPHN. Panitia Ad Hoc bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amendemen konstitusi.

Fadel Muhammad menyebutkan, masih ada waktu untuk mewujudkan PPHN pada MPR masa jabatan 2019-2024 ini. “Walaupun memang agak berat karena kita menghadapi Pemilu 2024, tapi itulah tenggat waktu dari kami Pimpinan MPR. Kita harapkan PPHN bisa terwujud pada MPR periode ini. PPHN bisa menjadi produk ketatanegaraan yang menjadi legacy kami untuk rakyat Indonesia,” ucapnya. □

**DER/BSC**

# Menengok Kembali Perjalanan Panjang PPHN

Awalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menangkap aspirasi dari masyarakat tentang perlunya Indonesia memiliki haluan negara seperti pada masa sebelum reformasi. Aspirasi itu muncul ketika MPR periode 2009-2014 melaksanakan program Sosialisasi Empat Pilar MPR ke berbagai lapisan masyarakat.

**D**ALAM sosialisasi Empat Pilar MPR sering muncul pertanyaan atau pernyataan dari peserta tentang arah pembangunan bangsa. Pasalnya, peserta melihat adanya ketidaksinkronan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, misalnya antara Gubernur dan Bupati. Dari aspirasi masyarakat tersebut, MPR periode 2009-2014 mengakomodasi dengan membahas dan melakukan kajian pendahuluan tentang perlunya Indonesia kembali memiliki haluan negara.

Untuk mendukung kajian itu dibentuklah Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Namun, sampai akhir masa jabatan MPR periode lima tahun (2009-2014) hanya bisa dihasilkan sebuah rekomendasi kepada MPR masa jabatan berikutnya untuk membuat sebuah reformulasi kembali perencanaan pembangunan model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

Pada Senin, 29 September 2014, MPR menggelar Rapat Paripurna akhir masa jabatan 2009-2014. Dalam rapat paripurna itulah, Ketua Tim Ad Hoc II, M. Jafar Hafsah, menyampaikan tujuh rekomendasi MPR yang disusun oleh Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. "Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 ini menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika," kata Jafar Hafsah.

Tujuh rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 kepada MPR periode 2014-2019 adalah: *Pertama*, melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai



M. Jafar Hafsah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

segala sumber hukum negara. *Kedua*, melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

*Ketiga*, melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa. *Keempat*, membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya. *Kelima*, mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.

*Keenam*, melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Dan, *ketujuh*, memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan rekomendasi MPR periode 2009-2014, maka MPR periode 2014-2019 di

bawah kepemimpinan Ketua MPR Zulkifli Hasan bekerja mengacu pada rekomendasi tersebut. Salah satu poin dalam rekomendasi tersebut adalah agar MPR periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. Poin rekomendasi ini menjadi salah satu fokus Badan Pengkajian MPR pada periode 2014-2019.

Berkaitan dengan rekomendasi itu, Badan Pengkajian MPR telah menghimpun berbagai pendapat dari berbagai forum diskusi, baik melalui diskusi, seminar, workshop, focus group discussion, dan diskusi kebangsaan. Hasil kajian itu kemudian dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD, Pimpinan Badan-Badan MPR dan Lembaga Pengkajian pada 24 Februari 2016. Dalam Ragab itu, seluruh fraksi dan kelompok DPD menyepakati pentingnya haluan bagi pembangunan nasional.

Namun, masih ada beberapa pertanyaan yang menjadi masalah, yaitu apa bentuk hukum sistem perencanaan pembangunan

nasional model GBHN (dalam bentuk Ketetapan MPR, dimasukkan dalam rumusan pasal UUD NRI Tahun 1945, dan diatur melalui undang-undang), dan soal konsekuensi hukum dari adanya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Posisi ini masih belum berubah ketika diadakan Ragab pada 25 Januari 2017. Artinya, masih terdapat beragam pendapat mengenai reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Pertanyaan itu belum terjawab hingga akhir masa jabatan 2014-2019. Meski demikian, pembahasan PPHN pada masa MPR periode 2014-2019 sudah mengerucut. Pertama, semua fraksi dan kelompok DPD sudah menyepakati perlunya haluan negara. Kedua, terdapat perbedaan di antara fraksi dan kelompok DPD tentang bentuk hukum haluan negara. Sebanyak tujuh fraksi (yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Nasdem, PPP, Hanura dan kelompok DPD) sepakat bentuk hukum haluan negara adalah dimasukkan dalam rumusan pasal UUD NRI Tahun 1945 atau dalam bentuk Ketetapan MPR. Artinya, perlu amandemen UUD secara terbatas. Sedangkan tiga fraksi, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat bentuk hukum haluan negara adalah undang-undang (UU).

Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD pada 24 Juli 2018, akhirnya menyepakati untuk membentuk dua

Panitia Ad Hoc. Panitia Ad Hoc I diketuai Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan) bertugas mempersiapkan materi PPHN. Sedangkan Panitia Ad Hoc II diketuai Rambe Kamarul Zaman (Pimpina Fraksi Partai Golkar MPR RI) mempersiapkan Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan MPR.

Sampai akhir masa jabatan MPR periode 2014 – 2019 belum ada keputusan soal bentuk hukum PPHN. Pada Jumat, 27 September 2019, MPR menggelar Sidang Paripurna akhir masa jabatan 2014-2019. Dalam rapat tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan berkenaan dengan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN, maka MPR periode 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR masa jabatan 2014-2019, khususnya terkait dengan substansi dan bentuk hukumnya.

“Berkenaan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, tiga fraksi memberikan catatan, selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui undang-undang,” katanya saat itu.

Rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 keputusan tersebut berbunyi, “MPR masa jabatan 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR RI masa jabatan 2014-2019 berkenaan dengan substansi

dan bentuk hukum PPHN, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR, dengan catatan terdapat pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa PPHN juga dimungkinkan diwujudkan dalam bentuk undang-undang.”

Menindaklanjuti Surat Keputusan MPR itu, Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan pendalaman hasil kajian MPR RI masa jabatan 2014-2019. Sejak terbentuk Oktober 2019, Badan Pengkajian MPR mulai bekerja dan berkomitmen menyelesaikan tugas yang diamanatkan Pimpinan MPR. Di tengah pandemi Covid-19, Badan Pengkajian MPR tetap melaksanakan beragam metode kajian seperti rapat pembahasan, diskusi, seminar, focus group discussion, serap aspirasi, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta praktisi.

Hasilnya, setelah kurang lebih 2 tahun 9 bulan bekerja, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Hasil kajian itu dituangkan dalam dua berkas (paper), yaitu “Rancangan PPHN” dan “Kajian Bentuk Hukum PPHN”. Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, pun sudah melaporkan hasil kerja Badan Pengkajian di depan peserta Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022.

Badan Pengkajian MPR membuat terobosan agar PPHN bisa diterima dan menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggara negara. Terobosan itu adalah membuat Ketetapan (Tap) MPR tanpa melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, yakni melalui Konvensi Ketatanegaraan. Untuk itu, MPR membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amandemen konstitusi. □



BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

## Kita Tidak Ingin Mengganggu UUD

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih terus mengupayakan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rapat Gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD beberapa waktu lalu menyepakati untuk membentuk sebuah tim kecil atau panitia ad hoc guna membahas lebih lanjut hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR, terutama soal materi dan substansi PPHN dan bentuk hukum PPHN. Tim kecil ini tetap bekerja di tengah kegiatan-kegiatan politik memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo meluncurkan buku ke-30 berjudul "PPHN Tanpa Amandemen". Buku ini ditulis berdasarkan disertasi Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dengan judul "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan, dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas". Bamsoet berhasil mempertahankan disertasi itu dalam Sidang Terbuka Promosi Gelar Doktor Bidang Ilmu

Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung pada 28 Januari 2023. Bamsoet meraih predikat yudisial Cumlaude dengan IPK 4.0.

Buku "PPHN Tanpa Amandemen" karya Bamsoet ini diluncurkan di Universitas Terbuka pada Selasa, 21 Maret 2023. Buku itu pun kembali dibedah dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/ DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, pada Rabu, 29 Maret 2023. Menurut Bamsoet, PPHN bisa dihadirkan tanpa amandemen UUD NRI Tahun 1945. PPHN bisa dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan dengan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Ketetapan (Tap) MPR.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembahasan PPHN ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad. Berikut penuturan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini kepada Majelis beberapa waktu lalu. Petikannya.

**Bagaimana perkembangan terakhir pembahasan tentang Pokok-Pokok**

**Haluan Negara (PPHN) di MPR. Pada Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD beberapa waktu lalu telah disepakati untuk membentuk sebuah tim kecil atau tim ad hoc guna membahas lebih lanjut hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR, terutama terkait dengan materi dan substansi PPHN serta bentuk hukum PPHN?**

Perlu saya berikan pemahaman dulu, bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) itu adalah pemikiran dan rencana yang sangat bagus yang memang semestinya ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang besar, penduduknya tersebar di ribuan pulau sangat luas.

Dengan kondisi semacam atau dengan anugerah Allah SWT yang seperti itu, pengelola atau penyelenggara negara mesti memiliki sistem atau rencana yang brilian agar pembangunan berlangsung secara merata, berkelanjutan, dan dinikmati semua warga Indonesia mulai dari kota besar hingga pelosok desa.

Sebenarnya haluan negara sudah ada



sejak era Orde Baru dengan nama GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). (GBHN) itu adalah legacy (warisan Orde Baru) yang sebenarnya sangat baik dan bisa kita contoh. Sekarang muncul dengan nama PPHN. Tujuannya tetap sama, yaitu agar bangsa kita memiliki rencana pembangunan jangka panjang, berkesinambungan dan hasil pembangunan yang merata dinikmati setiap warga negara Indonesia.

Perkembangan terakhir pembahasan PPHN di MPR adalah mau dibawa kemana PPHN. Maksudnya adalah agar PPHN ini lebih dimasifkan lagi dalam hal sosialisasi di masyarakat Indonesia. Kita ingin lebih banyak lagi mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk pendapat atau pandangan mengenai apa plus minus dari PPHN ini ke depan.

**Bagaimana dengan pembentukan tim kecil sesuai hasil Ragab terakhir untuk membahas lebih mendalam**

**tentang dua hal pokok, yaitu materi dan substansi PPHN dan payung hukum PPHN? Sudah sejauhmana tim kecil ini bekerja?**

Memang tidak mudah untuk membahas soal materi dan substansi PPHN serta payung hukum PPHN. Karena itu, perlu harus dikaji lebih baik lagi dengan melibatkan elemen bangsa yang berkompeten. Kita tidak ingin PPHN justru akan menjadi sandungan atau malah masalah baru yang akan merusak persatuan. Padahal niat awalnya untuk kesejahteraan semua.

Mereka (Tim Kecil itu) masih bekerja dan kita berharap bahwa PPHN segera disepakati dan terwujud berdasarkan keinginan kolektif seluruh anak bangsa.

**Khusus tentang payung hukum PPHN, apa yang sudah disepakati?**

Intinya, kalau menurut saya, setelah sekian lama berembuk berdiskusi mencari payung hukum yang tepat untuk PPHN ini,

kesimpulannya bahwa kita tidak ingin mengganggu UUD. Jadi payung hukumnya hanya melalui UU saja.

**Benarkah untuk mewujudkan PPHN maka tidak perlu lagi jalan amandemen UUD?**

Tidak perlu. Kita tidak ingin mengganggu UUD

**Lalu bagaimana dengan opsi payung hukum dalam bentuk UU atau opsi lain, yaitu memberi kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan Tap MPR?**

Itu juga satu opsi. Begini, untuk menjawab semuanya soal payung hukum PPHN, sebenarnya apapun payung hukumnya tidak masalah jika PPHN ini dilihat baik dan saat berjalan terasa dampaknya untuk rakyat dan negara. Jadi, sekarang bagaimana caranya kita ini meyakinkan rakyat bahwa PPHN itu sangat baik buat kehidupan mereka.

Jika PPHN ini baik untuk mereka maka dengan sendirinya akan menguatkan PPHN itu sendiri. Misalnya, PPHN payung hukumnya UU, tidak akan mungkin rakyat menggugat atau mengganggu sesuatu yang mensejahterakan mereka. Poinnya di situ.

**Apakah mungkin PPHN bisa terealisasi pada MPR periode masa jabatan 2019-2024 (yang tinggal satu setengah tahun lagi)?**

Ya, itu harapan kami bahwa PPHN ini bisa terwujud di tahun ini. Walaupun memang agak berat, sebab bangsa ini akan dihadapkan juga dengan Pemilu 2024. Tapi, itulah yang menjadi tenggat waktu kami Pimpinan MPR. Kita harapkan PPHN akan terwujud pada Agustus-September tahun ini.

**Bisakah PPHN ini menjadi legacy (warisan/peninggalan/hasil) dari MPR periode 2019-2024?**

Ya, kami harapkan begitu. PPHN menjadi produk ketatanegaraan yang menjadi legacy baik kami untuk rakyat Indonesia. Makanya, kami gencar melakukan berbagai upaya agar PPHN menjadi sebuah panduan perencanaan pembangunan nasional yang bagus dan kami juga lakukan berbagai upaya sosialisasi dan pemahaman kepada rakyat.

Sesuatu yang baik itu seperti PPHN kita tinggalkan untuk rakyat dan itu mensejahterakan mereka, maka pahala dari Allah SWT akan mengalir dan doa rakyat akan mengalir kepada kita sampai lama seterusnya. □



## Pembukaan Tukседo Exhibit 2023

# Bamsoet, **Jangan** Kaget, Ini Buatan Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tukседo Studio bisa menjadi jawaban bagi para pecinta mobil klasik legendaris untuk mengendarai kendaraan impiannya dengan harga yang terjangkau.

**M**PR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Founder Tukседo Studio Puji Handoko, Co-Founder Tukседo Studio Laksamana Gusti Handoko, dan Ketua IMI Bali Ajik Krisna, membuka Tukседo Studio Exhibit 2023 di Terminal Kedatangan Domestik, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu malam (19/4/23).

Bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I, didukung IMI Pusat, IMI Bali, dan berbagai pihak terkait lainnya, keberadaan Tukседo Studio untuk menunjukkan sesuatu karya anak bangsa yang tidak 'kaleng-kaleng.' Karya anak bangsa itu berupa mobil sport klasik yang sangat ikonik dengan harga aslinya saat ini tidak masuk akal, mencapai jutaan dolar atau ratusan miliar rupiah. Pameran mobil asli buatan Indonesia tersebut juga dimaksud sekaligus menyambut kembali geliat pariwisata Bali menjelang liburan hari raya Idul Fitri lalu.

Melalui Tukседo Studio Exhibit 2023, turis yang datang berlibur ke Bali dalam rangka libur Ramadan dan Idul Fitri, saat menginjakkan kaki di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, bisa langsung menyaksikan kehebatan karya anak bangsa yang telah sukses membuat kendaraan klasik legendaris secara handmade.

Selain kendaraan klasik legendaris, Tukседo Studio juga dipercaya

oleh Dorna Sport dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk membuat trofi Juara MotoGP Mandalika 2022, World Superbike Mandalika 2021 dan 2022, World Supersport Mandalika 2021 dan 2022, serta Asia Talent Cup Mandalika 2021 dan 2022.

Beberapa kendaraan klasik legendaris ikonik yang harga aslinya tidak masuk akal mencapai jutaan dolar atau ratusan miliar rupiah itu kini sudah dibuat Tukседo Studio Bali, antara lain Porsche 356 Speedster (1957), Porsche 356 A Coupe (1955-1959), Porsche 550 Spyder (1953-1956), Mercedes Benz 300 SL Gullwing (1954-1957), Toyota 2000 GT 1968 (1967-1970), Jaguar XK 120 (1948-1954), Ferrari 250 GTO (1962-1964), hingga Maserati 450S (1956-1958).

"Selain hasil kendaraan yang telah diproduksi, melalui pameran ini turis juga bisa menyaksikan proses pembuatan kendaraan dari nol. Dari mulai desain hingga rancang bangun dan pola rangka menggunakan kayu," ujar Bamsoet usai membuka Tukседo Studio Exhibit 2023 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu malam (19/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Tukседo Studio juga telah sukses menyelesaikan uji jalan terhadap berbagai mobil klasik legendaris yang diproduksinya. Antara lain, melibatkan mobil Porsche





550 Spyder, Porsche 356 Coupe, dan Porsche 356 Speedster. Uji jalan tahap pertama menempuh rute dari workshop Tuksedo Studio di daerah Gianyar menuju kawasan Denpasar dan menjelajahi berbagai kawasan di Bali.

“Di Tuksedo Studio, uji jalan dilakukan tidak hanya sekali. Uji coba dan kendali mutu dilakukan secara terus-menerus serta dilakukan evaluasi mengenai berbagai hal

yang perlu disempurnakan hingga mobil benar-benar siap untuk kepuasan pelanggan serta performa yang maksimal di jalan raya. Kehadiran Tuksedo Studio bisa menjadi jawaban bagi para pecinta mobil klasik legendaris untuk mengendarai kendaraan impiannya dengan harga yang terjangkau. Dengan kualitas yang bisa diadu dengan mobil keluaran baru lainnya,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan Tuksedo Studio tidak hanya didukung oleh IMI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga memberikan dukungan serupa saat mengunjungi Tuksedo Studio pada September 2021 lalu.

“IMI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepakat untuk terus bekerja sama menjadikan industri modifikasi otomotif, baik dalam bentuk restorasi maupun produksi sebagaimana dilakukan Tuksedo Studio, sebagai bagian dalam memperkuat tulang punggung perekonomian nasional. Karenanya IMI mendukung langkah Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, yang akan memasukan sektor modifikasi otomotif dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun sebagai turunan dari UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Sehingga industri modifikasi otomotif memiliki payung hukum,” pungkas Bamsuet. □

Kunjungi Pengrajin Kuningan di Bali

# Bamsoet Dorong UMKM Perkuat Pasar Internasional

Keberadaan para pelaku UMKM kerajinan logam, selain membuktikan bahwa tangan-tangan anak bangsa sangat handal dalam melahirkan karya seni, juga telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan Bali.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kiprah para pelaku UMKM kerajinan logam yang memproduksi berbagai patung dan aksesoris dari perak, perunggu, aluminium, tembaga,

kuningan, serta menjual barang-barang antik, yang berada di kawasan Tohpati, Jalan WR Supratman, Denpasar, Bali.

Menurut Bamsoet, tidak hanya menarik untuk turis domestik, produk kesenian dan kerajinan logam yang berada di Sentra

Tohpati, mampu menembus pasar ekspor ke Perancis, Australia, hingga Amerika Serikat, India, dan Timur Tengah.

“Keberadaan mereka selain membuktikan bahwa tangan-tangan anak bangsa sangat handal dalam melahirkan karya seni, juga telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan Bali,” ujar Bamsoet usai mengunjungi Cakra Bronze Statue and Silver, salah satu UMKM Kerajinan Logam di kawasan Tohpati, Denpasar, Bali, Kamis (20/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, para pelaku kerajinan logam di Bali sangat piawai menghasilkan berbagai karya. Misalnya, patung perunggu berbentuk aneka jenis binatang, hingga kap lampu yang terbuat dari plat logam.

“Secara umum, di tahun 2020 lalu saja, produk kerajinan mendominasi ekspor Bali mencapai USD 139 juta atau 54,26%. Produk kerajinan kayu memberi sumbangan paling besar, disusul produk kerajinan logam. Data lain dari Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia mencatat, rata-rata sumbangan ekspor kerajinan logam Bali mencapai USD 6,8 juta,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini juga mendorong pelaku usaha kerajinan logam untuk memasarkan hasil karyanya melalui berbagai platform digital. Sebagai gambaran, laporan Google Temasek & Bain, valuasi ekonomi digital Indonesia tumbuh 49% di tahun 2021 menjadi USD 70 miliar dan diprediksi menjadi USD 146 miliar di tahun 2025. Di sektor e-Commerce, misalnya, Bank Indonesia mencatat transaksi pada tahun 2021 sudah mencapai Rp 401 triliun. Pada tahun 2022 diprediksi mencapai Rp 530 triliun.



“Fakta menunjukkan, transformasi digital memiliki dampak positif dalam mendorong kinerja perekonomian UMKM. Misalnya, pemanfaatan media online dapat meningkatkan peluang 2,1 kali lebih besar

untuk menjual produk UMKM pada skala nasional, dan 4,6 kali lebih besar untuk peluang ekspor. Diperkirakan, dengan strategi yang tepat dan optimal, jika Indonesia mampu meningkatkan literasi digital

UMKM dari 20% menjadi 50% pada tahun 2024, maka proyeksi peningkatan ekonomi yang dihasilkan akan dapat mencapai USD 38 miliar atau sekitar Rp 546,5 triliun,” pungkask Bamsuet. □

## Akselerasi Pertumbuhan Desa Wisata

# Dorong Kebangkitan Pariwisata Nasional

Dorong terus pertumbuhan desa wisata di tanah air dalam rangka ikut serta mengakselerasi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ERTUMBUHAN jumlah desa wisata di tanah air menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (30/4).

Setiap tahun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Dari tahun ke tahun jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut terus bertambah.

Jika pada 2021 ADWI diikuti 1.831 desa wisata dan pada 2022 diikuti 3.419 desa wisata, pada ADWI 2023 ditargetkan akan diikuti 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Lestari, ajang ADWI tersebut tidak sekadar lomba, lebih dari itu sangat diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa. Karena, ujar Rerie—sapaan akrab Lestari— kriteria penilaian lomba tersebut mencakup banyak hal, antara lain desa wisata harus memiliki keunikan dan

keautentikan daya tarik wisata, berupa alam, buatan, serta seni dan budaya.

Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, penilaian juga akan melihat peningkatan standar kualitas pelayanan dengan melestarikan budaya lokal. Sekaligus, standar kualitas toilet dalam memenuhi sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Kriteria penilaian lainnya, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, akan dilihat dari kemampuan akselerasi transformasi digital, serta menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata secara digital.

Sementara itu, setiap desa wisata juga harus bisa menggali kreativitas dan hasil karya desa wisata berupa kuliner, fesyen, dan kriya berbasis kearifan lokal. Melalui sederet kriteria penilaian itu, Rerie yakin, peserta ADWI merupakan desa wisata yang memiliki potensi alam yang menarik dan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif.

Menurut Rerie, kombinasi potensi desa yang baik dan SDM yang kreatif merupakan modal penting dalam mengembangkan suatu desa menjadi desa wisata yang menarik. Dengan semakin banyaknya daya tarik pariwisata Indonesia, tegas Rerie, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional sekaligus menstimulasi kolaborasi antarunsur pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) melalui desa wisata dan pariwisata nasional secara umum. □

Wawancara dengan Media Korea Selatan

# Bamsoet: PPHN akan Memastikan Kesiambungan Pembangunan IKN

Selain investasi di IKN, Korea Selatan yang kini menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi di berbagai sektor lainnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Indonesia - Korea Network untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN untuk IKN Nusantara) Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan berbagai pihak di Korea Selatan terhadap langkah Indonesia membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Namun berbagai media dan publik di dunia internasional, termasuk Korea Selatan, mengungkapkan, mereka akan lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan, walaupun Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat

sebagai Presiden Indonesia.

Mengingat jika hanya diatur dalam Undang-Undang (UU) sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Karena itu, selain telah memiliki dasar hukum melalui UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN Nusantara juga akan diperkuat melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang disiapkan oleh MPR RI. Sehingga para duta besar, diplomat, investor, dan berbagai pihak lainnya, termasuk media, tidak perlu khawatir terhadap pembangunan IKN Nusantara.

“Keberadaan PPHN akan memastikan kesiambungan pembangunan IKN

Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, atau sekitar 4 kali Pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional,” ujar Bamsoet dalam wawancara dengan Mr. Seung-Hwan Chung dari media Korea Selatan, Maekyung Media Group, di Jakarta, Kamis (4/5/23).

Turut hadir, antara lain Penghubung Komunitas Indonesia-Korea Selatan (Korea-Indonesia Association) Mr. Ali, serta Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga menjelaskan, Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama teknis pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara, yang bisa menjadi rujukan bagi berbagai perusahaan Korea Selatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 27%. Sesuai rencana, sekitar 30% dari perkiraan total anggaran sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari

APBN. Sisanya 70% atau sekitar Rp 300 triliun lebih akan diperoleh melalui investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pada Mei 2022, saya diajak oleh pimpinan National Agency for Administrative City Construction/Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Mr. Park Mooik, untuk meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korea Selatan, yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul. Pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun 2030, atau sekitar 23 tahun sejak dilakukannya groundbreaking pada tahun 2007. Sangat

tepat jika dengan pengalaman yang dimiliki, Korea Selatan menjadi mitra strategis bagi Indonesia yang sedang membangun IKN Nusantara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain investasi di IKN Nusantara, Korea Selatan yang kini menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia, juga memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi di berbagai sektor lainnya. Misalnya, di sektor otomotif dengan memproduksi motor listrik di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bersama Blackstone Group. Maupun di sektor infrastruktur dengan berinvestasi dalam pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Toll Road di Bali bersama PT. Tol Jagat Kerthi Bali. Membentang 96,8 Km dari Gilimanuk - Mengwi, menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai kawasan metropolitan di Denpasar.

Berbagai investasi yang dilakukan Korea Selatan di Indonesia semakin menguatkan hubungan bilateral Indonesia - Korea Selatan yang pada tahun ini memasuki usia ke-50 tahun. Perayaan hubungan diplomatik tersebut akan diperingati di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 16 Mei 2023. Selain dihadiri pejabat kedua negara, rencananya juga turut mengundang 120 lebih perusahaan asal Korea Selatan yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

“Sebagai kado terindahannya, Indonesia dan Korea Selatan telah memberlakukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) pada 1 Januari 2023. Total perdagangan kedua negara pada periode Januari-Maret 2022 mencapai USD 6,09 miliar. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar USD 3,11 miliar, impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar USD 2,98 miliar. Melalui skema CEPA, kerjasama ekonomi kedua negara diharapkan dapat ditingkatkan sehingga pada tahun 2023 ini neraca perdagangannya bisa berimbang dan surplus dari sisi Indonesia,” pungkas Bamsoet. □



Membersihkan Gorontalo dari Miras

# Fadel Dukung Pemberantasan Miras di Provinsi Gorontalo

Minuman keras (miras) adalah ibu dari banyak kejahatan. Karena banyak aksi kriminal yang terjadi akibat pelakunya mengonsumsi miras.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad MM., mengapresiasi langkah Kapolda Gorontalo, Irjen. Pol. Drs. Angesta Romano Yoyol, M.M., menjauhkan masyarakat dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Karena keberadaan miras di tengah masyarakat bisa menimbulkan berbagai jenis kejahatan.

“Miras itu ibunya kejahatan. Banyak oknum pelaku kejahatan yang memulai aksi kriminalnya dari mengonsumsi miras. Jadi, kalau Pak Kapolda memberantas miras di Gorontalo, itu artinya membersihkan bentuk kejahatan lainnya, yang sering dimulai karena pelakunya mengonsumsi minuman keras. Mudah-mudahan cara ini didengar dan menginspirasi daerah lain di Indonesia

untuk mengikuti,” harap Fadel Muhammad.

Apresiasi Fadel Muhammad kepada Kapolda Gorontalo itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Besar Al Mutattohhirin Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Jumat (28/4/2023). Ikut hadir pada acara tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen. Pol. Drs. Angesta Romano Yoyol, M.M., Walikota Gorontalo Dr. H. Marten A. Taha, SE., M.Ec. Dev., Pengurus Masjid dan jamaah Masjid Besar Al Mutattohhirin.

Saat datang untuk bersilaturahmi sekaligus melaksanakan salat Jumat, Fadel Muhammad yang tiba bersama Angesta Romano Yoyol mendapatkan sambutan secara adat. Berbagai sambutan dan harapan disampaikan kepada keduanya, terlebih terhadap Kapolda Gorontalo yang baru menjabat sejak Maret lalu.

Pada kesempatan itu, Fadel juga mengajak masyarakat bahu-membahu membantu Kapolda menjaga keamanan di Gorontalo. Terlebih disuasana lebaran dan tahun politik jelang Pemilu 2024.

“Sampaikan saran dan masukan dengan cara yang bijaksana. Laporkan bila ada sesuatu yang tidak semestinya, semoga kita semua senantiasa dalam lindung Allah SWT, karena Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik,” kata Fadel lagi.

Menanggapi apresiasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR, Irjen. Pol. Drs. Angesta Romano Yoyol menegaskan, sejak diangkat menjadi Kapolda Gorontalo pada Maret silam, dirinya tidak bisa mentolerir peredaran miras. Seluruh peredaran miras sudah ditertibkan. Baik pelaku maupun bekungnya, akan ditindak tegas, tanpa terkecuali.

“Saya akan membersihkan Provinsi



berjuluk Bumi Serambi Madinah ini dari minuman keras. Tidak boleh ada setetes miras pun yang bisa beredar bebas di sini, demikian juga benda benda lain yang bisa memabukkan. Karena saya sadar, menjauhkan masyarakat dari miras atau barang haram lainnya berarti mencegah kemungkinan terjadinya banyak kejahatan,” pungkasnya. □

MBO



## Aksi Penembakan di Kantor MUI

# Fadel Muhammad: Waspada Upaya Pemecah Belah Bangsa

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengecam keras aksi penembakan yang terjadi di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

**T**IDAK ada kejelasan motif dari si penembak. Saat itu, pelaku ingin bertemu dengan Ketua MUI, Miftachul Akhyar, tiba-tiba pelaku emosi dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Gedung MUI yang mengakibatkan tiga pegawai MUI terluka ringan akibat serpihan kaca. Pelaku sendiri kemudian pingsan dan tewas usai melakukan aksi.

“Saya menduga, tidak menutup kemungkinan ini adalah perbuatan pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam dan harmonisasi yang ada di Indonesia, dan berupaya mengacaukan situasi dan kondisi untuk menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat,” ujar Fadel Muhammad, di Gorontalo, Rabu (3/5/2023).

Apalagi, lanjut Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini, tahun politik 2024 kian dekat. Fadel sangat berharap penembakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan upaya mengacaukan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Untuk itulah, saya berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki apa motif pelaku yang sebenarnya,” tambahnya.

Fadel Muhammad mengajak masyarakat, terutama umat Islam, untuk tenang, jangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bereaksi berlebih serta jaga selalu harmonisasi antarumat dan antarwarga negara lainnya. “Kita serahkan dan percayakan semua ini kepada yang berwenang. Tetap saling menjaga agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Kota Gorontalo KH. Abdul Muin Mooduto mengutuk keras kejadian tersebut. Abdul

Muin mempertanyakan kenapa lembaga terhormat, seperti MUI dan Ketuanya, menjadi sasaran kejahatan seperti itu.

“Intinya, mari kita serahkan semua kepada aparat yang berwenang agar semua menjadi jelas. Mudah-mudahan pasca peristiwa ini, menjadi pelajaran untuk MUI seluruh Indonesia agar selalu waspada dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” ujarnya. □

Teror Beruntun Jelang Pemilu

# HNW: Polisi Harus Usut Tuntas dan Menindak Tegas Pelakunya

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan, di tahun politik ini membutuhkan kondisi yang tetap kondusif agar demokrasi berjalan dengan baik untuk hadirkan hasil yang baik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA., sangat prihatin memasuki tahun politik, jelang Pemilu, teror terhadap Umat Islam (pribadi, simbol maupun organisasi) di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir malah terjadi secara beruntun. Penting bagi Polisi, bukan hanya menangkap pelakunya tapi juga mengusut tuntas dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi keras terhadap pelaku dan otak/aktor intelektualnya. Berulangnya tindakan teror dan kriminal terhadap tokoh Agama atau simbol Agama juga membuktikan semakin pentingnya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama untuk segera dibahas dan diundangkan.

Teror-teror yang meresahkan publik dan terjadi secara beruntun, seperti ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah, lalu warga Australia yang meneror dan meludahi penjaga masjid, hingga penembakan yang terjadi di kantor Majelis

Ulama Indonesia (MUI). Peristiwa teror beruntun di tahun politik, jelang Pemilu, ini perlu diwaspadai agar langkah-langkah preventif bisa dilakukan, agar pelaku dan aktor di belakangnya dapat ditangkap dan ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi hukum yang keras. Tindakan itu perlu, agar di tahun politik, jelang Pemilu, suasana tetap kondusif, agar hasil Pemilu bisa hadirkan Indonesia yang lebih baik.

“Saya apresiasi aparat kepolisian bisa segera merespons dan menangkap para pelakunya. Tapi, mestinya tidak hanya ditangkap, apalagi bila ujungnya pelaku dinyatakan tidak waras seperti kasus-kasus teror terhadap masjid dan tokoh agama Islam yang terjadi sebelumnya. Sangat penting untuk menghadirkan sanksi tegas dan keras untuk menciptakan efek jera, serta mengusutnya secara tuntas siapa di balik teror-teror ini, agar tidak terulang lagi,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (3/5).

HNW mengatakan, ironisnya pengan-

caman terbuka pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah dilakukan oleh seorang oknum aparat sipil negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hanya karena perbedaan penetapan Idul Fitri. Padahal, kita semua tahu bagaimana hal ini sudah sering terjadi tanpa masalah, termasuk Pemerintah yang tidak mempermasalahkannya juga. Apalagi kontribusi Persyarikatan Muhammadiyah bagi negara ini dengan tokoh-tokohnya yang diakui negara sebagai Pahlawan Nasional, karena memang jasa besar mereka ikut mendirikan dan membangun bangsa Indonesia.

“Penjatuhan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan teror ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah juga agar ancam-mengancam seperti itu tidak terulang kembali terhadap warga Ormas-Ormas lainnya, apalagi bila itu ormas Islam yang sudah berjasa dan ada sebelum Indonesia merdeka dan ikut berjuang mendirikan negara, seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), dan lain sebagainya,” tukas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya, terkait aksi Warga Australia yang meneror dan meludahi penjaga masjid juga perlu ditindak tegas dan diusut tuntas, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. “Termasuk keresahan banyak warga Bali karena ulah wisatawan luar negeri yang kerap melecehkan tempat yang dihormati atau disakralkan oleh warga Hindu Bali,” tutur HNW yang juga anggota Komisi VIII DPRRI.

HNW mengatakan, teror berikutnya adalah penembakan kantor MUI saat pimpinan MUI sedang rapat, oleh pria yang sebelumnya mengaku nabi. “Ini teror yang sangat berbahaya dan disesalkan. Kalau saja, aparat bisa preventif lebih awal, dengan segera meringkus orang yang mengaku nabi, dan tentunya adalah nabi palsu, bisa



saja peristiwa teror di kantor pusat MUI di Jakarta tersebut tentunya dapat dihindarkan. Penindakan yang tegas dan sanksi hukum yang keras diperlukan agar peristiwa serupa jangan sampai terulang,” tukasnya.

Oleh karenanya, HNW mengingatkan di tahun politik yang membutuhkan kondisi yang tetap kondusif agar demokrasi berjalan dengan baik untuk hadirkan hasil yang baik. Maka selain kesiapan aparaturnya penegak hukum, juga

diperlukan instrumen hukum *lex specialis* yang bisa hadirkan kondisi kondusif yang melindungi tokoh agama dan simbol agama dan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap mereka yang melanggarnya.

Karenanya, sewajarnya bila RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang diusung oleh Fraksi PKS dan sudah disetujui oleh Baleg DPR RI masuk sebagai program legislasi nasional

(prolegnas) prioritas, agar segera dibahas dan disetujui bersama pemerintah, agar peristiwa-peristiwa teror dan pelecehan seperti itu bisa dimitigasi, dan agar teror seperti itu tidak terjadi lagi. “Agar suasana di tahun politik ini tetap kondusif dan harmoni di antara warga bangsa tetap terjaga, agar Rakyat bisa menggunakan kedaulatannya hadirkan hasil positif untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. □

## Penyelesaian Papua

# Bamsoet Dukung Langkah Pemerintah Percepat Penyelesaian Papua

Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi menjadi jargon ataupun angan-angan semata.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis KKB yang kerap menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan. Para korban berjatuh bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparaturnya TNI dan Polri.

Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

“Sikap Pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (29/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

daerah serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

“Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca

penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur. Masyarakat Papua tak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur, dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuh baik prajurit maupun rakyat,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPPI ini mengingatkan, menjelang pertengahan tahun 2023 saja, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua. Misalnya, pada awal Februari 2023 terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak. Menyebabkan 12 orang meninggal dunia, serta 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tak hanya itu, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, menurut Bamsoet, upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun 'jiwa' manusia Papua, yaitu membangun

berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua. "Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan. Bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan. Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya," pungkas Bamsoet. □

**Seminar Standar Mutu UMKM**

# Syarief Hasan: Agar UMKM Naik Kelas, Standarisasi Produk Kuncinya

Dengan jaminan mutu produk UMKM yang kian meningkat maka UMKM Indonesia akan mampu bersaing, tidak saja domestik namun juga mengglobal.

**W**AKIL Ketua MPR, Syarief Hasan, menilai, peningkatan standar mutu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui standarisasi dan penilaian kesesuaian produk-produk UMKM harus terus didorong dan dikawal oleh semua pemangku kebijakan. Hal ini sangatlah beralasan, sebab UMKM adalah kelompok usaha mayoritas dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM akan sangat berdampak pada tersedianya lapangan kerja dan pemacu pertumbuhan ekonomi.

"Saya mendorong agar peningkatan standar mutu dan standarisasi produk-produk UMKM harus terus digiatkan. Ini sangatlah penting agar daya saing UMKM meningkat sehingga dapat menembus pasar global. Apalagi dengan tren digitalisasi sekarang ini, peluang produk UMKM untuk diekspor menjadi sangat memungkinkan. Kuncinya adalah peningkatan kualitas produk," ujar Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Dalam seminar bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Kota Bogor



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(Jum'at, 14/4), yang juga dihadiri oleh Kepala BSN, Kuku S. Achmad. Profesor di Bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini menilai, peran BSN dalam pembinaan dan koordinasi standarisasi dan penilaian kesesuaian produk harus terus didukung. UMKM adalah wujud usaha kerakyatan yang mencerminkan semangat kegotongroyongan.

Dalam banyak momentum dramatis dinamika perekonomian, UMKM terus bertahan, meski kondisi ekonomi bangsa terpuruk.

Oleh karenanya, harus ada upaya afirmasi dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM, termasuk dalam hal ini standarisasi dan peningkatan standar mutu produk. Jika UMKM berdaya, rakyat ikut sejahtera,

ekonomi juga tumbuh. Ini adalah konsekuensi logis dari peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional. Dengan jaminan mutu produk UMKM yang kian meningkat, maka UMKM Indonesia akan mampu bersaing, tidak saja domestik, namun juga mengglobal.

Menurut Syarif, di tengah gempuran

berbagai produk impor yang menjamur di berbagai pusat perbelanjaan maupun platform digital, atensi peningkatan kualitas UMKM harus diutamakan. "Saya kira di sinilah pentingnya lembaga standarisasi," ungkap Syarif Hasan.

Jika mau UMKM kita terus naik kelas, lanjut

Syarief Hasan, maka standarisasi produk adalah kuncinya. "Saya mendukung agar kapasitas kelembagaan BSN diperkuat, dukungan manajemen, dan anggarannya harus kompatibel dengan pengarusutamaan UMKM dalam perekonomian nasional," tutup Syarif. □

## Delegasi Pengurus Pusat GMKI

# Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Pancasila Fest 2023

Penanaman ideologi Pancasila sangat penting mengingat kebhinnekaan dalam negara yang kaya akan keberagaman hanya bisa wujudkan dengan komitmen kuat untuk mengelola kemajemukan dengan baik dan benar.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) akan menyelenggarakan 'Pancasila Fest 2023. Ekspresi Pancasila, Satu Indonesia.' Penyelenggaraannya dimulai di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10 Mei 2023. Kemudian lanjut ke Riau, Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, hingga puncaknya akan diselenggarakan di Gedung

MPR RI pada Agustus 2023.

"Pancasila Fest 2023 merupakan terobosan dalam menanamkan ideologi Pancasila kepada generasi muda bangsa melalui berbagai bentuk kegiatan yang menarik. Selain seminar dan workshop tematis Pancasila, juga akan ada penanaman pohon dan mewujudkan bank sampah, pagelaran seni dan budaya, mimbar kebangsaan dan deklarasi kebangsaan ekspresi Pancasila, satu Indonesia, dialog dan doa bersama pemuda dan mahasiswa lintas agama, serta pembubuhan prasasti

Pancasila," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat GMKI, di Jakarta, Rabu (3/5/23).

Pengurus Pusat GMKI yang hadir, antara lain Ketua Umum Jefry Gultom, Bendahara Umum Bertin T.W Zamili, Wakil Sekretaris Umum Elsyte Titihlawa, Kabid Aksi dan Pelayanan Ranto Pasaribu, Sekfungs Organisasi Keny Gainau, Sekfungs Masyarakat Riswan Siahaan, Sekfungs Ekonomi Kreatif Novrita Sandante, Sekfungs Hubungan Internasional Jessica Warouw, serta Sekfungs Kerohanian Sterky Konehe.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, penanaman ideologi Pancasila sangat penting mengingat kebhinnekaan dalam negara yang kaya akan keberagaman hanya bisa wujudkan dengan komitmen kuat untuk mengelola kemajemukan dengan baik dan benar. Kegagalan dalam mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut akan berpotensi mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang dapat mereduksi semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan radikalisme, dan menimbulkan konflik horizontal.

"Kita dapat belajar dari referensi global bahwa pada masanya, Uni Soviet dan Yu-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

goslavia adalah representasi negara besar dan maju di kawasan Eropa Timur. Namun, kegagalan dalam membangun semangat kebersamaan dan kelalaian dalam merawat soliditas ikatan kebangsaan telah

menyebabkan kedua negara besar tersebut terpecah-belah dan tercerai-berai,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, setelah lewat tiga perempat abad usia kemerdekaan Indonesia, dan di tengah modernitas zaman yang terus melaju, tantangan untuk menjaga dan merawat Pancasila tidak menjadi semakin mudah. Kehidupan kebangsaan juga diperhadapkan pada berbagai paradigma yang menjadi antithesis dari nilai-nilai luhur Pancasila.

“Masih dapat kita rasakan indikasi adanya upaya untuk menggoyahkan dan merongrong Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, khususnya melalui gerakan radikalisme. Meskipun hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan indeks potensi radikalisme di Indonesia cenderung terus mengalami penurunan, namun perlu dicatat bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 masih berada pada kisaran 125, di mana mayoritasnya didominasi oleh generasi muda,” pungkas Bamsoet. □

## KASAU CUP 2023

# Bamsoet Juara III dan IV Kategori Tembak Eksekutif dan Duel Falling Plate

Kegemaran Bamsoet menekuni olahraga menembak tidak lain karena olahraga menembak mengajarkan konsentrasi dalam berpikir dan bertindak, kemahiran akurasi dan ketahanan, fokus pada ketepatan mengambil keputusan, hingga tanggung jawab dan etika.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin khusus Senjata Api Bela Diri (DPP-PERIKHSA) dan Ketua Dewan Penasihat PB-PERBAKIN, serta penerima penghargaan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur dan Warga Kehormatan TNI-Angkatan Udara, Bambang Soesatyo, meraih Juara III dan IV Kejuaraan Nasional Menembak KASAU CUP 2023, kategori Tembak Eksekutif dan Duel Falling Plate. Sementara Pj. Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono, meraih Juara I, Pimpinan VII BPK RI Hendra Susanto sebagai Juara II

katagori Eksekutif, dan Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Juara III katagori Duel Falling Plate.

Kejuaraan Nasional Menembak KASAU CUP 2023 diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-77 TNI AU. Diikuti ratusan atlet menembak tanah air, baik dari kelompok eksekutif, TNI dan Polri, serta dari berbagai kalangan penembak lainnya. Selain tembak Eksekutif Dual Falling Plate, materi lomba lainnya yakni pistol 20 dan 25 meter, senapan 300 meter, tembak reaksi, air force style, dan berbagai materi lomba antarsatuan jajaran TNI AU dalam memperebutkan piala bergilir KASAU CUP.

“Kejurnas Menembak KASAU CUP yang rutin diselenggarakan setiap tahun, dan selalu rutin saya ikuti, merupakan bukti kepedulian TNI AU di bawah kepemimpinan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi atlet menembak Indonesia,” ungkap Bamsoet usai mengikuti Kejurnas Menembak KASAU CUP 2023 di lapangan tembak Djamsuri Wing Komando 1 Kopasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (7/5/23).

Turut hadir, antara lain KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Komandan Sekso TNI Marsekal Madya TNI Kusworo, Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Tedi Rizalhadi, serta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Panglima Koops Udara Nasional Marsdya TNI M. Tonny Harjono

Maka tidak heran, kata Bamsoet, hingga saat ini atlet menembak Indonesia, khususnya yang berasal dari TNI AU, telah meraih berbagai penghargaan yang mengharumkan nama bangsa. Di antaranya, Sertu Trisnarmanto (anggota Sattis Denma Kopasgat TNI AU) sukses meraih medali emas Juara 1 nomor 50 Meter Riffle 3 Positions Team Men bersama Serda Busri

Muhammad Hasan dan Serda Gustafian Fatur dari TNI AD pada kejuaraan dunia Federasi Olahraga Menembak Internasional atau ISSF World Cup pada 27 Januari-8 Februari 2023.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum dan Keamanan ini menjelaskan, olahraga menembak merupakan salah satu cabang olahraga yang masuk dalam pertandingan Olimpiade, sehingga termasuk cabang olahraga



bergengsi dunia. Pada SEA Games 2019 di Filipina, kontingen menembak Indonesia berhasil menjadi Juara Umum dengan mendapatkan 7 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Keberhasilan itu menjadi momentum kebangkitan cabang olahraga menembak, karena untuk pertama kalinya kontingen menembak Indonesia berhasil menjadi tim terbaik sejak SEA Games diselenggarakan perdana di Malaysia pada tahun 1977.

“Sayangnya dalam SEA Games 2023 di Kamboja, cabang olahraga menembak tidak diikutsertakan karena tuan rumah tidak memasukkannya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun, bukan berarti atlet menembak kita bisa santai. Mereka harus tetap mempersiapkan diri untuk berlaga dalam Asian Games 2022 yang tertunda karena pandemi Covid-19 sehingga akan digelar di Hangzhou, Cina, pada 23 September hingga 8 Oktober 2023,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan penasihat PB-PERBAKIN serta Wakil Ketua Umum FKPI ini sebelumnya juga telah meraih penghargaan di berbagai ajang kejuaraan menembak. Di antaranya, Juara III Kelas Novelty Shoot Eksekutif Kejuaraan Menembak Baladika Open Championship 2022 yang diselenggarakan Group 1 Kopassus, November 2022; Juara I Best of The Best Kelas Eksekutif dalam Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022, Juli 2022; Juara II Kejuaraan Menembak Tribuana Merah Putih Open Championship 2022 IPSC Level II, Kelas Novelty Shoot 100 meter, 300 meter, dan 400 meter yang diselenggarakan Sat-81 Kopassus, Agustus 2022; serta Juara III kelas menembak Presisi Eksekutif 15 meter, Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022, Oktober 2021.

“Kegemaran saya menekuni olahraga menembak tidak lain karena olahraga menembak mengajarkan konsentrasi dalam berpikir dan bertindak, kemahiran akurasi dan ketahanan, fokus pada ketepatan mengambil keputusan, hingga tanggung jawab dan etika,” pungkas Bamsoet. □

Terima Pengurus Yayasan AMI

# Bamsoet Dukung Pelaksanaan AMI Award 2023

Yayasan AMI juga turut memajukan industri permusikan dengan memastikan para pelaku industrinya bisa mendapatkan hak ekonomi yang sesuai.

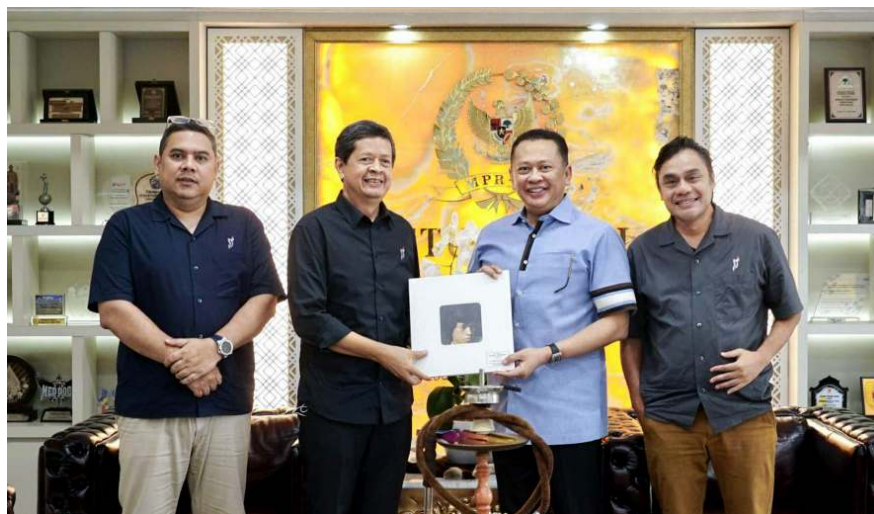


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Dewan Penyantun Yayasan Anugerah Musik Indonesia (AMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Ketua Umum Yayasan AMI Candra Darusman, Dwiki Dharmawan, dan Satria Darma, mematangkan persiapan penyelenggaraan AMI Award 2023, yang akan diselenggarakan pada akhir Oktober 2023. Salah satu penghargaan yang diberikan, yakni Awards kepada musisi Tanah Air yang sukses Go Internasional.

Berbagai penghargaan kepada insan musik kreatif Indonesia akan diberikan dalam AMI Awards 2023. Selain itu, juga akan diselenggarakan fundraising AMI Peduli, untuk memberikan bantuan sosial kemanusiaan kepada para musisi senior yang telah banyak memberikan warna bagi kehidupan sosial kebangsaan, namun kondisinya di masa kini justru memprihatinkan.

“AMI Awards dan AMI Peduli menjadi dua program kerja Yayasan AMI untuk

mengapresiasi, memajukan, sekaligus melindungi musisi Tanah Air. AMI Awards tahun ini rencananya diselenggarakan secara mandiri oleh Yayasan AMI dengan dukungan dari para sponsor. Melibatkan penampilan musisi Tanah Air, rencananya akan kita undang Dewa-19, Slank, Noah, dan berbagai musisi lainnya. Sehingga penyelenggaraan AMI Awards seperti konser, dengan tiket yang bisa dijual kepada masyarakat yang ingin menyaksikan penampilan musisi favoritnya,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Yayasan AMI Candra Darusman, di Jakarta, Selasa (9/5/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain fundraising yang dilakukan langsung pada saat penyelenggaraan AMI Awards, rencananya juga akan melibatkan berbagai platform, seperti KitaBisa.com yang dulu pernah bekerjasama dengan MPR RI saat menggalang dana saat awal pandemi Covid-19. Sehingga memudahkan masyarakat umum yang ingin turut memberikan bantuan.

“Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan oleh AMI Peduli untuk membantu para musisi Tanah Air yang membutuhkan. Dari perhitungan awal, dibutuhkan sekitar Rp 150 juta untuk memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada 100 musisi, dengan jangka waktu satu tahun. Semakin besar dana terkumpul, semakin banyak musisi yang bisa diberikan bantuan, serta semakin lama jangka waktu para musisi tersebut mendapatkan bantuan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain AMI Awards dan AMI Peduli, Yayasan AMI juga memfasilitasi para pelaku UMKM yang memproduksi berbagai alat musik tradisional Indonesia untuk memasarkan produknya ke berbagai negara dunia. Mengingat Indone-



sia memiliki banyak alat musik tradisional luar biasa, seperti Angklung, Kecapi, Sasando, Tifa, Kolintang, dan lain sebagainya.

“Yayasan AMI juga turut memajukan industri permusikan dengan memastikan para

pelaku industrinya bisa mendapatkan hak ekonomi yang sesuai. Komitmen pemerintah dalam memajukan para musisi tidak perlu diragukan. Pada 30 Maret 2021 lalu misalnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tinggal pelaksanaannya yang harus kita kawal bersama,” pungkas Bamsuet. □

## Ulang Tahun Ke-20 CISC

# Lestari Moerdijat: Bangun Kebersamaan untuk Menghidupkan Harapan Penderita Kanker

Bangun kebersamaan untuk mewujudkan setiap tujuan dalam menghidupkan harapan para penderita dan penyintas kanker di tanah air.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ITA bersama-sama menebar semangat dalam rangka ulang tahun ke-20 CISC saat ini, merupakan bagian dari perayaan kehidupan. Kita diberi kesempatan kedua untuk hidup dan mari kita berdamai dengan kematian,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya pada acara Parade Kreativitas Etnik Nusantara Dua Dekade CISC: Make Your Goals Happen, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad (7/5).

Hadir pada acara tersebut, drg. Widyawati, MKM., (Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI), Aryanthi Baramuli Putri (Ketua Umum Cancer Information and Support Center Association / CISC), sejumlah aktivis organisasi pemerhati

kanker dan perwakilan sejumlah rumah sakit, serta para penyintas kanker.

Karena, menurut Lestari, hidup dan mati seseorang adalah sepenuhnya keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan, tambah Rerie — sapaan akrab Lestari — setiap manusia memiliki harapan, karena kita punya kesempatan.

Sebagai penyintas kanker payudara, Rerie berpesan agar para penderita dan penyintas kanker di tanah air harus terus memiliki mimpi dan semangat dalam menjalani, serta merayakan kehidupan.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengapresiasi terselenggaranya parade Kreativitas Etnik Nusantara Dua Dekade yang merepresentasikan kebersamaan dalam keragaman, kegembiraan

dalam rupa warna yang indah busana adat dari berbagai daerah.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, warna-warni budaya menghadirkan makna kebhinnekaan yang merupakan bagian dari nilai kebangsaan yang kita miliki. Apalagi, tegas Rerie, parade Kreativitas Etnik Nusantara Dua Dekade CISC itu dihadiri oleh perwakilan CISC dari 13 provinsi di Indonesia.

Rerie sangat berharap para penyintas kanker yang tergabung dalam CISC dan organisasi lainnya di Indonesia terus menggaungkan suara para penderita dan penyintas kanker, bahwa kita semua memiliki hak dan kesempatan untuk sehat dan mendapatkan informasi yang benar menyangkut pengobatan dan perawatan tentang kanker. □

Deklarasi dan Pelantikan DPW BERANI

# Gus Jazil: Keberagaman Agama di Nusantara Harus Jadi Sumber Persatuan

Agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Sebab, politik merupakan suatu kekuatan yang bukan bertujuan untuk memecah belah bangsa, namun justru untuk mempersatukan bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan antarumat beragama di Indonesia. Apalagi, bangsa ini lahir atas usaha dan perjuangan bersama seluruh komponen umat beragama.

"Paham kebangsaan dan nasionalisme ini dibangun dari nilai-nilai agama. Ini juga yang

mempersatukan Indonesia dan yang akan membawa Indonesia ke depan menjadi negara unggul," ujar Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid— saat memberikan sambutan pada acara deklarasi sekaligus pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Badan Persaudaraan Antar Iman (DPW BERANI) Provinsi Bali di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Bali di Kota Denpasar, Sabtu (6/5/2023).



Dikatakan Gus Jazil, kerukunan antarumat beragama ini harus terus ditingkatkan. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berpotensi terjadi peningkatan ketegangan politik. "Kita sedang menghadapi tantangan yang berpotensi memecah belah persatuan. Salah satunya ideologi yang datang dari luar, ideologi transnasional yang sering mengedepankan paham-paham tidak benar. BERANI lahir untuk menghalau agar Indonesia tumbuh dengan kekuatan nilai-nilai agama yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri," tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan bahwa agama dan **politik** tidak bisa dipisahkan. Sebab, politik merupakan suatu kekuatan yang bukan bertujuan untuk memecah belah bangsa, namun justru untuk mempersatukan bangsa.

"Pemilu 2024 sudah di ambang waktu maka kita jangan jadikan pemilu sebagai ruang pemecah belah persatuan, munculnya isu politik identitas, memunculkan kesalahpahaman antar kita. BERANI harus menyampaikan bahwa iman, agama, dan politik bisa serasi berjalan, bukan untuk dipertentangkan," katanya.

Karena itu, kata Gus Jazil, keberagaman agama yang ada di Nusantara ini harus menjadi sumber persatuan. Bukan sebaliknya, perbedaan agama dan keyakinan sebagai sumber perpecahan. "Kami di PKB juga berbagai macam agama. Nah, BERANI dideklarasikan di Bali maka harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Bali bisa menjaga kerukunan dan perdamaian, karena Bali ini adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kita harus bisa menjalankan Pancasila melalui wadah BERANI ini," tuturnya. □



Pengurus Baru JQH Periode 2023-2028

# Gus Jazil Dilantik Jadi Dewan Penasihat JQH Gresik

Pengurus JQH adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan. Zaman gini masih mau urus Jamiyatul Qura' Wal Khuffat, itu pasti orang pilihan karena mau memilih jalan yang berat,” tutur Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Jazilul Fawaid didaulat sebagai Dewan Penasihat Jamiyatul Qura' Wal Khuffat (JQH) Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid—dilantik sebagai Dewan Penasihat JQH Gresik bersama jajaran pengurus baru JQH Periode 2023-2028 di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Kertosono, Sidoarjo, Gresik, Ahad malam (7/5/2023).

Gus Jazil mengatakan bahwa para pengurus JQH adalah orang-orang mulia dan pilihan, karena mau peduli untuk melestarikan dan mensyiarkan Alquran. “Pengurus JQH ini orang-orang mulia, orang-orang pilihan. Zaman gini masih mau urus Jamiyatul Qura' Wal Khuffat, itu pasti orang pilihan karena mau memilih jalan yang berat,” tuturnya.

Karena itu, Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta (IKA PTIQ) ini mengajak para pengurus JQH untuk berkomitmen dalam membina anak-anak

menjadi generasi muda yang cinta terhadap Alquran. “Ini supaya anak-anak kita ngajinya bagus, suaranya bagus. Sekarang ini banyak TPQ, tapi biasanya ngaji pakai murottal. Mengaji dengan naghom (keindahan suara) kurang,” tuturnya.

Gus Jazil pun siap menjadikan Ponpes Modern Sunanul Muhtadin yang didirikannya di Sidoarjo, Gresik, sebagai partner JQH. Apalagi, saat ini di Ponpes Modern Sunanul Muhtadin sudah didirikan “Quranic Center” Jamiyah Madrasah Alqur'an (JMQ) Jawa Timur yang dibina langsung KH. Khoirul Manan, S.Q., juara tahfidz quran 20 juz tingkat nasional yang sebelumnya selama 21 tahun mengajar di Pusat Alquran Kerajaan Brunei Darussalam.

“Mari kita bersama-sama membina anak-anak kita generasi masa depan yang cinta Alquran, menjadi hafidz, sebab hari ini menyuruh anak mengaji Alquran itu tidak gampang. Kalau sudah pegang handphone, itu sulit. Anak-anak lebih memilih main

handphone,” kata Gus Jazil yang juga sebagai Ketua JMQ Jatim.

Menurutnya, kemudahan teknologi informasi belakangan ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak untuk mau mempelajari Alquran. “Saya senang kalau pesantren ini dijadikan sebagai tempat pembinaan Alquran. Sebab kalau bukan kita siapa lagi. Saya berharap dengan momentum pelantikan pengurus JQH di tempat ini menjadikan tempat ini berkah, utamanya buat anak-anak kita,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini berharap, JQH Gresik berkembang sebagai organisasi unggulan dalam menjalankan misi menjaga kelestarian Alquran. “Sebab apapun yang bersentuhan dengan Alquran itu menjadi mulia. Tempat yang paling mulia adalah Makkah dan Madinah. Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, dan Malaikat yang paling mulia adalah Malaikat Jibril. Malam yang paling mulia adalah malam lailatul qadar,” urainya. □



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**

Ketua MPR RI

## Memperkuat Aspek Ketatanegaraan dan Urgensi Utusan Golongan di MPR

**K**ETERWAKILAN dan partisipasi semua elemen rakyat dalam mekanisme dan proses permusyawaratan pada lembaga tertinggi negara adalah keniscayaan, berpijak pada fakta kodrat kebhinnekaan negara-bangsa. Karena kodrat kebhinnekaan itulah, Utusan Golongan pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun menjadi keniscayaan pula. Utusan Golongan dalam struktur MPR menjadi perekat kesatuan dan persatuan yang menjaga dan merawat eksistensi NKRI.

Ketika negara-bangsa dewasa ini terus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman ideologi yang coba menggoyahkan fondasi keutuhan NKRI dan Pancasila, gagasan atau pemikiran tentang urgensi penguatan aspek ketatanegaraan menjadi sangat jelas relevansinya. Bahkan, jika mengacu pada tantangan dan ancaman era terkini, agenda penguatan aspek ketatanegaraan yang dirasakan cukup mendesak adalah mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan menghadirkan lagi unsur Utusan Golongan di dalamnya.

Sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah UUD Negara 1945, mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden sangat relevan jika MPR kembali diberi amanat melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya seturut UUD 1945. Dan, atas nama kedaulatan rakyat pula, MPR pun kembali berwenang menerbitkan Ketetapan (Tap) MPR yang mengikat (regeling). Terutama kebutuhan akan Tap MPR untuk merespons dan menangani krisis politik atau krisis konstitusi. Kebutuhan akan Tap MPR yang solutif dan efektif, dengan demikian memenuhi hierarki perundang-undangan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; yakni UUD, Ketetapan MPR, Undang Undang, Perpu Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah (Perda).

Unsur Utusan Golongan di MPR tak hanya merefleksikan kebhinnekaan negara-bangsa, tetapi dia juga sekaligus menjadi penjelasan kepada rakyat tentang terserapnya aspirasi semua golongan dan terpenuhinya kesepakatan semua elemen bangsa yang berdaulat atas setiap Tap MPR yang mengikat itu. Artinya, setiap Tap MPR yang diterbitkan dan berlaku mengikat itu tidak dilandasi kepentingan kelompok, golongan atau kekuatan politik tertentu, melainkan semata-mata untuk dan atas nama kemaslahatan bangsa; terjaganya persatuan dan kesatuan, kokohnya NKRI dan tangguhnya ketahanan nasional. Dengan begitu, unsur Utusan Golongan sejatinya memberi bobot tambahan pada aspek ketahanan nasional.

Ragam tantangan negara-bangsa dewasa ini sudah menjadi fakta tak terbantahkan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Termasuk tentu saja tantangan dan ancaman terhadap ideologi bangsa, yang selalu saja berpotensi mengganggu ketahanan nasional, menggoyahkan keutuhan NKRI, serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika sekelompok warga negara menolak falsafah Pancasila serta menolak menghormati bendera Merah-Putih, itu adalah wujud ancaman ideologi yang dibangun melalui proses panjang indoktrinasi pemikiran. Dibawa dari luar, indoktrinasi pemikiran seperti itu kemudian disosialisasikan dengan gencar dan berkesinambungan di berbagai forum pertemuan kelompok-kelompok warga.

Mereka yang menelan mentah-mentah indoktrinasi itu lalu membangun kekuatan untuk melawan negara-bangsanya sendiri. Indonesia masih dan sedang mengalami kecenderungan itu. Salah satu indikatornya adalah fakta tentang aktivitas aparaturnya negara memerangi kelompok kekuatan bersenjata dan penangkapan terhadap para terduga teroris.

Selain itu, keberhasilan indoktrinasi ideologi asing

itu pun telah ikut mengubah cara pandang dan perilaku sebagian masyarakat. Hari-hari ini, misalnya, generasi kakek-nenek dan sebagian generasi orang tua melihat dan merasakan bahwa tatanan sosial dalam masyarakat telah berubah dengan cukup ekstrim, karena tidak lagi berpijak pada norma-norma kultural atau budaya serta kearifan lokal di setiap daerah. Perbedaan, yang di masa lalu merefleksikan keindahan, kekuatan dan kekayaan, sekarang justru sering dijadikan sumber masalah yang menyulut maraknya ujaran kebencian.

Sebagaimana dipahami dan sering dilihat bersama, mayoritas golongan dalam masyarakat Indonesia sudah lama terusik dengan ancaman radikalisme yang sudah berhasil menyusup ke dalam birokrasi negara. Muncul juga kekecewaan mendalam melihat kuatnya kecenderungan menyerap budaya asing yang bertujuan mengeliminasi budaya dan kearifan lokal. Mayoritas golongan dalam masyarakat pun tidak nyaman dengan menguatnya politik identitas yang nyata-nyata telah mencabik-cabik budaya rukun.

Ragam tantangan dan ancaman itu, termasuk korupsi yang semakin merajalela, berpotensi menjadi benih bagi tumbuhnya krisis politik dan krisis konstitusi di kemudian hari. Patut disyukuri, karena hingga saat ini mayoritas golongan dalam masyarakat masih bijak, dan mau memberi toleransi atas ragam ancaman yang berpotensi melemahkan fondasi keutuhan NKRI itu. Masyarakat pun tetap bersabar setiap kali menyimak berita tentang maraknya korupsi. Sesekali mengungkap kejengkelan, masyarakat hanya bisa menyuarakan ancaman tidak akan bayar pajak lagi. Namun, siapa yang bisa mengukur atau menghitung durasi kesabaran masyarakat itu?

Untuk memampukan negara-bangsa mengantisipasi potensi krisis itulah diperlukan penguatan pada aspek ketatanegaraan, dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta menghadirkan kembali unsur Utusan Golongan di dalamnya. Menghadirkan kembali Utusan Golongan yang Merah-Putih dan Pancasila di MPR memang patut dikaitkan dengan tantangan negara-bangsa, kini dan di masa depan. Sebab, pada akhirnya akan diperlukan kesepakatan semua elemen rakyat pada unsur Utusan Golongan untuk merespons tantangan dan ancaman itu, yang kesepakatannya kemudian dituangkan dalam Tap MPR.

Utusan Golongan di MPR dihapus melalui amandemen UUD 1945.

Ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi penghapusan Utusan Golongan. Pertama, pandangan bahwa pelaksanaan demokrasi langsung yang dimanifestasikan dalam pemilihan secara langsung dinilai lebih demokratis, sehingga Utusan Golongan melalui penunjukan dianggap tidak sesuai.

Kedua, pandangan perlunya penyederhanaan sistem perwakilan, yakni hanya ada satu badan perwakilan tingkat pusat yang mewakili dua unsur representasi, yaitu representasi politik (DPR) dan representasi daerah (DPD), sedangkan representasi golongan dapat diwakili dan disalurkan melalui lembaga perwakilan yang sudah ada, khususnya DPD. Ketiga, dalam praktiknya, penunjukan Utusan Golongan oleh presiden dinilai cenderung mewakili kepentingan pemerintah yang mengangkatnya, dan bukan kepentingan rakyat atau golongan yang diwakilinya.

Tentu saja tiga pertimbangan itu bisa diterima. Namun, zaman berubah dan tantangan negara-bangsa pun berubah. Ketika Utusan Golongan dihapus dari MPR, Indonesia belum menghadapi fakta persoalan tentang radikalisme dan rongrongan terhadap Pancasila dan terhadap keutuhan NKRI. Semuanya waktu itu hanyut dalam euphoria demokrasi. Namun, hari-hari ini, ancaman ideologi itu nyata, dan setiap saat bisa menjerumuskan negara-bangsa ke situasi krisis.

Dalam konteks Indonesia, praktik kehidupan demokrasi dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yang mengamanatkan penegakan kedaulatan rakyat serta melembagakannya dalam mekanisme permusyawaratan/perwakilan. Mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan idealnya dimanifestasikan melalui beberapa jalur representasi. Misalnya, melalui representasi politik yang sudah terwadahi dalam DPR RI, representasi kedaerahan yang sudah terwadahi dalam DPD RI, serta representasi golongan atau kelompok fungsional yang bisa terwadahi dalam Utusan Golongan.

Jangan lupa bahwa eksistensi Utusan Golongan dalam lembaga perwakilan sejatinya merupakan amanat yang diwariskan sejak cita-cita awal kemerdekaan, demi mengakomodasi karakteristik rakyat Indonesia yang sangat plural dan heterogen. Bahkan, dalam konteks kekinian, eksistensi Utusan Golongan dapat dipandang sebagai ikhtiar memenuhi keadilan peran politik secara menyeluruh, sekaligus menjadi penyeimbang peran dari keterwakilan politik yang dipegang DPR dan keterwakilan daerah di tangan DPD. □

## Strategi Menghadapi Israel

Batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 disebut merugikan Indonesia. Persiapan yang sudah dilakukan sejak lama, tiba-tiba hilang. Pembatalan ini disebabkan karena secara resmi Provinsi Bali menolak kehadiran Timnas Israel. Sikap yang demikian sebagai wujud solidaritas kepada bangsa Palestina. Lalu, bagaimana seharusnya bangsa ini menghadapi masalah-masalah yang pelik, yakni kemungkinan hadirnya Israel dalam berbagai event dunia di Indonesia? Berikut pendapat para wakil rakyat yang membidangi masalah itu.

**Arya Wedakarna**, Anggota MPR dari Kelompok DPD

### Jangan Gunakan Standar Ganda

**K**ITA haru belajar dari dampak yang ditimbulkan pada saat Bali gagal menjadi tuan rumah *drawing* dan tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20, karena penolakan secara resmi yang disampaikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang menyatakan, Bali menolak kedatangan Timnas Israel. Mungkin pada awalnya, surat penolakan itu hanya ditujukan kepada Israel dengan alasan solidaritas kepada Palestina, merupakan sikap yang sudah ditegaskan sejak dahulu oleh Presiden Soekarno. Tetapi yang tidak disangka adalah bahwa penolakan tersebut rupanya membawa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pastinya hal demikian merugikan. Walaupun antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, namun kita tentu harus bisa membedakan mana hubungan internasional secara politik dan hubungan internasional secara olahraga.

Sikap penolakan Gubernur Bali yang menolak Piala Dunia U-20 dan ANOC World Beach Games (AWBG) 2023, bila sampai mengakibatkan pembatalan tempat penyelenggaraan tentu kita telah kalah, rugi dua kali. Rugi di Piala Dunia U-20 dan AWBG 2023. Hal demikian pasti membuat Bali rugi walaupun mungkin bagi sebagian kalangan yang ada di Indonesia sikap itu merupakan menguntungkan secara politik yang selama ini memang anti Israel.

Tetapi bagi sebagian orang Indonesia lainnya ini juga dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, karena jaringan negara Israel cukup kuat, besar, dan luas. Citra Pulau



FOTO-FOTO: ISTMENWA

Bali yang selama ini dianggap netral sangat dirugikan dengan penolakan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 maupun Kontingen Israel dalam AWBG 2023.

Seharusnya kita bisa mendudukan masalah, mana yang masuk dalam urusan politik dan mana yang masuk urusan olahraga. Karena kita ketahui juga bahwa ketika Indonesia mengikuti olimpiade, misalnya, dan pertandingan-pertandingan internasional lainnya, Indonesia bisa kemungkinan juga akan menghadapi tim dari Israel. Apakah suatu saat ketika Indonesia dalam salah satu cabang olahraga bertemu dalam final dengan Israel, kita memboikot atau mundur dari pertandingan tersebut? Ini harus diselesaikan segera mungkin karena harus

ada kejelasan.

Menurut saya, kalau Indonesia tidak berkenan dengan Israel, Indonesia tidak boleh menerapkan standar ganda. Dalam artian, misalnya saat ada pertemuan parlemen dunia yang digelar 2022 di Nusa Dua, Bali, kita ketahui bahwa bendera Israel berkibar-kibar di lokasi acara, bahkan delegasinya secara resmi disambut dengan gegap gempita sejajar dengan negara-negara lain.

Nah, kita jangan menggunakan standar ganda. Jika Indonesia memang konsisten menolak Israel maka Indonesia harus siap menerima dampaknya, dikucilkan dunia internasional. □

AWG

**Hetifah Sjaifudian**, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar

## Jadikan Sebagai Pelajaran Penting

**P**EMBATALAN Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 harus menjadi pelajaran yang berharga. Bangsa ini sebetulnya sudah

berjuang selama 3 tahun lebih agar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Hal demikian bukan satu proses yang mudah. Kita ingin menjadi tuan rumah sebagai satu kesempatan untuk bisa tampil di tingkat dunia.

Untuk menjadi tuan rumah, Presiden bahkan turun langsung dan bila terpilih, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ternilai dan mungkin akan sangat sulit mengulangi lagi keberuntungan seperti itu. Ketika akhirnya dibatalkan tentu saja sangat amat menyesalkan.

Yang kita sesalkan adalah sejak awal kita sudah menawarkan diri untuk ikut 'bidding' (mengajukan diri sebagai tuan rumah) tentu kita sudah harus memperhitungkan dengan cermat segala kemungkinannya. Pasti ada saja possibility Israel dalam prakualifikasi masuk sebagai tim yang lolos ke putaran final piala dunia.

Sebenarnya, kalau ingin memberikan dukungan pada perjuangan rakyat Palestina, apakah harus dengan mundur dari komitmen, karena itu adalah sesuatu yang sangat merugikan diri kita sendiri. Timnas kita sendiri yang mendapat sanksi, jadi sebetulnya kita tidak mendapat apa-apa, itu yang paling menyesalkan.

Sebetulnya ini adalah suatu kesalahan. Kalau sebagai satu bangsa antara kesempatan yang ada dan manfaat yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bisa kita raih dengan mudharatnya apabila Timnas Israel hadir ke sini, sebetulnya sangat jauh. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Paling penting bila membicarakan masalah ini, ya kita jadikan pelajaran. Ke depan berusaha meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi akibat dari keputusan-keputusan yang tidak kita inginkan.

Kalau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak menginginkan Tim Israel, saya kira itu juga perlu kita kaji

lagi karena saya yakin masyarakat Indonesia mendambakan event Piala Dunia U-20.

Pengalaman dari beberapa negara, saya lihat di ajang-ajang itu mereka menggunakan berbagai event olahraga internasional untuk menunjukkan simpati dan dukungan mereka kepada rakyat Palestina. Harusnya kita bisa di dalam event itu justru, misalnya, meneriakkan dukungan kita atau membawa 'banner', bendera-bendera, dan sebagainya untuk memberikan dukungan moral kepada rakyat Palestina. □

AWG

**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**PANCASILA**



**Buku Digital MPR RI**  
SETJEN MPR RI



## Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Masjid Hibah Putra Mahkota

Kedekatan Joko Widodo dan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan berbuah manis. Putera Mahkota UEA itu memberi hibah sebuah masjid yang megah. Masjid yang dibangun merupakan replika dari Grand Mosque Sheikh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Kemegahan Masjid Sheikh Zayed Solo menjadi ikon baru kota batik itu. Akan menjadi wisata religi baru yang ramai.



**B**ADU hari itu sedang berada di Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Dia ditugaskan oleh kantornya untuk melakukan liputan di kota yang penuh sejarah itu. Badu sebenarnya, sudah beberapa kali mengunjungi Kota Solo. Hampir semua obyek wisata di Kota Bengawan itu pernah dikunjunginya. Seperti Keraton Surakarta, Alun-Alun Kidul, Pasar Klewer, Jl. Slamet Riyadi, serta tempat yang lainnya.

Di tengah rasa galau mencari sesuatu yang baru, Badu baru ingat bahwa di kota batik itu telah berdiri masjid baru nan megah, bernama: Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Masjid yang baru itu viral di media sosial dan menjadi banyak pembicaraan orang. Tanpa pikir panjang, handphone yang dipegang mengarah pada aplikasi ojek online. Dengan cekatan tangannya memecet tombol-tombol yang mengarahkan ojek online ke Masjid Sheikh Zayed.

Tak lama menunggu, driver ojek online datang. Badu diboncengnya menuju lokasi yang hendak dituju. Setelah melewati jalan-jalan besar di kota itu, sempat pula menyaksikan Stadion Manahan (stadion terbesar di Jawa Tengah), dan tak lama kemudian ojek online itu merapat di lokasi masjid yang dituju, yang lokasinya tak jauh dari Terminal Tirtonadi. Terminal bus terbesar di Solo dan merupakan penghubung kota-kota besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dari terminal ini setiap hari ada puluhan trayek bus Surabaya – Solo – Yogyakarta.

Setelah berdiri di dekat pagar pembatas masjid, Badu tampak takjub menyaksikan kemegahan bangunan Masjid Sheikh Zayed. Kubahnya besar dan menara yang menjulang menjadi ciri dari masjid itu. Ketika berada di samping pagar dia melihat spanduk yang berisi pengumuman bahwa masjid belum dibuka untuk umum. Kecewa? Pasti, namun Badu tetap senang sebab dari trotoar yang berada di samping pagar dia masih bisa mengabadikan diri dengan landscape atau background masjid yang megah.

Badu bisa jadi merupakan salah satu orang yang 'kecelek' atau tak sesuai harapan ketika berkunjung ke sana. Banyak orang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang bahkan datang dari jauh-jauh ke sana, namun saat sudah berada di sana, masjid belum dibuka untuk umum.

Harapan orang agar masjid segera dibuka supaya bisa beribadah dan melihat bangunan dalam yang tak kalah megahnya, terkabul. Pada Selasa, 28 Februari 2023,

masjid itu secara resmi dibuka untuk umum, Maklumat tentang pembukaan masjid itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Hidayat Masykur.

Dibukanya masjid tersebut tentu akan memancing orang lebih banyak untuk







berkunjung. Pastinya yang datang ke sana tidak hanya orang Solo, namun masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka ke sana lebih banyak yang rombongan karena bisa jadi satu paket wisata di Solo dan Yogyakarta.

Sebagai tempat yang dibangun dengan biaya tidak murah serta menjaga kesucian masjid maka bila berkunjung ke sana ada aturan-aturan yang mesti ditaati. Nah, inilah aturan yang mesti dipatuhi bila orang ingin

masuk ke dalam: ***pengunjung diharapkan memakai pakaian sopan dan menutup aurat, wanita yang tidak berhijab harus memakai tudung untuk menutup aurat, masyarakat dari agama lain diperbolehkan datang ke sana dengan catatan pengunjung juga harus menutup aurat, pastikan kaki sudah kering sebelum masuk masjid, dilarang membuka jendela masjid karena suhu sudah diatur oleh takmir,***



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

***jangan mencorat-coret area masjid, tidak boleh menginjak tanaman atau rumput di area masjid karena merupakan tumbuhan tumbuh, dilarang membawa tikar, dilarang bermain di kolam yang berada di lokasi masjid, dilarang beresik agar tidak mengganggu kegiatan ibadah, dilarang merokok, makan, dan minum di area masjid, dan dilarang tidur di masjid.***

Aturan tersebut juga menjadi pesan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Dalam [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), 1 Maret 2023, dirinya meminta masyarakat ikut menjaga. Dikatakan, yang diperlukan adalah menjaga kebersihan. "Pokoknya tidak boleh nyampah di sana", ujarnya.

Dalam website itu diungkap, Ganjar menceritakan kisah bagaimana saat masjid itu dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurutnya, banyak masyarakat yang ingin hadir namun kapasitas untuk acara pembukaan dibatasi. "Saat Wapres membuka ternyata banyak masyarakat yang ingin ikut hadir, tapi kapasitasnya dibatasi", ujarnya sebagaimana termuat dalam website milik pemerintah daerah itu.

Mengapa masjid itu mendapat perhatian dari Presiden hingga masyarakat luas? Begini ceritanya. Terjalinlah hubungan kedua negara antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Hubungan kedua negara semakin erat, apalagi di masa Presiden Joko Widodo. Entah karena lobi pemerintah maka negara kaya minyak itu memberi hibah kepada Indonesia berupa masjid.

Dalam [kompas.com](http://kompas.com), 28 Februari 2023, diberitakan Masjid Sheikh Zayed Solo merupakan hibah Putera Mahkota UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk Presiden Jokowi.

Meski memberi hibah berupa masjid, namun masjid yang hendak dibangun bentuknya sama dengan masjid kebanggaan UEA, yakni Masjid Agung (Grand Mosque) Sheikh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Ciri utama masjid ini adalah memiliki 82 kubah dan empat menara yang tingginya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mencapai 106 meter. Semua material pembangunan masjid itu dibuat dari unsur-unsur terbaik, bahkan emas.

Dari catatan yang ada, pembangunan masjid ini dilakukan oleh Presiden I UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, tahun 1996. Dalam perjalanan waktu, Sheikh Zayed Al Nahyan meninggal dunia tahun pada 2004. Selanjutnya, pembangunan diteruskan oleh anaknya, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Masjid yang ada di Abu Dhabi tersebut sangat populer dan sering menjadi tujuan wisata bagi orang-orang saat berada di

UEA. Di antara wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat itu adalah Jennie, salah satu personal K-Pop, Black Pink, yang sangat kesohor itu.

Tempat yang dipilih dari hibah yang diberikan oleh Putra Mahkota UEA adalah di Solo. Solo merupakan kota kelahiran dari Joko Widodo. Maka pada 6 Maret 2021 dimulailah pembangunan masjid. Lokasi yang dipilih di Solo adalah di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, tak jauh dari Terminal Tirtonadi. Luas bangunan utama masjid 8.000 meter. Bangunan yang seluas itu mampu menampung 10.000 jamaah. Sedang

total area lahan mencapai 3 hektare.

Dari sumber yang ada, di masjid itu juga dibangun banyak fasilitas penunjang, seperti Islamic Center yang dapat menjadi pusat pendidikan agama Islam. Di sana akan ada Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), ruang tafsir Al Quran, sekolah Pendidikan Islam, dan sarana pengembangan ekonomi syariah.

Sebelum dibangun untuk masjid, tempat itu merupakan Depo Pertamina. Karena untuk keperluan pembangunan masjid, Depo dipindah ke Boyolali.

Biaya untuk membangun Replika Grand Mosque Sheikh Zayed yang di Solo sebesar Rp 300 Miliar. Sebab, masjid yang dibangun dengan biaya yang tinggi maka Sheikh Zayed Solo diharapkan juga berfungsi untuk pusat dakwah, sosial, dan pembinaan umat.

Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Al Mazroui, dalam *kompas.com*, 14 November 2022, mengatakan, masjid di Solo itu memiliki rancangan arsitektur yang istimewa. Untuk itu, Sheikh Zayed Solo diharap bisa menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Indonesia.

Hadirnya Sheikh Zayed Solo menambah tujuan wisata di kota itu. Dalam *kompas.com* diberitakan, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Dr. H. Adib mengatakan, Sheikh Zayed Solo akan menjadi ikon baru Surakarta.

Setelah dilakukan proses pembangunan selama 1 tahun, 8 bulan, maka pada 14 November 2022 Masjid Sheikh Zayed Solo diresmikan. Sebagai penyandang dana, Presiden UEA Mohamed Bin Zayed Al Nahyan hadir di Solo. Dalam *setkab.go.id*, 14 November 2022, diceritakan Presiden Joko Widodo menyambut langsung kedatangan Presiden Zayed Al Nahyan di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo. Dari bandar udara yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, itu selanjutnya Joko Widodo dan Zayed Al Nahyan menuju Sheikh Zayed.

Tiba di Sheikh Zayed, Joko Widodo dan Zayed Al Nahyan melaksanakan salat sunah tahiyatul masjid. Selepas salat sunah, kedua presiden itu melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian masjid.





Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon Sala di halaman masjid serta foto bersama. Setelah itu, keduanya meninggalkan area masjid secara bersamaan.

Di [setkab.go.id](http://setkab.go.id), disebut pejabat yang hadir dalam acara itu Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Di [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id), 13 Januari 2023, disebut Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, berharap, masjid hibah dari Zayed

Al Nahyan Presiden UEA itu dapat menjadi tempat pengembangan dunia keislaman di Indonesia, bahkan dunia. "Ini Masjid yang sangat indah. Saya berharap masjid ini mampu memberikan kontribusi bagi umat dalam pengembangan keislaman yang rahmatan lil alamin," ujarnya dalam website itu.

Dirinya juga berharap masjid yang ada mampu membantu meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Solo dengan kegiatan-kegiatan produktif ke depannya.

Dalam website yang sama, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menambahkan, Sheikh Zayed Solo diproyeksikan menjadi

contoh tata kelola masjid yang profesional bagi masjid-masjid lain di seluruh Indonesia. "Hadirnya Syeikh Zayed Solo diharapkan menjadi prototipe masjid yang dikelola secara profesional, baik *idarah* (manajemen), *imarah* (memakmurkan), dan *riayah*-nya (pemeliharaan)," ujarnya.

Lebih lanjut disebut masjid merupakan ruang kontestasi dan diseminasi informasi yang paling dipercaya publik. Merujuk pada fungsi masjid dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah dan pendidikan agama, konsultasi, dan komunikasi masalah ekonomi dan kewirausahaan di masjid. □

AWGI dari berbagai sumber

## Al Jabbar Masih Kebanggaan Warga Jawa Barat

Tak mau kalah dengan provinsi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun masjid raya. Masjid yang dinamakan Al Jabbar itu dirancang oleh Ridwan Kamil. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya bangunan masjid di Turki dan budaya Jawa Barat. Masyarakat antusias ke sana, sebab mereka rindu ruang publik yang mudah dijangkau dan murah.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**B**ILA kita berkunjung ke ibu kota provinsi-provinsi di Indonesia, di sana menemukan masjid-masjid besar yang menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah itu. Masjid yang ada menjadi *landmark* hingga akhirnya bila ada

orang berkunjung ke ibu kota provinsi itu, ia akan melakukan wisata religi di sana.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Masjid Raya Al Jabbar dibangun. Dalam [aljabbar.jabarprov.go.id](http://aljabbar.jabarprov.go.id) disebut ada beberapa alasan mengapa masjid

kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu dibangun. *Pertama*, Jawa Barat sebagai sebuah provinsi belum memiliki masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi. *Kedua*, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

terbanyak di Indonesia. *Ketiga*, Jawa Barat juga memerlukan masjid besar yang dapat membanggakan warganya.

Berangkat dari sinilah maka pada 29 Desember 2017 dilakukan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Desain dari masjid itu, dua tahun sebelumnya atau tepatnya tahun 2015 sudah didesain oleh Ridwan Kamil.

Masjid yang ada dibangun di kawasan Gedebage. Menurut *Wikipedia*, Gedebage di masa lalu merupakan hamparan rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung Purba. Akhir Abad XIX, rawa-rawa yang ada mengering dan dijadikan area persawahan

oleh penduduk. Keringnya rawa-rawa juga membuat perusahaan kereta pemerintah Hindia - Belanda, *Staatsspoorwegen*, membangun jalur kereta yang menghubungkan Gedebage dan Cicalengka.

Dalam perjalanan waktu, Gedebage menjadi kecamatan, setelah ada pemekaran Kota Bandung, muncul Kabupaten Bandung. Ini terjadi pada tahun 2006. Menjadi kecamatan menjadikan Kawasan itu dari waktu ke waktu semakin ramai dan padat.

Bisa jadi untuk menunjukkan pada masa lalu Gedebage merupakan rawa-rawa maka masjid yang ada dibangun di atas kolam yang luas sehingga masjid itu juga populer disebut sebagai *Masjid Terapung Gedebage*.

Dalam mendesain atau merancang masjid,

Ridwan Kamil memadukan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Lebih lanjut dalam *aljabbar.jabarprov.go.id* disebutkan, bangunan utama masjid tidak memisahkan dinding, atap, dan kubah, melainkan hasil peleburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa.

Ketiga sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar yang ibarat cermin merefleksikan masjid menjadi berbentuk bulat utuh. Pada malam hari, kerlip tata cahaya menambah keindahan masjid. Selain keindahan, danau memiliki fungsi penting lain; sebagai retensi banjir sekaligus penyimpanan air.

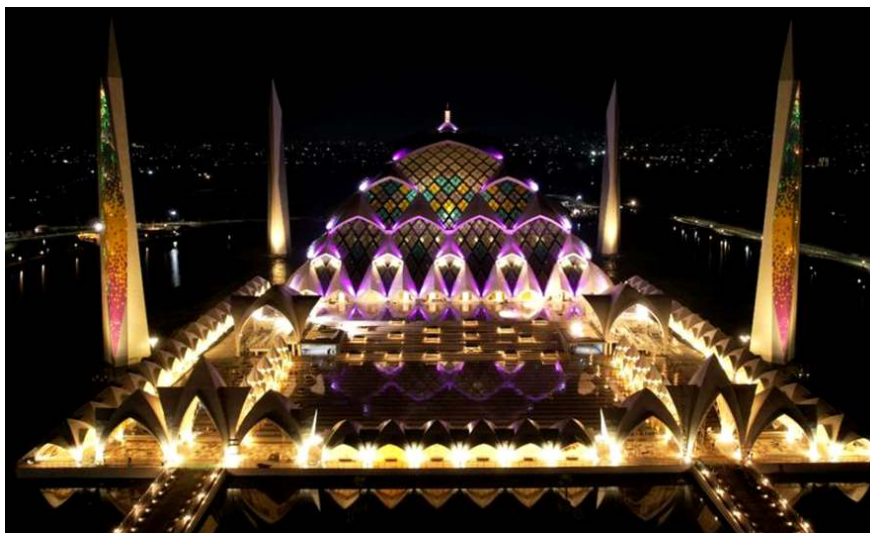
Dalam *website* yang ada, dikatakan luas dan tingginya lantai salat dihiasi 27 relung terbuat dari relief tembaga yang ditempa dengan halus oleh tangan-tangan terampil para perajin yang sangat tekun. Relief berupa motif batik ini mewakili tiap kota dan kabupaten yang sekaligus mengekspresikan kekayaan seni masyarakat Jawa Barat.

Lantai di bawah mezanin diterangi lampu kuningan karya perajin Gentur, Cianjur, dengan warna keemasannya yang mampu memberi rasa mewah. Di bagian dinding sisi barat, terdapat mihrab yang terhubung hingga mahkota di pucuk langit-langit yang melambangkan bahwa hanya kepada Allah SWT kita meminta.

Keistimewaan lainnya ada pada lantai dasar atau ma'rodh yang berisi museum sejarah Rasulullah SAW, sejarah perkembangan Islam di tanah air, dan sejarah Islam di Jawa Barat. Hal ini menjadikan Al Jabbar sebagai satu-satunya masjid di Indonesia yang memiliki pusat edukasi, berupa museum dengan penggunaan teknologi digital terkini.

Saat ini masjid tidak hanya sekadar tempat menunaikan salat. Pun demikian Al Jabbar. Di masjid seluas 26 hektar ini, menurut *website* resmi masjid itu, juga terdapat taman-taman tematik tentang kenabian yang menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan.

Disebutkan, di sisi timur masjid berdiri sebuah patung kaligrafi "Al Jabbar"





berwarna emas karya seniman terkemuka. Patung ini berdiri di atas plaza bundar yang permukaannya dilapisi teraso buatan tangan dengan motif wadatan berwarna biru dan kuning cerah yang memberikan kesan elegan.

Kemudian, di sisi timur ini juga terdapat beberapa aksentuasi khas masjid Turki, yaitu pelataran besar dikelilingi koridor dengan naungan dihiasi kaca patri warna-warni, serta paviliun wudu dengan keran air bertempat duduk yang berhiaskan mozaik cantik karya tangan perajin Jawa Barat.

Pembangunan masjid itu disebut telah membuka lapangan kerja yang tidak hanya melibatkan ribuan tukang bangunan berpengalaman, tetapi juga ratusan tangan-tangan terampil perajin lokal yang telah memperindah Al Jabbar.

Harapan dari pembangunan Al Jabbar dalam [aljabbar.jabarprov.go.id](http://aljabbar.jabarprov.go.id) adalah pada masa mendatang, semua yang sudah terbangun di Al Jabbar; seperti museum, danau, plaza, dan taman-taman, akan

membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi Jawa Barat.

Kedua fungsi terakhir ini terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar dan menikmati wisata religi. Selain itu, fungsi-fungsi ini pun diharapkan dapat berdampak positif untuk mendorong ekonomi masyarakat lokal serta memakmurkan Al Jabbar.

Setelah melalui proses yang panjang dari pembangunan masjid itu, bahkan pernah terhenti karena pandemic Covid-19, akhirnya pada 30 Desember 2022, Al Jabbar secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Setelah dibuka untuk umum, masjid itu langsung diserbu ribuan orang. Mereka datang dari berbagai tempat, tidak hanya masyarakat Bandung dan Jawa Barat namun mereka dari luar Pulau Jawa juga berduyunduyun ke sana dengan berbagai macam tujuan, ada yang ingin sekadar melihat dan

menikmati megahnya bangunan hingga berwisata religi.

Membludaknya orang pergi ke Al Jabbar, menurut Sosiolog Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dr Agus Ahmad Safei, disebabkan oleh beberapa hal. Dalam [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com), 14 Februari 2023, disebutkan: *pertama*, viral di media sosial. "Media sosial menunjukkan kekuatannya yang luar biasa memublikasikan berbagai hal mengenai Al Jabbar", ujarnya. *Kedua*, masyarakat merindukan kehadiran ruang publik. "Fenomena membludaknya warga ke Al Jabbar menunjukkan rasa rindu masyarakat yang luar biasa terhadap ketersediaan ruang ruang publik yang dapat diakses warga secara mudah dan murah", ungkapnya. *Ketiga*, masyarakat hobi berkumpul dan berbagi kebahagiaan. "Al Jabbar menyediakan tempat kumpul-kumpul yang layak dan berkelas," sebut Agus Ahmad seperti yang tertuang dalam website media di atas. □

AWGI/dari berbagai sumber

## Masjid Unik di Tepi Losari

Kota Makassar tak mau kalah dengan kota lain dalam urusan membangun masjid. Satu masjid yang dibangun di tepi Pantai Losari mampu mengubah Makassar menjadi lebih religi. Masjid yang ada memiliki 99 kubah, sebagai gambaran 99 asma Allah. Sekarang masjid itu menjadi ikon Makassar. Salah satu masjid terunik di Indonesia.

**B**ILA jalan-jalan ke Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekarang di sana kita tidak hanya melihat keindahan pantai, menyaksikan berbagai desain seni, naik kapal Phinisi, berkunjung ke Benteng Port Rotterdam, menikmati berbagai macam kuliner namun juga bisa melihat Masjid 99 Kubah atau juga disebut Masjid *Asmaul Husna*.

Masjid 99 Kubah berdiri di kawasan reklamasi, *Center Point Of Indonesia* (CPI), Tanjung Bunga. Karena berada di kawasan penambahan daratan maka masjid itu berada di seberang Pantai Losari. Dari *waterfront* pantai inilah masyarakat bisa melihat kemegahan masjid yang dirancang oleh Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sekaligus seorang arsitektur.

Saat ini, Masjid 99 Kubah menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

Masjid ini bisa dikatakan satu-satunya masjid yang desainnya sangat unik dan belum ada masjid yang bentuknya serupa. Ia memiliki



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

99 kubah. Kubah sebanyak itu diambil dari 99 asma Allah, *Asmaul Husna*.

Dalam *kompas.com*, 23/04/2022, disebutkan, masjid tersebut memiliki bangunan seluas 72 x 45 meter persegi. Bangunan yang ada terbagi menjadi tiga ruang atau area, yakni ruang sholat yang mampu menampung sebanyak 3.880 jamaah. Ruang mezanine yang juga digunakan untuk jamaah yang mencapai 1.005, dan pelataran suci yang dapat menampung 8.190 jamaah. *Osc.medcom.id*, 6 Mei 2022 menyebut dengan luas yang besar, Masjid 99 Kubah tidak membutuhkan pendingin udara, sebab memiliki konsep ruang terbuka dan sirkulasi udara yang baik.

*Wikipedia* menyebutkan, konsep desain

masjid ini klasik modern, futuristik, dan juga bentuknya unik dengan mengusung tema *Asmaul Husna*. Ridwan Kamil bekerja sama dengan arsitek lokal bernama Muhammad Mursif untuk membuat sebuah bangunan. Arsitek setempat juga bertemu langsung dengan Ridwan Kamil sebelum masjid tersebut akhirnya dibangun dengan desain yang disepakati bersama dan menggunakan 99 kubah dalam bangunannya, berbeda dengan masjid-masjid yang biasa dijumpai.

Untuk membangun masjid diperlukan beberapa tahap waktu. Dimulai pada tahun 2017 yang disebut Tahap I. Dilanjutkan tahun 2018 yang disebut dengan Tahap II hingga selesai pada tahun 2022. Dana yang digunakan untuk membangun masjid itu

mencapai Rp185 miliar. *Wikipedia* mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk membangun masjid berkubah 99 ini juga tidak sedikit mengingat detailnya terbilang rumit.

Di *ramadan.tempo.co*, 14 April 2022, disebutkam beberapa keunikan dari masjid tersebut. Keunikan itu adalah: *Pertama*, Masjid 99 Kubah memang memiliki 99 kubah diambil dari Asmaul Husna. Masjid ini di dominasi warna-warna terang, berupa kuning, jingga, coklat, putih dan merah. *Kedua*, tidak memiliki pendingin ruangan, namun dengan sirkulasi udara yang baik. *Ketiga*, menjadi ikon baru Sulawesi Selatan. Saat *sunrise*, Masjid 99 Kubah terlihat sangat indah.

*Keempat*, dapat menampung jamaah dalam jumlah yang banyak. Bagian luar pelataran dapat digunakan sebagai tempat menikmati sunset dan melihat-lihat pemandangan. *Kelima*, memiliki atraksi air mancur. Pada 2018 Gubernur Sulawesi Selatan meresmikan air mancur menari Masjid 99 Kubah. Air mancur ini akan muncul selama 30 menit usai salat Magrib dan menjelang Isya. Ada tujuh macam warna dan bisa berubah-ubah sesuai musik yang diputar. Air mancur ini bisa mengucur setinggi 17 meter, sehingga membuat air mancur masjid ini jadi air mancur terpanjang kedua setelah air mancur Sri Baduga Purwakarta, dan jadi air mancur terbesar di luar pulau Jawa. □

AWGI dari berbagai sumber



**Zafira Naja Sakina,**

Ketua Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia

## FMKI Berusaha Berbenah Menjadi Teladan

**S**EBAGAI forum gabungan mahasiswa sekolah kedinasan di Indonesia, kami sangat prihatin dengan berbagai fenomena kekerasan yang terjadi, dan mengakibatkan jatuh korban di lingkup sekolah kedinasan.

Hal ini semestinya tidak boleh terjadi dan kami sangat menyesalkan hal itu. Itulah mengapa kami bergabung dan berupaya melakukan berbagai upaya agar kekerasan tidak terjadi lagi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kami berharap, dukungan berbagai elemen bangsa, seperti MPR, agar upaya kami itu berhasil dan kami bisa menjadi teladan buat mahasiswa lainnya.

Sebagai komunitas generasi muda, FMKI sangat mengapresiasi Sosialisasi Empat Pilar yang gencar yang dilakukan MPR RI hampir di seluruh Indonesia, terutama kepada kaum milenials.

Untuk itu, kami ingin sekali memberikan kontribusi kami kepada gerakan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Untuk itu, kami mohon kerjasama dan binaan MPR terkait pemahaman Empat Pilar kepada kami di FMKI. □

DER



**Ibu Zainab,**

Warga Desa Limba U1 Gorontalo

## “Saya Hanya Orang Biasa, Tapi Saya Ingin Memahami Pancasila”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**AYA cuma ibu rumahan biasa saja, yang kerjanya hanya di dapur, jadi tidak begitu paham masalah kenegaraan. Tapi, saya diajak untuk mengikuti acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dibawakan oleh Bapak Fadel Muhammad.

Beliau dengan istrinya sangat bagus membawakan soal Empat Pilar itu yang didalamnya ada Pancasila. Cara membawakan soal Empat Pilar itu sangat sederhana dan saya menjadi paham tentang sila-sila Pancasila.

Waktu sekolah dulu, saya mengerti dan hafal itu Pancasila. Setelah sudah tua begini jadi lupa. Nah, ketika dibawakan oleh Bapak Fadel, Pimpinan MPR, dan istrinya Ibu Hana itu saya yang awalnya lupa menjadi ingat kembali.

Saya harap para pejabat hendaknya mendekati rakyat seperti saya yang tidak paham apa-apa menjadi paham. Ternyata Empat Pilar itu sangat penting di negara kita Indonesia. □

DER

Ahmad Yamin

# Setia Terhadap Panggilan *Tugas*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**L**EBARAN adalah momen bahagia umat Islam, setelah sebulan berpuasa. Berbagai persiapan dilakukan dalam rangka menyambut datangnya Idul Fitri. Mulai dari baju baru, perlengkapan salat baru, jamuan lezat, hingga mengecat rumah. Semua dilakukan untuk menyambut datangnya hari kemenangan.

Namun, tidak semua umat Islam beruntung, bisa merayakan Hari Lebaran bersama keluarga. Banyak juga di antara mereka yang terpaksa melewatkan malam takbiran di tempat kerja. Atau malah, di alam terbuka bersama para korban bencana. Situasi itu, salah satunya, acapkali ditemui oleh Ahmad Yamin (37), Staff Respon & Recovery Dompot Duafa (DD).

Lebaran tahun ini misalnya, pria kelahiran Tangerang 30 November 1986 ini masih beruntung. Ia bisa berlebaran sebagaimana lazimnya umat Islam. Tetapi, kebahagiaan itu tidak bisa dirasakan berlama-lama, seperti umat Muslim pada umumnya. Paling satu atau dua hari saja, dia berlebaran bersama keluarga. Selebihnya, Yamin harus segera kembali ke Cianjur untuk menyertai para korban gempa dan tanah longsor membangun sarana prasarana yang

dibutuhkan. Seperti, MCK, sekolah, tempat ibadah hingga rumah tinggal sementara.

“Bagaimanapun, tahun ini masih beruntung bisa berlebaran bersama keluarga, meski waktunya singkat. Masih untung, karena tahun-tahun sebelumnya, saya sering merayakan lebaran, bersama para korban di saat mereka sedang parah-parahnya terkena imbas akibat bencana alam,” kata Yamin kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Menurut Yamin, pekerjaannya menuntut

kesiapan, untuk selalu berjaga dan memberikan respon secepat mungkin, kapanpun waktunya. Tidak peduli, tengah malam, hujan lebat, angin ribut ataupun panas terik. Jika panggilan darurat terdengar saat itu juga ia harus bersiap. Tidak peduli istri tengah sakit atau ada saudara meninggal.

“Setiap kali hendak melangkah meninggalkan rumah, saya selalu berdoa untuk menitipkan keluarga saya kepada Allah. Karena saat ada tugas, saya belum tentu







bisa menolong, jika terjadi sesuatu. Untuk itu, bantuan Allah lah yang saya harapkan,” kata Yamin.

Karena itu, kalau hanya tidak berlebaran dengan keluarga lantaran panggilan tugas, menurut anak kedua tiga bersaudara pasangan Saanih dan Darsono, itu bukan persoalan berarti. Ia sudah sering berlebaran di luar rumah, jauh dari keluarga, juga sanak saudara. Seperti pada peristiwa banjir bandang di Kabupaten Pandeglang pada 2012. Saat itu banjir besar terjadi, diakhir bulan Ramadan. Karena itu, praktis saat lebaran tiba regu penolong masih sibuk mencari korban. Tidak ada suasana lebaran, kecuali melaksanakan Salat Ied sekedar bermaaf-maafan, kemudian kembali pada pencarian para korban.

Sebelumnya, pada 2010, Yamin juga harus merayakan Lebaran di Gunung Merapi. Saat itu gunung paling aktif di Indonesia tersebut mengalami erupsi. Lahar panas beserta material berpijar lainnya dimuntahkan dari perut bumi. Warga segera mengungsi, meski ada beberapa yang terlambat sehingga menimbulkan korban.

“Kami turun hanya beberapa hari sebelum akhir puasa, dan harus berlebaran di sana. Kami hanya melaksanakan salat Ied,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sekedar bersilaturahmi tanpa ketupat maupun makanan khas lebaran lainnya. Tidak ada kebahagiaan lainnya Idul Fitri, tapi kami bersyukur bisa membantu sesama,” kata Yamin lagi.

Selain itu masih banyak bencana alam yang membuatnya harus merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Seperti saat terjadi banjir bandang di Wasior Papua pada 2010. Saat itu, Yamin bertugas dari awal puasa, hingga Lebaran.

### Situ Gintung

Suami dari Sarah Audy Harun itu bersyukur, sejak bergabung dengan Dompet

Duafa pada 2007, sudah banyak yang dilakukan untuk membantu sesama. Berbagai macam korban bencana alam sudah pernah ditangani, termasuk saat terjadi pandemic Covid-19. Semua itu membuatnya banyak bersyukur nikmat sehat dan selamat yang selama ini dia rasakan.

Yamin sendiri bergabung dengan respon cepat Dompet Duafa karena sebelumnya menjadi anggota pecinta alam di Universitas Brawijaya Malang. Karena itu, mendengar ada perekrutan, ia merasa tertantang untuk membantu korban bencana.

“Saya tidak langsung diterjunkan sebagai tim respon, karena belum memiliki pengalaman. Awal-awal saya bertugas serabutan, antara lain mengirim air mineral atau kebutuhan lain di tempat bencana. Baru pada 2009, setelah melalui berbagai latihan, saya terjun pertama pada peristiwa jebolnya Situ Gintung. Setelah itu baru ke tempat lain,” ungkap Yamin.

Sejauh ini, menurut Yamin, dia sudah memberi pengertian kepada keluarga menyangkut resiko pekerjaan yang dilakukan. Dan, karena itu, selama menjalankan tugas tidak ada keberatan dari keluarga. Bahkan keluarganya mendukung setiap tugas yang diemban Yamin.

“Selama bisa bermanfaat buat orang lain dan masih dipercaya menjalankan tugas, tidak ada alasan bagi saya untuk mundur. Karena, bisa membantu atau menolong orang lain adalah kebahagiaan tersendiri buat saya,” pungkasnya. □

MBO

Harlah dan Rakernas PB Al-Khairiyah

# Yandri Susanto: Sebagian Saham Rumah Rakyat Ini Milik Al-Khairiyah

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, S.Pt., berharap, Al-Khairiyah menjadi pelopor untuk merekatkan dan mempersatukan anak-anak bangsa. Dan, dia juga berharap, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara itu final tidak boleh diganggu gugat lagi, NKRI harga mati.

**W**AKIL Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt bersama Menteri BUMN RI Erick Thohir menghadiri acara Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5/2023).

Acara yang mengusung tema: ‘Mewujudkan Amanah Brigjen KH. Syam’un Melalui Peran Perkumpulan Al-Khairiyah Untuk Kemaslahatan Umat dan Bangsa’ ini juga dihadiri Ketua Umum PB Al-Khairiyah KH. Ali Mujahidin, Ketua Majelis Syuro PB Al-Khairiyah KH. Mansyur Muhyidin, Ketua MUI Kota Serang KH. Hidayatullah, Rektor Universitas Al-Khairiyah dan sekitar seribu lebih peserta perwakilan pengurus Al-Khairiyah seluruh Indonesia.

Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan acara di Gedung Perlemen atau Rumah Rakyat ini karena ada kedekatan emosional dan kebanggaan yang mendalam dari warga Al-Khairiyah. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab dalam kelahiran gedung luar biasa ini sebagian sahamnya dimiliki Al-Khairiyah, sebuah organisasi Islam yang dibentuk 98 tahun silam, dengan peran besarnya yang sangat menentukan dalam proses terbentuknya Republik Indonesia.

Terwujudnya gedung rakyat ini, lanjut Yandri, karena perjuangan keras rakyat Indonesia, salah satunya seorang pahlawan nasional sekaligus pendiri Al-Khairiyah Brigjen KH. Syam’un, seorang pejuang asli Banten, yang mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Beliau bersama para santrinya rela menumpahkan darah, mengorban nyawa, dan menyucurkan air mata demi lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan dan lahirnya Indonesia merdeka.

“Jadi, saya tekankan seluruh warga Al-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Khairiyah harus percaya diri dan merasa bangga bisa hadir di Gedung Rakyat ini, karena hasil perjuangan Al Khairiyah melahirkan Indonesia merdeka. Satu lagi, sebagai anak bangsa, Al-Khairiyah harus

bisa menjaga kekompakan, persatuan, dan semangat gotong royong antarsesama warga,” ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

Hal tersebut sangat ditekankan Yandri, mengingat bangsa Indonesia akan



menghadapi tahun politik 2024. Di mana saat ini mulai terasa adanya kontestasi politik di masyarakat.

“Saya berharap, Al-Khairiyah menjadi pelopor untuk merekatkan dan mempersatukan anak-anak bangsa. Maka melalui Harlah dan Rakernas ini, saya berharap bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara itu final tidak boleh diganggu gugat lagi, NKRI harga mati dan Al-Khairiyah ikut membangun dan mengisi kemerdekaan,” tandasnya. □



## Pelestarian Bahasa Daerah

# Lestari Moerdijat: Harus Konsisten Demi Ketahanan Budaya Bangsa

Keragaman bahasa daerah sebagai bagian dari budaya harus terus ditingkatkan melalui berbagai upaya pelestarian demi mewujudkan ketahanan budaya bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**U**PAYA pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia harus menjadi kepedulian kita bersama,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/4).

Situs web *Ethnologue, Languages of the World*, salah satu situs yang banyak dikutip oleh linguis mencatat bahwa bahasa yang digunakan di dunia berjumlah 7.168, dan lebih dari 40% bahasa dunia itu kini dalam keadaan

terancam (endangered). Pengguna suatu bahasa kerap tinggal kurang dari 1.000 penutur.

Situs web resmi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mencatat, jumlah bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa. Keterancamannya keberadaan bahasa merupakan masalah tersendiri dalam perkembangan dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan pendapat sejumlah pakar bahasa di dunia, ujar Lestari, ancaman terhadap penggunaan bahasa seringkali datang dari faktor-faktor nonlinguistic, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial, sikap para penuturnya, serta tidak ada dukungan kelembagaan dalam penggunaan bahasa tersebut.

Padahal, menurut Rerie — sapaan akrab Lestari—selain sebagai alat komunikasi, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia.

Berdasarkan fungsi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, keberadaan bahasa daerah harus terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, partisipasi semua pihak, baik dari sisi kelembagaan dan kelompok masyarakat untuk melestarikan bahasa daerah melalui berbagai upaya harus konsisten dilakukan.

Pentingnya peran bahasa daerah dalam mewujudkan ketahanan budaya sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa, tegas Rerie, harus menjadi kepedulian setiap anak bangsa. □

Terima Kepala Staf TNI Angkatan Laut

# Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit TNI

Konsekuensi Indonesia sebagai poros maritim dunia, TNI Angkatan Laut harus bisa menjaga kedaulatan dan kekayaan laut dari segala bentuk ancaman, agar berbagai potensi laut dapat dimaksimalkan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Warga Kehormatan Korps Marinir dan Warga Kehormatan Satuan Kapal Selam dari TNI-Angkatan Laut, Bambang Soesatyo, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dirinya mendukung peningkatan Alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI AL.

“Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis. Misalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan

17.508 pulau, dan memiliki garis pantai 99.083 km atau terpanjang ke-2 di dunia setelah Kanada. Indonesia juga memiliki laut terluas ke-6 di dunia setelah Perancis, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Inggris,” ujar Bamsoet usai menerima KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, di Jakarta, Kamis malam (13/4/23).

Turut hadir, antara lain: Anggota MPR/DPR RI Robert Kardinal, Asisten Intelijen KSAL Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani, serta Danaspormar KSAL Mayjen TNI (Mar) Nur

Alamsyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kondisi geografis Indonesia tersebut meniscayakan bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan armada laut yang kuat. Terdiri dari sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan militan, serta dukungan Alutsista yang tidak hanya memadai secara kuantitas, namun juga siap dioperasikan.

“Saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga penyelesaian minimum essential force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60%. Pada tahun 2024, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan sudah bisa terpenuhi. Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Matra Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indone-



sia ini menerangkan, visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, konsekuensinya TNI Angkatan Laut harus bisa menjaga kedaulatan dan kekayaan laut dari segala bentuk ancaman, agar berbagai potensi laut

dapat dimaksimalkan sebesarnya untuk kemakmuran Bangsa Indonesia.

“Agresifitas Tiongkok di sekitar Laut Natuna maupun posisi geografis Indonesia pada jalur ring of fire dunia, merupakan dua hal besar yang harus diwaspadai. Selain

itu, TNI AL juga harus bisa mengantisipasi berbagai pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing yang menyelendupkan narkoba, illegal fishing, illegal logging, imigran gelap, perompakan, maupun pembajakan,” pungkas Bamsuet. □

## RUU Kesehatan

# Syarief Hasan: Harus Mengakomodir Aspirasi Tenaga Kesehatan

Aspirasi mereka mesti ditampung dan ditindaklanjuti dalam RUU Kesehatan ini. Jangan sampai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di daerah-daerah.

**W**AKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendesak Pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari tenaga kesehatan menanggapi Omnibus Law RUU Kesehatan. Pasalnya, RUU Kesehatan tersebut dinilai tidak mengakomodir kepentingan dari para tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi profesi menggelar aksi damai pada Senin, (8/5/2023). Lima organisasi profesi kesehatan tersebut, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Syarief Hasan menilai, aspirasi dari para tenaga kesehatan harus diakomodir. “RUU Kesehatan harusnya mengakomodir aspirasi tenaga kesehatan. Sebab, mereka yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima di Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, aspirasi para tenaga kesehatan semata-mata untuk melindungi tenaga kesehatan. “Perlu adanya hak imunitas bagi tenaga kesehatan dan medis yang diakui undang-undang. Hak imunitas ini penting agar mereka bisa bekerja profesional dan tanpa keraguan,” ujar Syarief Hasan.

Syarief Hasan melanjutkan, para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah konflik juga perlu mendapatkan jaminan keselamatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan keamanan. “Ada kejadian di mana tenaga kesehatan malah menjadi korban saat bertugas di daerah konflik. Mereka perlu diberikan jaminan keamanan, sehingga mereka bisa bertugas dengan nyaman dan harus dijamin undang-undang,” katanya.

Syarief Hasan mendorong Pemerintah dan DPR untuk mengadakan forum bersama para tenaga kesehatan dan medis. “Aspirasi mereka mesti ditampung dan ditindaklanjuti dalam RUU Kesehatan ini. Jangan sampai hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di daerah-daerah,” tegass Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah dan DPR untuk

memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. “Kita akan terus mendorong agar para tenaga kesehatan, seperti bidan desa, bisa terjamin kesejahteraannya. Sebab, mereka adalah orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa-desa,” ungkap Syarief Hasan.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat berkomitmen mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari para tenaga kesehatan, khususnya berkaitan dengan pembahasan Omnibus Law UU Kesehatan. Harapan kami, tenaga kesehatan diakomodir aspirasinya, Indonesia juga semakin sehat dan maju,” tutup Syarief Hasan. □

FGD dengan LSM Kompak

Fadel Muhammad

# Tidak Ada **Demokrasi** Tanpa Kontrol Sosial dari Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EBAGAI salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk menjalankan demokrasi secara benar dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik dan berada di jalurnya diperlukan social control /kontrol sosial dari elemen masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad bahkan tegas menekankan bahwa tanpa kontrol sosial dari elemen masyarakat, seperti media massa dan LSM, tidak akan ada demokrasi.

“Demokrasi akan semakin tajam dan bagus apabila kontrol sosialnya makin terbuka,” kata Fadel pada acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan LSM Komunitas Pejuang Aspirasi Rakyat (KOMPAK), di Ballroom Grand Q Hotel, Gorontalo, Sabtu (8/4/2023).

Turut hadir dalam FGD bertema: ‘Peran LSM dan Media Sebagai Fungsi Kontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah’ ini, antara lain: anggota DPD RI Abdurrahman A. Bahmid, anggota DPRD Prov. Gorontalo Adhan Dambea, Perwakilan Ketua PWI Gorontalo Irfan Mahmud, Pimpinan dan anggota LSM Komcad, perwakilan LSM dan media massa di Gorontalo.



Penghormatan dan dukungan Fadel Muhammad terhadap kontrol sosial masyarakat berupa kritikan keras terhadap dirinya pernah ditunjukkan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini, saat menjabat Gubernur Gorontalo selama dua periode.

“Ketika saya menjabat Gubernur Gorontalo, saya sering mendapat kritik dari media massa bahkan sangat pedas dan tajam, tapi saya tetap



dekat dengan media, tetap berkomunikasi. Saya tidak marah, tidak juga tersinggung. Sampai staf-staf saya di Pemprov terheran-heran kenapa saya tetap baik padahal kritikan

kepada saya sangat pedas. Saya bilang itu adalah peran mereka sebagai kontrol sosial dan kita butuh mereka untuk mengingatkan,” terang Fadel Muhammad.

“Kalau dikritik sebagai pejabat publik saya tidak lantah panas, ya saya jawab untuk memberikan penjelasan atas apa-apa yang dikritik,” tambahnya.

Intinya, lanjut Fadel Muhammad, betapa sangat penting sosial kontrol itu. Sebab, sosial kontrol memang harus disuarakan, jika tidak disuarakan tidak akan ada artinya kontrol sosial.

Dalam momen FGD tersebut, Fadel Muhammad menitipkan pesan bahwa saat ini ada wacana besar yang sedang berjalan, yakni mewujudkan ketahanan pangan di Gorontalo, dan menjadikan Gorontalo sebagai Kawasan Pangan Nasional. Fadel berharap, LSM dan media massa harus menjaga sesuai perannya sebagai kontrol sosial, agar ide besar ini tidak hanya sekedar wacana, tapi terealisasi. □

DER

Sosialisasi Tokoh Agama Islam Serang

# Yandri Susanto: Ajaran Mulia Islam Tercermin dalam Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt., mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, dari sila pertama hingga ke lima, sangat sesuai dan tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran mulia agama Islam. “Artinya, memahami dan mengamalkan Pancasila bagi umat Islam Indonesia bukan

lagi sesuatu yang baru,” ujarnya

Seperti sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, menyembah memang hanya kepada Tuhan Yang Esa, yaitu Allah SWT. Lalu, sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Maknanya, dalam Islam, kepada semut pun umat harus memiliki adab. Apalagi dengan sesama manusia.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam gelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan KKM Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Serang, di Gedung Serba Guna Kompleks Pondok Pesantren Alqur’an Bai Mahdi Sholeh Ma’Mun, Desa Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten, Ahad (16/4/2023).





Di sila ketiga, lanjut Yandri, ada Persatuan Indonesia. Dalam Islam, umat diajarkan untuk saling bersinergi dan bersatu, tidak boleh saling iri dengki, khianat apalagi munafik. Di ajaran Islam juga ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Ini tercermin pada sila keempat Pancasila. Lalu, terakhir sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan tanpa pandang bulu juga ada dalam ajaran Islam.

"Intinya, Pancasila itu sangat Islami. Maka dari itu, jika kita mengaku sebagai umat Islam maka sudah semestinya mengamalkan Pancasila," ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

Karena begitu berartinya Pancasila buat

umat Islam, Yandri menegaskan, jika masih ada pihak yang mengatakan bahwa Pancasila tidak Islami maka umat harus tegas mengatakan bahwa pernyataan itu sangat keliru.

"Karena itulah, saya mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk terus menjaga Pancasila sebagai perekat keutuhan bangsa semaksimal mungkin. Caranya, antara lain dengan menolak dan melawan segala bentuk upaya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia," pungkasnya.

Acara sosialisasi ini sendiri berlangsung lancar dengan dihadiri Kakanwil Kemenag Prov. Banten Nanang Fathurrahman, Kepala

Kantor Kemenag Kab. Serang Ahmad Rifaudin, Ketua Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta (FKKMS) Kab. Serang Tubagus Erwin Mahrobi, Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) kota Serang KH. Kaerul Solihin.

Dalam acara sosialisasi yang diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan, antara lain Kepala KUA, kepala Madrasah, Ponpes Kabupaten Serang, serta masyarakat Kabupaten Serang ini, tampak hadir pula Ketua FKPAI Kab. Serang KH. A. Sumadi, Kasie Pendidikan Madrasah Kemenag Kab. Serang Ahmad Suhaemi, Ketua PCNU Kab. Serang Muhammad Robi. □

DER

## Sosialisasi di Desa Molingkapoto Selatan

# Fadel Muhammad: Pahami dan Implementasikan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan masyarakat untuk selalu mengimplementasikan Empat Pilar MPR yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, mengamalkan ibadah puasa dalam agama Islam, itu adalah pengamalan Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang lainnya adalah masyarakat harus berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024 nanti. Sebab, Pemilu adalah cerminan kedaulatan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.

"Pemilu adalah salah satu elemen penting dalam ketatanegaraan kita. Demokrasi kita dibangun melalui Pemilu. Untuk itu, masyarakat jangan golput, harus berpartisipasi aktif," katanya, dalam acara

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Majelis Taklim Arrahman, di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara, Jumat malam (7/4/2023).

Hadir dalam acara itu, mantan Senator dapil Gorontalo periode 2009-2019 yang juga istri Fadel Muhammad, Hana Hasanah Shahab, sebagai narasumber, Kepala Desa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Malingkapoto Selatan Alfian Uno, tokoh agama dan ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Arrahman sebagai peserta.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa bertahannya

negara Indonesia selama ini karena rakyat menjalani atau mengimplementasikan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Itu harus dipegang teguh oleh ibu-ibu

semua. Sebagai Pimpinan MPR saya dan semua pimpinan MPR berjumlah 10 orang tidak akan bisa menjalani sosialisasi ini sendirian, kami dan bahkan negara ini butuh campur tangan semua elemen bangsa, termasuk ibu-ibu untuk menyebarkan kembali nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hana Hasanah menjelaskan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, semua umat Islam harus lebih mengamalkan semua ajaran Islam sehingga semua akan diberi balasan pahala yang besar.

"Bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kita semua untuk saling dekat, toleransi antarsesama. Semua ini juga menjadi inisiasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang harus kita jaga sebagai warga bangsa Indonesia," ujar dia.

Di sesi penutup, Fadel dan Hana membuka dialog interaktif serta berbagi memberikan cinderamata dan sedikit bingkisan untuk membantu keperluan puasa dan Idul Fitri. □

DER

## Sosialisasi di Desa Desa Mustika, Paguyangan

# Fadel Muhammad: Percuma Ada Pemilu Jika Ujungnya Perpecahan

**W**AKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengingatkan, bagi bangsa Indonesia, keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Karena, sebelum Indonesia berdiri, kebhinnekaan itu sudah lebih dulu hadir di bumi Indonesia. Ada banyak suku, bangsa, bahasa, dan agama yang turut berpartisipasi, membidani, melahirkan, juga menjaga tetap tegaknya Indonesia.

Karena itu, menurut Fadel, keberagaman di Indonesia harus dilestarikan. Tidak boleh ada tindakan yang bertujuan untuk mengurangi, apalagi menghilangkan kebhinnekaan di Indonesia. Dengan begitu, kebhinnekaan Indonesia akan tetap terjaga selama-lamanya.

"Kita tidak mengenal kelompok mayoritas dan minoritas. Seluruh warga bangsa



memiliki hak yang sama, bukan karena mayoritas dia lantas bisa berbuat semena-

mena, atau menindas yang minoritas," jelas Fadel Muhammad.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pernyataan itu disampaikan Fadel Muhammad pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat Desa Mustika Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu malam (26/4/2023). Ikut hadir pada acara tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dedi

Hamzah, Camat Paguyangan, kepala Desa Mustika, dan anggota masyarakat.

Agar keberagaman di Indonesia tetap terjaga, menurut Fadel, semua pihak harus berkontribusi menjaga persatuan dan kesatuan. Di MPR upaya menjaga kebhinekaan dan menyuburkan persatuan

kesatuan, diwujudkan dalam bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar MPR terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Ditahun politik seperti sekarang, potensi perpecahan sangat tinggi. Karena itu, seluruh masyarakat harus tetap waspada, jangan tergelincir dan larut dalam upaya-upaya memecah belah yang dilakukan kelompok tertentu. Pemilu harus bisa dilalui tanpa perpecahan,” kata Fadel lagi.

Di alam demokrasi, kata Fadel, pergantian pimpinan melalui pemilu adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, semua pihak harus turut menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, jauh dari manipulasi serta kecurangan. Apalagi sampai menggunakan cara-cara yang tidak terpuji.

“Percuma kita berdemokrasi jika ujungnya adalah terpecah belah. Mari kita jaga persatuan, agar pemilu berlangsung dengan damai, menghasilkan pemimpin yang bisa diterima semua pihak,” pungkasnya. □



Diskusi Empat Pilar

# Arsul Sani: Memenjarakan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Harus Beriringan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., mengatakan, sudah waktunya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi mempertimbangkan aspek pengembalian kerugian keuangan negara atas praktik kejahatan tersebut. Bukan semata fokus memenjarakan terpidana korupsi, seperti yang selama ini dilaksanakan. Jadi, penegakan hukum

terhadap pelaku korupsi harus berjalan beriringan, antara memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi.

Untuk itu, menurut Arsul, perlu ada revisi terhadap UU Tipikor agar undang-undang tersebut lebih sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nation Corruption -UNCAC) tahun 2003. Apalagi

Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tersebut, sehingga UU Tipikor yang sekarang berlaku perlu disesuaikan dengan UNCAC.

“Proses penindakan hukum terhadap pelaku tindak korupsi harus berjalan beriringan antara upaya pemenjaraan dan pengembalian kerugian keuangan negara, bukan hanya salah satu saja,” tutur Arsul.

Pernyataan itu disampaikan Arsul Sani saat menjadi narasumber Diskusi Empat Pilar yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR/DPR, Rabu (5/4/2023).

Selain Arsul, diskusi yang membahas tema: “Polemik 349 T, Peran Legislator Ungkap Keadilan Sosial Demi Selamatkan Pajak Negara,” juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi XI DPR RI Ir. Kamrussamad S.H., M.Si., serta Peneliti Ekonomi Indef Nailulhuda

Sila kelima Pancasila ‘keadilan sosial,’ menurut Arsul, harus diartikulasikan ke seluruh aspek kehidupan. Salah satunya dengan tax ratio. Tidak sekedar puas dengan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Karena ternyata target yang ditetapkan masih terlalu kecil.

“Salah satu bentuk artikulasi sila keadilan adalah transparansi yang semakin jelas terhadap mekanisme penganggaran, tidak ditutupi atau malah dikaburkan,” kata Arsul lagi.

Sebelumnya, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Ir. Kamrussamad S.H., M.Si., menekankan, skandal 349 T yang menyeret kementerian keuangan harus berakhir buat kepentingan bangsa dan negara. Akhir dari skandal tersebut juga harus mendukung perbaikan tatakelola pemerintah.

“Selama ini kita mengakui reformasi birokrasi telah berjalan dengan



baik. Tetapi, karena kasus ini kemungkinan masih akan melahirkan tersangka baru, dan bisa dikatakan reformasi sebenarnya belum selesai. Terbukti masih ada kegagalan yang harus dievaluasi,” jelas Kamrussamad.

Skandal 349 T, menurut Kamrussamad, membuka mata terhadap praktik tak terpuji yang selama ini tersembunyi di Kemenkeu. Ternyata, ada orang-orang pajak yang menjadi konsultan pajak. “Praktik seperti itu berpotensi

menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Karena itu skandal ini harus diurus tuntas, dan memberikan sanksi yang memiliki efek jera bagi para pelakunya,” pungkas Kamrussamad. □

MBO

## Sosialisasi Empat Pilar KLK-PG

# Fadel Muhammad: Agar Selalu Meneguhkan Empat Pilar dalam Hati dan Perbuatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengingatkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia harus bangga memiliki Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Sebab, dengan Empat Pilar MPR, keberagaman bangsa bisa dipersatukan secara harmonis.

“Di momen suasana lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini, terutama untuk warga Gorontalo, merupakan momen untuk kita semua mengimplementasikan Empat Pilar MPR, salah satunya Pancasila. Sebab, di

situ ada pengamalan agama, toleransi, dan juga persatuan,” kata Fadel Muhammad, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kota Gorontalo, di Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo, Ahad malam (30/4/2023).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Komunitas Literasi Kampung Provinsi Gorontalo (KLK-PG) ini, tokoh masyarakat Gorontalo Haji Lala, Ketua KLK-PG Abdul Fikri Katil, serta anggota KLK dan sekitar 100 warga masyarakat sekitar sebagai peserta.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil

Provinsi Gorontalo ini sangat menekankan, pentingnya masyarakat Indonesia memegang teguh Empat Pilar MPR. “Bayangkan kalau tidak ada Pancasila mana bisa rakyat Gorontalo merayakan tradisi Lebaran Ketupat. Apalagi, puncak acaranya ada penampilan berbagai budaya, seperti Jawa, Bali dan Sulawesi,” tegas dia.

Pada intinya, Fadel Muhammad mengajak masyarakat Gorontalo dan semua warga negara Indonesia, untuk selalu meneguhkan Empat Pilar MPR dalam hati dan perbuatan.

“Tantangan bangsa kita ke depan makin berat. Jari diri bangsa yang melekat kuat di

dada setiap anak bangsa, insya Allah bangsa ini akan mampu menghadapi tantangan itu. Salah satu yang berat adalah tahun politik 2024, di mana kompetisi politik sangat panas dan gencar nanti. Dengan Empat Pilar, saya yakin kompetisi politik itu tidak akan membuat bangsa ini pecah dan berantakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, kepada peserta sosialisasi dari kalangan generasi muda, Fadel Muhammad memberikan beberapa tips dan motivasi untuk meraih kesuksesan. “Kesuksesan adalah hak setiap orang. Kewajiban kita adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mencapainya. Camkan ini, Allah SWT menyukai orang yang bekerja keras. Raihlah kesuksesan dengan doa dan kerja. *Success is a journey not a destination*, itu pesan saya,” tandasnya. □



## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

# HNW: Empat Pilar MPR Lahir untuk Melanjutkan Keteladanan para Pendiri Bangsa

**D**I HADAPAN Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) Universitas Negeri Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak para pakar dan kaum terpelajar untuk menguatkan komitmen meneladani kenegarawana para Bapak Bangsa, serta mengingatkan bahwa salah satu tugas MPR adalah menyampaikan keteladanan itu melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada komunitas IKADIM.

Tetapi, lanjut HNW – sapaan Hidayat Nur Wahid— sosialisasi yang disampaikan kepada IKADIM tentu bukan untuk menggarami air laut, ataupun mengajari ikan berenang. Sosialisai kepada IKADIM terkandung maksud untuk menyegarkan ingatan dan menguatkan komitmen menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar dan ideologi negara, serta konstitusi, agar dapat melanjutkan keteladanan para Bapak dan Ibu Bangsa.

Apalagi, hari ini Jumat, 31 Maret 2023, atau bertepatan 9 Ramadan 1444 H., adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indonesia. Pada hari ini, 78 tahun yang lalu, adalah hari dan tanggal di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digaungkan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, waktu itu bertepatan dengan hari ini Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 H.

“Artinya, boleh jadi saat ini kita juga sedang merayakan Kemerdekaan Indone-

sia yang ke-80 dalam hitungan kalender Hijriyah. Dan, kita patut bersyukur karunia kemerdekaan yang telah Allah hadirkan, sambil terus melakukan introspeksi apa saja yang sudah kita syukuri dan kita capai selama ini,” kata Hidayat Nur Wahid.

HNW menyampaikan hal itu pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Bedah

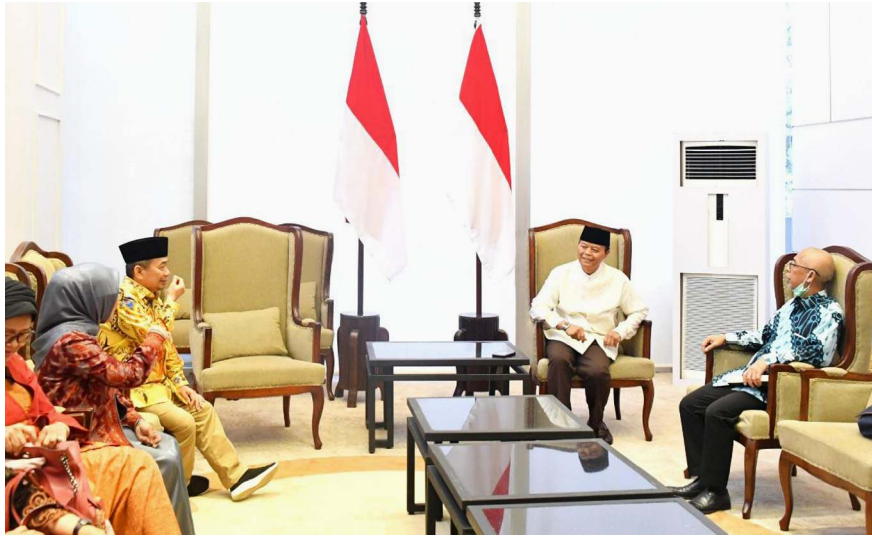


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Buku “MSDM Dalam Prespektif Islam”, karya tulis Ikatan Doktor Ilmu Manajemen, Jumat (31/3/2023) di Ruang Abdul Muis DPR RI Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR. Ikut hadir Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., Presidium IKADIM yang juga Anggota Fraksi PKS MPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA., serta jajaran pengurus IKADIM dan Universitas Negeri Jakarta.

Adanya dua sistem penanggalan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menurut HNW, menjadi bukti suburnya kebhinnekaan bangsa Indonesia. Yaitu, kebhinnekaan yang Tunggal Ika. Dan, itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum lahirnya bangsa Indonesia merdeka.

“Kompromi tentang Pancasila sebagai

dasar dan ideologi bangsa Indonesia disepakati pada 22 Juni 1945. Tetapi pada 17 Agustus sore, masuklah berbagai aspirasi dan keberatan. Yang menarik keberatan itu bukan menjadi pembelah bangsa. Berbeda dengan kenyataan saat sekarang, di mana perbedaan memunculkan istilah kadrun, kampret, dan seterusnya. Padahal, para Bapak dan Ibu Bangsa sudah memberikan keteladanan dalam menyikapi perbedaan, dan kemampuan membuat solusi dan kompromi untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ungkap HNW.

Pidato tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada Sidang BPUPK, 31 Mei- 1 Juni 1945, kata anggota Komisi VIII DPR RI ini, melahirkan dua poros

ideologi besar, yaitu kebangsaan dan keagamaan Islam. Tetapi, keduanya bukan saling membelah dan memisahkan. Baik poros ideologi nasionalis kebangsaan maupun nasionalis religius berupaya menemukan kompromi agar kebhinnekaan itu menghadirkan ketunggalikaan.

Muhammadiyah dan NU

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, sesudah penyampaian pidato tentang Pancasila, dibentuklah panitia kecil terdiri dari 8 orang untuk merumuskan kesepakatan. Oleh Bung Karno, keanggotaan panitia kecil itu diubah dengan alasan tidak seimbang. Karena, dari 8 anggota panitia kecil 6 di antaranya merupakan anggota poros ideologi kebangsaan, dan hanya dua orang dari keagamaan.

“Bung Karno memperlihatkan kenegarawanannya, mengubah panitia delapan menjadi Panitia Sembilan dengan mengakomodir semua kelompok. Ada empat orang poros ideologi kebangsaan, yaitu Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, dan A. Soebardjo, serta satu kelompok kebangsaan Nasrani AA. Maramis. Lalu empat orang dari kelompok kebangsaan Islam, terdiri dari dua ormas Islam, KH. Wahid Hasyim (NU) dan KH. Kahar Muzakir (Muhammadiyah), serta 2 dari Partai Islam H. Abikoesno Tjokrosoejoso dan H. Agus Salim. Kelompok Sembilan menghasilkan kompromi tentang Pancasila pada 22 Juni, dan dikenal sebagai Piagam Jakarta,” ungkap Hidayat.

Ternyata, hasil kompromi Pancasila 22 Juni itu diprotes oleh masyarakat Indonesia Timur. Dan, sesuai prinsip kenegarawanan yang mengedepankan maslahat terbesar, keberatan tersebut diterima sehingga lahir kesepakatan final Pancasila 18 Agustus. Sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Inilah hikmah besar yang harus dipelajari dan diteladani dari para pendiri bangsa, terutama oleh kalangan terpelajar, seperti IKADIM, dan oleh MPR maka dilahirkanlah Empat Pilar MPR RI. Agar pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI, selain mensejarah untuk melanjutkan keteladanan juga berkemampuan untuk mengawal dan mengawasi perjalanan kebangsaan,” pungkas HNW. □

MBO



Sarasehan Umuh Bangka Belitung:

# Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Karakter Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**LT. DEPUTI Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa, terutama di era perjuangan, kiprah generasi muda memiliki peran yang sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah di hadapan 125 mahasiswa dari berbagai fakultas dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah, Bangka Belitung, pada saat

membuka acara: Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan.

Sarasehan bertema: 'Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Karakter Bangsa', berlangsung di Gedung 1.1 – Gedung Babel, Universitas Muhammadiyah, Jumat (05/05/2023). Dihadiri oleh Wakil Rektor I Dr. Pratiwi Amelia, M.Pd. BI., Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI, Fauziah, SE., MM., Kepala Bagian Pemberitaan dan

Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setjen MPR Indro Gutomo SH., MH., serta Radmida Dawam., SH., MH.

Lebih jauh, deputi yang akrab dipanggil Ibu Titi itu menyampaikan bahwa yang harus mendapat perhatian lebih mahasiswa sebagai generasi muda terkait penggunaan medsos adalah kecanggihan teknologi yang memiliki dua sisi yang saling berseberangan. Pertama, medsos memiliki sisi manfaat. Contohnya, dengan teknologi tersebut memudahkan mahasiswa mencari materi tambahan ketika sedang melakukan riset atau memperlancar akses komunikasi mahasiswa yang sedang terkendala mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Kedua, medsos memiliki sisi negatif, yakni bisa menjadi salah satu sarana untuk penyebaran berita bohong atau hoaks.

Terkait Sarasehan Kehumasan MPR, Ibu Titi menyampaikan bahwa acara tersebut adalah program Sekretariat Jenderal MPR dengan menyapa mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, untuk membahas dan mendiskusikan tentang pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Pemilihan kata 'Menyapa Sahabat Kebangsaan' sendiri memiliki makna yang dalam, yakni MPR ingin menjadi sahabat mahasiswa.

"Dengan menjadi sahabat, kita akan saling berbagi, saling mengingatkan dan saling mendukung. Sebagai sahabat, MPR menjelaskan semuanya tentang apa itu MPR, tugas dan kewenangannya sehingga mahasiswa menjadi bertambah wawasannya. Sebaliknya, jika mahasiswa ada masukan, saran serta gagasan apapun yang baik demi MPR dan negara secara luas, maka tangan MPR terbentang lebar. Acara ini juga untuk mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat." terangnya.

Gedung MPR, lanjut Ibu Titi, juga terbuka buat mahasiswa dan masyarakat umum untuk datang walaupun hanya sekedar berkunjung. "Jika ada keperluan ingin mendapatkan buku-buku yang berisikan







informasi tentang MPR dan produk-produknya, mahasiswa bisa datang ke Perpustakaan MPR. Di sana ada beberapa

buku yang tidak diperjualbelikan, hanya ada di Perpustakaan MPR," tambahnya.

Di akhir pidato pembukaannya Ibu Titi juga

menambahkan, selain perpustakaan untuk mempermudah mahasiswa dan rakyat mengakses berbagai informasi seputar MPR dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, MPR membuat aplikasi Buku Digital MPR yang bisa didownload melalui play store android dan membuat akun media sosial resmi lembaga MPR.

Selanjutnya Wakil Rektor I Dr. Pratiwi Amelia, M.Pd. BI., dalam sambutannya menyatakan, dengan penuh rasa bahagia dan bangga hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Tidak main-main langsung dari MPR RI dan kita patut berbangga karena kita adalah satu-satunya universitas yang dipilih oleh Ibu Siti Fauziah sendiri. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Fauziah yang terhormat. Beliau adalah Plt. Deputi Administrasi Sekjen MPR RI, hadir di sini bersama Bapak Indro Gutomo, S.H, M.H. □

## Sarasehan Kehumasan MPR di Unmuh Babel

# Indro Gutomo: Pentingnya Tiga Kecerdasan dalam Pembangunan Karakter Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ABAG Pemberitaan Setjen MPR RI, Indro Gutomo SH., MH., menyampaikan bahwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga masa Reformasi, mahasiswa mempunyai

peran sentral.

Adik-adik harus paham bahwa dalam sejarah Indonesia, setiap perubahan rezim, aktor utamanya adalah mahasiswa. Mereka selalu berhasil sebagai agen perubahan

karena pergerakannya selalu murni, belum terpengaruh kepentingan apapun.

"Pergerakan murni tersebut dikarenakan mereka senantiasa bergerak dengan semangat karakter bangsa, antara lain jiwa patriot, semangat persatuan dan kerja keras, pantang menyerah," kata Indro Gutomo, saat menjadi narasumber 'Sarasehan Kehumasan MPR, Menyapa Sahabat Kebangsaan' di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Jum'at (05/05/2023).

Sarasehan bertema: 'Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Karakter Bangsa' itu diikuti oleh 125 mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari berbagai fakultas, dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah. Selain Indro Gutomo, juga menjadi narasumber adalah Radmira Dawam, SH., MH., dari Universitas Muhammadiyah Babel.

Tampak hadir, antara lain: Wakil Rektor I Dr. Pratiwi Amelia, M.Pd, BI.; Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI, Fauziah, SE.,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MM.; para dosen Unmuh Babel.

Lebih lanjut, Indro Gutomo menegaskan, mahasiswa perlu mengantisipasi efek negatif globalisasi, seperti narkoba, pergaulan bebas, radikalisme, dan sikap individualistis. “Efek negatif ini akan menggerus karakter bangsa,” imbuhnya. Untuk menghadapi hal ini, Indro Gutomo mengingatkan mahasiswa akan pentingnya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional.

Menurut Indro Gutomo, untuk melaksanakan pembangunan kembali karakter bangsa ini maka perlu kerjasama yang baik antara mahasiswa sebagai generasi penerus dan seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali lembaga MPR RI.

Apa peran MPR RI dalam membangun karakter bangsa? MPR RI, kata Indro Gutomo, berperan melalui tugas yang dimilikinya. Salah satunya adalah pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Ke-empat pilar ini merupakan nilai-nilai luhur, sumber karakter bangsa Indonesia,” ujarnya.

Peran MPR lainnya adalah MPR RI pernah mengeluarkan Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tap ini berisi rekomendasi kepada seluruh penyelenggara negara dan masyarakat untuk senantiasa mengedepankan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Apa peran mahasiswa dalam membangun karakter bangsa? Menurut Indro Gutomo, peran kongkret mahasiswa dalam pembangunan karakter bangsa ini dapat dilakukan dengan mengombinasikan dan senantiasa mengasah tiga kecerdasan. Yaitu: *Pertama*, kecerdasan spiritual, di mana mahasiswa diharapkan selalu menjaga ibadah. *Kedua*, kecerdasan intelektual, dan, *ketiga*, kecerdasan emosional yang dapat dilakukan melalui aktifitas penyaluran bakat, seni budaya, dan juga olahraga.

“Dengan modal tiga kecerdasan tersebut mahasiswa akan menjadi SDM yang tangguh dan tidak mudah goyah, mampu menghadapi bahaya disintegrasi,” papar Indro Gutomo.

Sementara Radmida Dawam., SH., MH., dalam paparannya menyatakan, Indonesia terdiri dari berbagai pulau, yang hampir semua daerah punya hukum adatnya masing-masing. “Apabila persatuan tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi perpecahan sehingga akan membahayakan NKRI,” ungkap Radmida lebih lanjut, “Di sinilah pentingnya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan akan menumbuhkan jiwa persatuan. Jiwa persatuan akan mencegah terjadi perpecahan bangsa Indonesia.”

Selanjutnya, Radmida Dawam mengingatkan kepada seluruh mahasiswa agar senantiasa menjaga sikap jujur, kerja keras, serta mengasah tiga kecerdasan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Indro Gutomo.

Sebagai tenaga pengajar di Unmuh Babel, Radmida menjelaskan bahwa kampus Unmuh Babel sangat terbuka dan menghargai perbedaan. Di sini, katanya, wawasan nusantara merupakan kurikulum wajib. Hal ini dikarenakan sejarah telah membuktikan bahwa Muhammadiyah berperan besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia, serta menyatukan perbedaan antara agama dan nasionalis.

Kontribusi kami, tandas Radmida Dawam, didasarkan bahwa Muhammadiyah memiliki prinsip ke-indonesiaan melalui konsep Darul Ahdi Wa Syahadah, artinya Muhammadiyah dan umat Islam sebagai kekuatan mayoritas memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. □



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



## Lomba MTQ Korpri MPR/DPR/DPD Kafilah MPR RI Raih 3 Gelar Juara

**K**EJUARAAN atau lomba MTQ yang diselenggarakan bersama tiga instansi, yakni: KORPRI Setjen DPR RI, MPR RI, dan DPD RI yang berlangsung di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ditutup pada Kamis (13/4/2023).

Perlombaan MTQ ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari ASN, TA, SAA dan karyawan lainnya di lingkungan Setjen DPR/MPR/DPD RI untuk kategori tilawah dan tartil Alqur'an, serta da'i dan da'iyah.

Dalam itu, kafilah MPR RI berhasil meraih tiga juara kategori lomba, yakni: Juara 2 Daiyah diraih Raidha, Juara 3 Daiyah diraih Neynah, dan Juara Harapan Tilawah Quran diraih Hidayati.

Selain pengumuman dan pembagian hadiah untuk para juara, dalam kesempatan ini juga dilakukan Santunan Anak Yatim dan Dhuafa. □



DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Selasar Lobi Nusantara IV dan V Jadi Ajang Bazar Ramadan 1444 H



**S**ELASAR lobi Gedung Nusantara dan Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat bulan suci Ramadan rutin menggelar Bazar Ramadan. Penyelenggara bisanya bergantian antara Setjen MPR, DPR atau DPD.

Di momen Ramadan 1444 H /2023, Bazar Ramadan tetap dilaksanakan. Giliran pertama, Bazar Ramadan digelar oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI dengan tema 'Bazar Ramadan Murah Pisan'.

Pt. Deputi Bidang Administasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., turut hadir bersama Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir dalam pembukaan yang berlangsung secara resmi, pada 10 April 2023.

Setelah pembukaan, para pegawai di lingkungan parlemen, langsung menyerbu berbagai stan yang ada sebagian besar stan busana muslim, seperti baju koko, gamis, mukena, sarung, dan sebagainya dengan harga yang sangat terjangkau.

Selang dua hari, yakni 12 April 2023, giliran Korpri Setjen MPR menggelar Bazar Murah Ramadan 2023.

Berbagai stan yang mengisi bazar tersebut terbilang lengkap, seperti stan kuliner berbagai jenis yang tentu sangat menggugah selera, dan segala pemak-pernik kebutuhan Ramadan hingga lebaran. □

DER

## Halal bi Halal dan Pelepasan Pegawai Setjen MPR

# Ma'ruf Cahyono: Jalinan Silaturahmi Harus Semakin Baik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI gelar acara 'Halal Bihalal dan Pelepasan Pegawai Setjen MPR', di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2023.

Hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono SH., MH.; Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; para pejabat eselon II, III dan IV; beberapa mantan Sesjen MPR, Dr. Rahimullah SH., M.Si, dan Drs. Eddie Siregar, M.Si.; serta para pegawai dan para purnabakti di lingkungan Setjen MPR.

Dalam sambutannya, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan para pegawai dan para purnabakti untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna memenuhi undangan acara tersebut.

Acara yang digelar mulai pukul 10.30 WIB, menurut Ma'ruf, perlu dimaknai sebagai satu niat bersama untuk bersilaturahmi, mempererat hubungan satu sama lain. "Saya yakin bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadir di sini dilatarbelakangi adanya satu kerinduan untuk mengulang kebersamaan," katanya.

Dari niat tersebut, lanjutnya, maka kegiatan itu tidak hanya sebagai forum silaturahmi, namun sebagai cara untuk menyatukan pikiran

dan perasaan tentang lembaga Setjen MPR ini. Ma'ruf Cahyono berharap, dalam acara itu semua membuka perasaan yang sama untuk terus-menerus berpikir agar Setjen MPR ke depan semakin berkualitas, menjadi lembaga yang semakin profesional, untuk memberikan layanan kepada MPR.

Dalam momen itu, secara resmi dilakukan prosesi pelepasan pegawai yang telah memasuki purnabakti. Pelepasan pegawai, menurut Ma'ruf Cahyono, merupakan aktivitas seremonial yang secara resmi pegawai tersebut telah memasuki purnabakti, usia pensiun. "Beliau dilepas melalui prosesi seperti mereka saat diterima menjadi calon-PNS dan dilantik jadi PNS," ungkap dia.

Meski demikian, Ma'ruf mengajak semua bahwa prosesi tersebut sebenarnya lebih dari itu. Prosesi pelepasan dikatakan sebagai satu penghormatan dari seluruh keluarga besar Setjen MPR bahwa para pegawai yang memasuki purnabakti akan memasuki ruang dan wadah yang baru.

"Harapannya tentu mudah-mudahan semangatnya lebih dari semangat yang ada, karena ruang dan wadah yang baru punya warna, situasi, dan kondisi yang berbeda dengan lingkungan Setjen MPR", ujarnya.

Setelah menjalani masa pengabdian yang cukup lama, orientasi, dan paripurna, Ma'ruf Cahyono berharap, mudah-mudahan semua sudah dipersiapkan dengan baik dan ditempat pengabdian yang baru bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Pengabdian yang telah dilakukan diharap menjadi satu kebanggaan. "Capaian terhadap selesainya semua perjalanan karier dan yang lebih penting adalah itu semua merupakan ibadah dalam pengabdian sebagai ASN," harapnya.

Di akhir sambutan, Ma'ruf Cahyono berharap, jalinan silaturahmi yang sudah terbangun kuat selama bekerja, pengabdian, untuk tidak luntur, berkurang, namun semakin baik. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M. Nasir Djamil**, Anggota MPR Fraksi PKS

## Kita Dorong Pemerintah dan DPR Membahas RUU Perampasan Aset

**D**ALAM waktu tak lama lagi, pemerintah bersama DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). Ini ditandai dengan dikirimkannya Surat Presiden (Surpres) RUU Perampasan Aset bernomor R 22-Pres-05-2023 yang disampaikan pada 4 Mei untuk dibahas bersama DPR. "Surat presiden kepada DPR sudah dikirim," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat, 5 Mei 2023.

Untuk membahas RUU Perampasan Aset, Presiden telah menugaskan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk mengawal RUU tersebut bersama DPR. Mahfud berharap, DPR bisa langsung membahas RUU Perampasan Aset di masa sidang usai reses. RUU ini nantinya bisa menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

RUU Perampasan Aset menjadi perbincangan saat Mahfud MD mengungkapkan

transaksi janggal Rp 349 triliun dalam Rapat Kerja dengan DPR pada 29 Maret 2023. Mahfud meminta DPR untuk mendukung dan mengesahkan RUU tersebut. Sebenarnya, RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023, namun tak kunjung dibahas. Lebih jauh lagi, draf RUU Perampasan Aset sesungguhnya sudah ada sejak 2015. Dalam RUU ini, aset-aset berupa kendaraan, property, serta harta benda lainnya, menjadi objek yang mampu dirampas negara jika diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana atau kejahatan.

Untuk mengetahui lebih jauh soal RUU Perampasan Aset, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil beberapa waktu lalu setelah ramai RUU Perampasan Aset diperbincangkan dan dibahas dalam sebuah forum diskusi usai Rapat Kerja DPR RI dengan Menko Polhukam (sebelum Presiden menandatangani Surpres RUU

Perampasan Aset). Berikut penuturan Nasir Djamil yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.

**RUU Perampasan Aset kembali menjadi perbincangan. Bagaimana posisi RUU Perampasan Aset ini di DPR saat ini, apakah draf RUU ini sudah masuk ke DPR?**

RUU Perampasan Aset ini kembali muncul ketika kasus pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta kekayaan yang disebut-sebut mengalahkan harta Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. Kasus Rafael mengingatkan orang terkait dengan UU, yaitu RUU Perampasan Aset. Secara kasat mata, perampasan aset berarti hartanya dirampas. Tetapi Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, merampas aset itu juga dengan cara-cara hukum bukan dengan cara-cara di luar hukum. Kalau ada perampasan aset maka perampasan itu dilakukan melalui proses penegakan hukum.

Kalau RUU Perampasan Aset sudah

masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) maka tentu sudah ada naskah akademik dan draf-nya. Untuk masuk dalam Prolegnas, syaratnya adalah ada naskah akademik dan draf RUU. Kalau belum ada naskah akademik dan draf-nya maka belum bisa masuk dalam program legislasi nasional. Yang saya tahu, naskah akademik sudah banyak beredar, tetapi naskah RUU Perampasan Aset belum saya dapatkan secara resmi.

**Sebenarnya naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset ini sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Kemudian RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2023. Mengapa RUU Perampasan Aset itu belum dibahas pemerintah bersama DPR?**

Seingat saya, pada tahun 2022, tepatnya September 2022, kita juga sudah membicarakan soal RUU ini. Namun, perjalanan RUU Perampasan Aset ini berjalan lambat. RUU ini adalah RUU inisiatif dari pemerintah. Tapi, perjalanan RUU sangat lambat sekali. Bisa jadi, faktor keterlambatan itu soal kekhawatiran ada komplikasi hukum dalam penerapannya. Sebab, selama ini memang sudah ada penegakan hukum melalui instrument undang-undang terkait bagaimana negara mencegah dan menyelamatkan bahkan mengambil aset-aset dari kejahatan, baik kejahatan khusus maupun kejahatan umum.

Kekhawatiran itu tentu bisa dipahami karena jangan sampai kemudian pranata hukum berupa perampasan aset ini nanti tidak sejalan dengan, katakanlah UU TPPU, kemudian juga norma yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut.

Tapi, saya berharap agar pemerintah bisa segera membahasnya bersama DPR agar kemudian ada titik terang seperti apa sebenarnya kita menginginkan dari RUU ini, seperti apa sebenarnya arah dari RUU ini. Jadi jangan sampai kemudian ada kebingungan di tengah publik terkait dengan nasib RUU Perampasan Aset ini.

Jadi, kita mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU ini. Bagaimana nanti perjalanan pembahasan RUU ini, nanti kita bisa lihat. Yang pasti, jangan sampai rakyat kemudian bertanya-tanya dan kemudian sedikit bingung terkait dengan apa yang dimaksud negara ini dengan

perampasan aset.

**Apa yang diatur dalam RUU Perampasan Aset ini?**

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi, atau terorisme, atau kejahatan-kejahatan lainnya, yang di situ ada potensi penggelapan aset, maka sebenarnya RUU ini sangat strategis kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang. Kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dan, itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak.

KPK, misalnya, kemudian kejaksaan, kepolisian, itu berlomba-lomba bagaimana



caranya melakukan apa yang disebut dengan recovery asset. Bahkan, ada tim waktu itu, seingat saya, di Kejaksaan untuk melacak, bukan hanya melacak para buron yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tapi juga melacak aset-aset para buron Tipikor tersebut. Mereka (Kejaksaan) bisa jalan kemana-mana untuk melacak aset-aset yang dimiliki oleh para buron yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi.

Soal RUU Perampasan Aset ini, bagi saya, sederhana saja logikanya, bahwa yang punya aset adalah orang yang punya kuasa. Orang yang berkuasa punya potensi untuk

menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu perlu satu peraturan perundang-undangan agar kemudian orang-orang yang punya kuasa ini kemudian tidak menyalahgunakan atau menggelapkan atau mencuri aset. Aset itu bisa aset yang bergerak, bisa juga aset yang tidak bergerak. RUU ini menjadi penting karena memang kekuasaan itu harus diawasi, termasuk aset-aset yang dimiliki mereka yang punya kuasa.

**Apakah RUU Perampasan Aset bisa mengoptimalkan pengembalian aset negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana?**

Sebenarnya korupsi itu memang kejahatan yang tersembunyi. Korupsi itu kejahatan yang sulit pembuktiannya. Itu sebabnya dalam UU Tipikor, kita memberikan waktu kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dalam konteks mereka memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Karena itu, berkorelasi juga bagaimana kita menyelamatkan aset. Karena korupsi ini adalah kejahatan yang tersembunyi, maka aset-asetnya juga tersembunyi sehingga sulit dilacak. Maka, ada instrument TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), ada norma yang mengatur soal pembuktian terbalik. Kita harapkan memang RUU Perampasan Aset itu juga paralel dan selaras dengan upaya-upaya mengembalikan atau mendapatkan kembali aset-aset negara yang diambil pelaku kejahatan tersebut.

**Apa harapan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset ini?**

Paling tidak, kita punya instrument hukum untuk menjaga dan kemudian mengembalikan negara berwujud dari aset-aset yang tidak jelas juntrungannya, dan aset-aset yang diambil oleh pelaku-pelaku kejahatan. Dan, itu bagi saya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.

Mengatur aset pada dasarnya adalah mengatur kekuasaan. Kekuasaan itu harus diatur dan dibatasi, dan harus diawasi. Mudah-mudahan RUU Perampasan Aset ini tidak dimaksud untuk mengancam kepemilikan seorang warga negara, tapi ini adalah bagian untuk kemudian mengembalikan aset-aset yang disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kuasa. Aset dan kekuasaan seperti dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. □

# Berbagi Berkah di Bulan Ramadan

*Itu Indah*

**NGRID Maria Palupi Kansil** atau biasa disapa Ingrid Kansil, istri Pimpinan MPR Prof. Sjarifuddin Hasan, bersama para istri Pimpinan MPRI lainnya, yakni: Ibu Lenny Bamsoet, Ibu Iva Ahmad Basarah, Ibu Himatul Ahmad Muzani, Ibu Chalimatus Jazilul Fawaid, Ibu Diana Hidayat Nur Wahid, Ibu Sukma Arsul Sani, dan Ibu Ratu Zakiyah Yandri Susanto, Rabu (29/3/2023) memberikan bingkisan Ramadan kepada PPNPN, Pamdal, dan tenaga cleaning service yang bertugas di lingkungan MPR RI.

Menurut mantan artis, model, pembawa acara, dan politisi kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 1976, ini bulan Ramadan adalah momen paling tepat untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

"Alhamdulillah di bulan berkah ini saya bersama para rekan-rekan, istri Pimpinan MPR, dapat berbagi kebahagiaan. Momen ini sangat indah," ujar artis yang mengawali karir keartisaninya sejak 1995 di sinetron 'Deru Debu' ini. □

DER



*Ingrid Kansil*



## Belajar dari *Habib Luthfi* Menyikapi Perbedaan

**A**RTIS cantik **Cornelia Agatha** ternyata sangat mengagumi seorang ulama besar Habib Luthfi. Kekaguman artis beragama Nasrani ini bukan tanpa alasan. Dalam unggahan di akun media sosialnya, artis pemeran sosok Sarah dalam sinetron dan film layar lebar 'Si Doel Anak Sekolahan' ini mencurahkan isi hatinya saat berkesempatan bertemu dengan Habib Luthfi.

Dalam pertemuan dengan Habib Luthfi, artis kelahiran Bogor, 11 Januari 1973, ini terlihat mengenakan kaftan berwarna hitam, sementara Habib Luthfi tampak duduk bersila dengan pakaian koko berwarna kuning.

"Setelah sekian lama mengagumi beliau, tak bisa saya bendung air mata ketika bisa berhadapan dan mendengarkan semua perkataannya yang teduh," ungkap artis yang bernama lengkap Cornelia Agatha Dahlia Maramis. Dia, sangat mengagumi pandangannya tentang bagaimana menyikapi perbedaan dan menciptakan kedamaian antarmanusia. Sejuk," ujarnya. □

DER



*Cornelia "Sarah" Agatha*



*Ustaz Shamsi Ali*

## Persatuan dalam Islam Bukan Penyamaan

**U**STAZ H. Muhammad Syamsi Ali, 56, Imam Islamic Center of New York, Amerika Serikat, merespon fenomena terjadinya perbedaan Idul Fitri. Di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya, tahun ini dirayakan berbeda, 21 April dan 22 April.

Menurut Imam kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang telah bermukim di Amerika Serikat selama 30 tahun ini, umat Islam di USA sendiri merayakan Idul Fitri pada 21 April 2023. Menurutnya, perbedaan tersebut bukanlah hal yang perlu dibesarkan.

"Persatuan dalam Islam itu bukan penyamaan atau *unity is not about uniformity*. Maka saya ajak saudara-saudaraku umat Islam di Indonesia untuk bersatu, walaupun dalam perbedaan. Berbeda bukan berarti harus berpecah belah," ujarnya, Kamis (20/4/2023). □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Lebaran Ketupat di Gorontalo Dari Balapan Sapi Hingga Panjat Pinang

**P**ERAYAAN Idul Fitri Tahun 1443 Hijriyah sudah berlalu. Para pemudik yang merayakan lebaran di kampung halaman pun telah kembali ke korta, tempat mereka bekerja. Banyak kenangan yang diperoleh para pemudik dalam perayaan lebaran tahun ini, tak terkecuali masyarakat Gorontalo yang tinggal di perantauan.

Sebagai provinsi berpenduduk mayoritas muslim, Gorontalo memiliki keunikan tersendiri saat perayaan Idul Fitri, terlebih saat Lebaran Ketupat. Pada hari Lebaran Ketupat, suasana di seantero Gorontalo terlihat berbeda dari hari biasanya. Sejak pagi, Sabtu (29/4/2023), gairah masyarakat merayakan Lebaran Ketupat sangat terasa.

Di mana-mana terlihat bentor hilir mudik, banyak sekali penumpang yang menggunakan jasanya. Terlebih lagi di beberapa titik yang akan menjadi pusat kerumunan sudah terlihat ramai. Banyak pedagang yang telah menjajakan dagangannya. Tak mau kalah dengan para pedagang, penjaja jasa parkir pun sudah berada di lapaknya. Padahal, pengendara

yang akan memarkir kendaraannya belum terlihat ramai.

Berbeda lagi pemandangan di beberapa tempat ibadah. Masjid Al Muttaqin Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, salah satunya. Di tempat ini, ulama, tokoh masyarakat dan para jamaah telah berkerumun. Mereka sedang menggelar doa ketupat. Yaitu, doa bersama dipanjatkan warga masyarakat bersama para ulama dan tokoh masyarakat. Melalui doa ketupat, masyarakat meminta kepada Allah SWT., agar memberikan, kelancaran, keselamatan, dan keamanan, khususnya keselamatan dan keamanan Lebaran Ketupat 1444 H.

Acara Lebaran Ketupat ini dihadiri Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Wakil Bupati Gorontalo Hendra S. Hemeto, ST., M.Si., beserta tokoh masyarakat dan sejumlah jamaah. Wakil Ketua MPR didaulat melakukan pemukulan bedug sebagai penanda dimulainya prosesi Lebaran Ketupat tahun 2023. Prosesi doa ketupat itu diakhiri dengan makan bersama, diikuti Wakil Ketua MPR, tamu undangan, ulama, serta

tokoh masyarakat dan para jamaah.

Pada kesempatan itu, Fadel Muhammad mengapresiasi semangat masyarakat bersilaturahmi. Karena silaturahmi bisa berdampak positif pada keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Semakin sering melakukan silaturahmi, potensi pertengkaran dan kerusuhan bisa terus ditekan.

“Silaturahmi pada Lebaran Ketupat harus terus ditumbuhkan, bukan hanya pada Idul Fitri, tetapi juga pada bulan-bulan selanjutnya. Kalau itu dilakukan, akan memacu kerukunan masyarakat yang semakin baik, mengurangi gesekan akibat hal-hal yang tidak penting,” ujar Fadel Muhammad.

Fadel merasa bangga dan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Lebaran Ketupat tahun 2023. Karena selama pandemi, kegiatan tersebut dihentikan, sesuai arahan pemerintah. Tetapi, tahun ini kembali digelar sebagaimana sebelum pandemi berlangsung.

“Ini adalah tradisi baik yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

harus dilestarikan. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga dan merawatnya, dan ditahun-tahun yang akan datang pelaksanaannya akan semakin baik," harap Fadel.

Selain prosesi do'a ketupat, mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu juga menyaksikan lomba balap kuda dan pacuan sapi. Acara tersebut digelar di Lapangan Golf dan Pacuan Kuda Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Lomba pacuan kuda dan sapi ini merupakan salah satu rangkaian acara Lebaran Ketupat di Gorontalo yang paling populer, yang mampu mengundang perhatian dari masyarakat, dibanding kegiatan lain.

Lomba ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo. Para peserta menyiapkan kuda dan sapi yang akan diikutsertakan dalam lomba jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga saat lomba

berlangsung kuda dan sapi yang ikut berlomba terlihat begitu gagah. Bukan hanya karena fisiknya bagus, tetapi juga tenaganya sangat kuat.

Lomba pacuan kuda dan karapan sapi ini sudah berlangsung sejak lama. Awalnya kegiatan ini diadakan sekedar mengisi waktu luang. Bingung mengisi waktu, masyarakat sepakat mengadu kecepatan berlari kuda dan sapi yang mereka miliki. Setelah kegiatan ini berulang kali dilaksanakan, masyarakatpun sepakat menjadikan lomba pacu kuda dan karapan sapi itu sebagai acara tetap pada Perayaan Lebaran Ketupat.

### Panjat Pinang

Bagi siapapun, Lebaran Ketupat di Gorontalo pasti meninggalkan kesan sangat mendalam. Karena kekerabatan dan keramahan masyarakatnya sangat terasa. Hal itu bisa dilihat, salah satunya contohnya,

pada hari itu banyak warga masyarakat membiarkan pintu rumahnya terbuka. Mereka menyiapkan hidangan ketupat untuk disantap oleh siapapun, terutama bagi yang berkenan mampir ke rumahnya.

Suasana tersebut terasa semakin hangat karena masyarakat menggelar berbagai lomba tradisional, diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga kaum perempuan. Lomba yang diadakan itu layaknya kegiatan Agustusan yang diselenggarakan oleh masyarakat Pulau Jawa dalam memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Seperti lomba balap karung, kelereng, panjat pinang, layang-layang hias, hingga tarik tambang. Bahkan, lomba tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa hari sebelum puncak acara Lebaran Ketupat.

Selain itu, di setiap kampung pasti diadakan kegiatan halal bi halal. Acara ini diselenggarakan oleh generasi muda dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Berbagai atraksi kesenian dipertunjukkan pada acara tersebut. Dan, itu menambah kekerabatan di antara para warga.

Untuk membiayai semua kegiatan tersebut tak jarang generasi muda meminta bantuan masyarakat yang melewati jalan-jalan di Gorontalo. Sehingga praktis, beberapa hari sebelum puncak Lebaran Ketupat, banyak warga meminta sumbangan. Dan, itu terjadi hampir di seluruh kawasan Gorontalo, sekaligus sebagai penanda bahwa masyarakat akan menggelar hajatan Lebaran Ketupat. □

MBO



KH. Ir. Abdul Hakim, MM.

# Cita-Citanya Guru, Malah Sukses Jadi Politikus



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

LEBARAN tahun 1444 H. telah berlalu. Lebaran kali ini adalah Idul Fitri terakhir sebelum digelar pemilihan umum 14 Februari 2024. Sebagaimana lazimnya hari raya maka pada tahun ini pun banyak orang yang memanfaatkan hadirmya hari raya untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, tak terkecuali KH. Ir. Abdul Hakim, MM., Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Kelompok DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Lampung.

Kegiatan bagi-bagi kebahagiaan dengan masyarakat yang telah dilakukan Abdul Hakim selama bulan puasa. Artinya, selama satu bulan berpuasa Abdul Hakim membagikan sebagian kebahagiaannya kepada orang lain. Tak terkecuali kepada konsituennya di Provinsi Lampung.

"Buat saya, puasa dan lebaran adalah kesempatan untuk berbagi, juga peluang untuk membahagiakan masyarakat. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik, dan saya akan maju lagi pada pemilu yang akan datang. Karena itu, praktis pertemuan di dapil makin banyak saya lakukan. Termasuk untuk acara-acara yang sifatnya syiar Ramadan," kata Abdul Hakim kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Sebagai incumbent suami dari **Dra. Nana Nasilah** ini mengakui, kerja-kerja sosialisasi yang dia lakukan menjadi relative lebih ringan. Karena kegiatan tersebut bisa dilakukan sembari melaksanakan tugas konstitusional. Di sela-sela waktu itulah ayah empat anak ini membangun relasi ke masyarakat dengan berbagai ragam komunitas. Mulai dari petani, pedagang, buruh hingga ibu-ibu rumah tangga.

"Sebagian waktu saya itu, saya amalkan menjadi mubaligh,

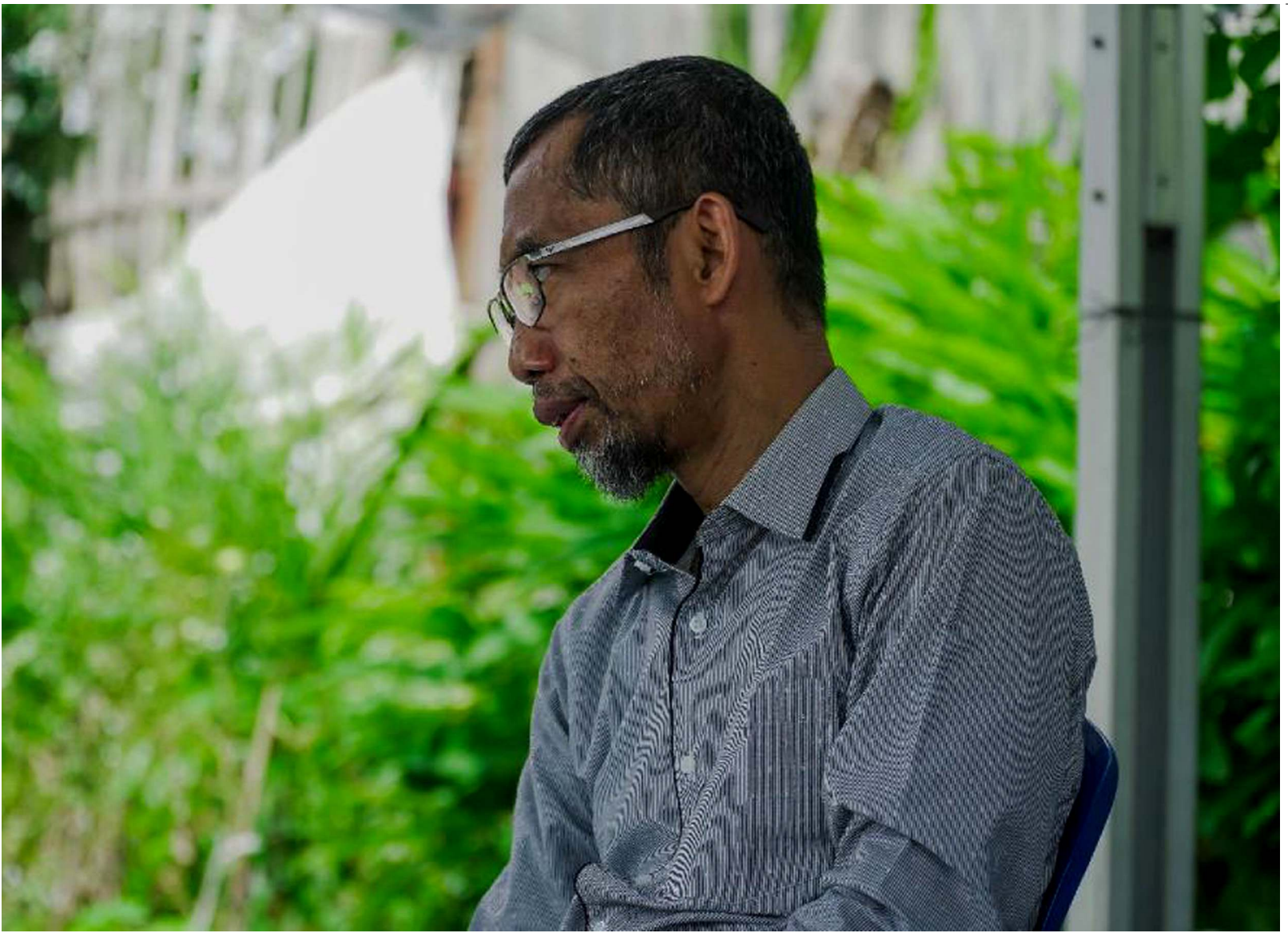
menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi pada bulan Ramadan, kesempatan berdakwah dan bertemu dengan konsituen sangat banyak. Mulai dari menjadi khotib Jumat, memberikan kultum pada acara buka bersama, tausiyah saat taraweh, hingga pengajian subuh," kata Abdul Hakim lagi.

Karena itu, Hakim cukup optimistis dalam menghadapi kontestasi pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2024 nanti. Tetapi ia juga tidak mau takabur dan terus meningkatkan hubungan dengan konsituennya. Terlebih selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Bagi pria Kelahiran Pandeglang, 4 September 1963, ini Idul Fitri adalah hari yang penuh kenangan. Apalagi jika dikaitkan dengan tugas yang dibebankan orangtuanya pada hari-hari jelang Idul Fitri. Meski tidak mudah, dia harus membanting tulang membantu orangtuanya menggembala kerbau jelang Idul Fitri, tapi semua itu membuahkan kesenangan di akhirnya.

"Dulu, bapak saya adalah pedagang daging musiman. Beliau berdagang daging kerbau pada Hari Raya Idul Fitri. Beliau menjadi pedagang sekaligus karena ingin membantu masyarakat. Beliau memakai sistem pembayaran yang bisa dicicil, sehingga sangat membantu masyarakat," kata Abdul Hakim mengenang kegiatannya pada Idul Fitri dulu.

Oleh orangtuanya, Abdul Hakim diberi tugas memelihara kerbau sebelum dipotong. Ia harus menggembala dan mencari pakan untuk kerbau. Pekerjaan tersebut tidak mudah, tetapi sangat menyenangkan, karena setelah pekerjaan itu selesai, ia akan mendapat hadiah dari orangtuanya.



## UU Desa

Abdul Hakim merupakan politisi yang pilih tanding. Ia sudah mengenyam berbagai pengalaman dalam percaturan dunia politik. Dia memiliki jam terbang yang panjang di ranah lembaga legislative, termasuk ketika ikut membidani lahirnya Partai Keadilan di Provinsi Lampung. Ia juga sempat mencoba terjun merengkuh kursi kekuasaan eksekutif, tetapi masih terjegal.

Keterlibatan Abdul Hakim dalam dunia politik sudah terjadi semasa masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus, yang di belakang hari turut menginisiasi lahirnya Partai Keadilan (PK). Selama itu, ia mengikuti berbagai pengkaderan dan pelatihan, yang bermanfaat dalam mengasah kemampuan kepemimpinannya.

“Saya sempat memegang amanah menjadi Ketua DPW Partai



Keadilan di Lampung. Setelah berganti nama, saya juga dipercaya memegang kendali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung,” ujar Abdul Hakim.

Bersama PKS, Hakim menemukan banyak cerita sukses. Bersama PKS, ia menyusuri cerita-cerita indah serta keberhasilannya dalam dunia politik. Sampai akhirnya ia merasa cukup dan memberi kesempatan kepada kader PKS lain untuk meneruskan tongkat estafet. Sedangkan Hakim sendiri mengambil risiko berganti panggung politik, menjadi anggota DPD. Tahun 2024 nanti, Abdul Hakim akan mencoba peruntungannya di Lembaga Dewan Perwakilan Daerah untuk kali ke dua.

“PKS itu partai kader, karena itu saya harus sadar perlu regenerasi dan pergantian untuk memastikan terjadinya keberlangsungan pengkaderan. Karena itu, setelah gagal pada pilkada Kota Metro saya mundur untuk digantikan oleh kader-kader lain yang lebih muda,” ujar Abdul Hakim

Sebagai anggota DPD, Abdul Hakim mengajak pihak-pihak yang berbeda pendapat soal masa jabatan Kepala Desa untuk menghentikan perdebatannya. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan perkara nomor 15/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu selama 18



FOTO-FOTO: ISTEMEWA

tahun. Hakim menegaskan bahwa putusan MK berlaku mutlak dan mengikat. Karena itu, semua pihak harus menghormati dan menjalankan putusan tersebut

Menurut Abdul Hakim, masa jabatan kepala desa selama 18 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masih relevan untuk diteruskan. Apalagi kalau kepala desanya bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Sayangnya, masih banyak kepala desa yang tidak memiliki kesiapan untuk memimpin. Bahkan, tidak sedikit yang kompetensinya lemah sehingga tidak memiliki kecakapan untuk menjadi pemimpin.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Mulanya berlomba-lomba menjadi kepala desa, tetapi ketika jabatan itu diraih, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam membantu masyarakat menyelesaikan problema warga. Mereka hanya tertarik dengan anggaran dari dana desa,” kata Abdul Hakim lagi.

Sekarang itu, kata Abdul Hakim, salah satu problem pembangunan desa ada pada sumber daya manusia. Bukan lamanya mereka memimpin. Berapapun periode kepemimpinan yang diberikan tidak akan efektif ketika mereka tidak memiliki kesiapan, serta kapasitas untuk menjadi pemimpin. Dan, itulah persoalan mendasarnya.

Terbukti, di beberapa tempat terdapat raja-raja kecil yang tidak optimal membangun masyarakat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengotimalkan potensi yang semestinya bisa turut



memberdayakan masyarakat, seperti Badan Perwakilan Desa. Padahal, seharusnya Badan Perwakilan Desa bisa menjadi partner dalam membuat kebijakan dan peraturan desa. Tetapi, di beberapa desa, mereka malah *one man show* tidak ada keterlibatan dan hanya sekedar formalitas,

## Menjadi Guru

Hingga kini Abdul Hakim sudah lebih dari 20 tahun berkubang dalam dunia politik. Tapi, sesungguhnya dia tak pernah bercita-cita untuk menjadi politisi. Sejak kecil ia ingin terus menjadi guru, sebagaimana pekerjaan yang sempat ia jalani, sebelum akhirnya berhenti dan putar haluan menggeluti dunia politik. Sebelum terjun ke politik, Hakim sempat menjadi guru di SMA, dosen hingga Pimpinan Pondok Pesantren.

Karena itu, sekalipun dunia politik sudah menggelembungkan namanya, namun Hakim tak pernah bisa lepas dengan kecintaannya terhadap dunia pendidikan. Dan, itu membuatnya selalu sadar untuk bersikap ikhlas menerima, karena terkadang apa yang diharapkan hanya akan menjadi sebuah angan, bukan kenyataan.

“Saya ini senang jadi seorang guru, dan saya merasa bakat saya jadi guru. Sejak kecil, bahkan waktu duduk di bangku sekolah dasar, saya suka mengajari kawan-kawan. Misalnya, ada yang kesulitan pelajaran matematika, saya mengajari mereka. Dengan begitu saya merasa senang karena bisa berbagi. Dan, sejak kecil saya sudah bercita-cita menjadi guru,” pungkasnya. □

MBO

## Biodata

Nama : **KH. Ir. Abdul Hakim, MM.**  
Tempat/Tg. Lahir : Pandeglang, 4 September 1963

### Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri Pandeglang, 1970-1975
- SMP Negeri 1 Pandeglang, 1975-1979
- SMA Negeri Pandeglang, 1979-1982
- S1 Fakultas Pertanian UNILA, 1982-1987
- S2 Fakultas Ekonomi UNILA, 2000-2002

### Pengalaman Organisasi:

- Ketua DPW PK Lampung, 1989-2000
- Pengurus GNI Lampung, 1989
- Ketua BKPRMI Lampung, 1989
- Dewan Penasihat Dewan Dakwah Lampung, 1999-sekarang
- Pendiri Yayasan Daarul Hikmah

### Riyat Pekerjaan:

- Guru SMA Muhammadiyah, 1989-1991
- Dosen UML, 1991-1992
- Direktur Ponpes Daarul Hikmah, 1989-Sekarang
- Staf pengajar UNILA, 1988
- Anggota DPRD Provinsi Lampung, 1999-2004
- Anggota DPR RI periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019
- Anggota DPD RI periode 2019-2024

## Ulama Sebagai Penjaga Pancasila

**U**LAMA berasal dari bahasa arab *alim*, artinya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Ulama memiliki peran yang sangat penting. Pertama, berdasarkan bobot keilmuannya maka para ulama sudah sepatasnya sebagai pencerah alam pikir umat. Kedua, ulama adalah panutan umat dalam artian dibutuhkan sebagai teladan moral yang diajarkan dan dicontohkan kepada masyarakat.

Hal terpenting dari para pendiri bangsa adalah para ulama dari Muhammadiyah dan NU serta ormas Islam lainnya yang ikut aktif terlibat dalam perumusan pondasi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945),

Oleh karena itu pembentukan Pancasila tidak mungkin mengabaikan aturan Islam, karena para perumusannya terdiri dari ulama dan tokoh-tokoh yang pemahaman agamanya sangat tinggi.

Pancasila tidak ada pertentangan antara agama satu dengan agama lainnya. Sila I tentang Ketuhanan yang Maha Esa, bagi umat Islam artinya berhubungan dengan tauhid. Rumusan ini adalah peran dari para ulama yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), seperti Agus Salim, Kahar Muzakir, Maria Ulfa Santoso, Kasman Singodimejo, dan Wahid Hasyim.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun

1945 dan Pancasila, yang bersumber dari agama Islam, seperti musyawarah (*syura*), keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kepercayaan (*al-amanah*), tanggungjawab (*al-musuliyah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) adalah sumbangsih terbesar para ulama.

Penguatan dan pengembangan demokrasi Pancasila bukan hanya tugas negara. Penguatan demokrasi Pancasila juga menjadi tanggungjawab bersama, khususnya para ulama dari berbagai ormas Islam untuk bergerak bersama-sama mengembangkan nilai-nilai Pancasila sehingga penafsiran tentang demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya dimonopoli oleh negara. Seyogyanya penguatan demokrasi Pancasila ditunjukkan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Peran ulama yang sangat penting di era ini adalah menggerakkan komunitas keagamaan dalam *majelis taklim*, dari gerakan keagamaan menjadi gerakan ekonomi umat. Gerakan keagamaan ini menjadi fondasi pengembangan ekonomi umat yang sangat strategis seiring dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, yang bersumber pada ajaran agama.

Dalam konteks ini maka penting kiranya para ulama dan kalangan pondok pesantren diberikan perhatian khusus dalam rangka pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi. Konkretnya pondok pesantren yang dikelola para ulama seyogyanya diberikan akses permodalan, pendampingan manajemen produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.



Oleh:  
**Ir. Mohamad Idris Laena, MH.**  
Ketua Fraksi Golkar di MPR RI



Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama *Philosofische Grondslag*, di mana Pancasila dilihat sebagai filsafah yang menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, hasil perenungan dan mengalian nilai-nilai sosiologis, antropologis, dan religiusitas yang dilakukan oleh para *founding father* dalam upaya merumuskan dasar negara. Pancasila disebut sebagai *Weltanschung*, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Hadirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud kolaborasi pikiran dan gagasan para tokoh bangsa dari berbagai golongan, salah satu yang memiliki peran penting adalah ulama sebagai representatif umat Islam.

Sejarah mencatat, lima dari anggota Panitia Sembilan Perumus Dasar Negara adalah perwakilan dari kelompok Islam yang sebagian besarnya menyandang gelar ulama. Walaupun dalam pembahasan rumusan tersebut terjadi perdebatan tentang dasar negara, apakah memilih agama (Islam) atau nasional kebangsaan.

Sebelum penetapan dasar negara pada 18 Agustus 1945, memang telah diputuskan dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, bahwa Sila I dari Pancasila berbunyi, "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun keputusan tersebut "ditolak" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Timur. Dengan lapang dada keberatan itu diterima dan para ulama yang bergabung dalam PPKI menyatakan setuju bahwa dasar negara harus

didasarkan pada paham nasional kebangsaan.

Merujuk pada sejarah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ulama sejak awal telah memiliki peran yang signifikan terhadap bangunan sejarah dan pertumbuhan nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh sebab itu tidak perlu terus-menerus mempertentangkan atau bahkan mencurigai bahwa ulama masih memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara RI. Bahkan, dalam 40-50 tahun terakhir dapat dicatat bagaimana ulama berperan dalam rangka mengharmonisasi nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam perkembangan dewasa ini bahwa ada bahaya laten yang terus mengintai bangsa dari upaya segelintir masyarakat yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain tetap harus diwaspadai.

Dalam kewaspadaan ini memang upaya untuk berdialog antara pemerintah dan para ulama harus terus dilakukan. Upaya ini sesungguhnya adalah agar pemerintah bisa lebih dekat dan mendengar aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui ulama, juga sebaliknya untuk memutus kecurigaan pemerintah bahwa ulama masih berniat mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Kekuatan partai politik sebagai instrumen politik berkomitmen menegakkan Pancasila, memiliki kewajiban mengajak semua kelompok, terutama ulama, sebagai aktor utama membangun fondasi bangsa Indonesia untuk tetap berdiri tegak menjaga dan mengawal Pancasila dan NKRI. □

## Tanpa Curiga, PPHN Tanpa Amendemen

Keinginan mengamendemen UUD NRI Tahun 1945 guna menyangkutkan dasar hukum PPHN menimbulkan kecurigaan rakyat, termasuk para politisi. Dituduh ada agenda memperpanjang masa jabatan Presiden di balik keinginan itu. Akibatnya, keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara mengalami fase pasang surut. Ada solusi menghadirkan PPHN tanpa amendemen. Solusi tersebut ditawarkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo seperti tertuang dalam buku yang ditulisnya.

**B**ELAJAR pada perjalanan Orde Baru khususnya, bangsa ini butuh arah dalam pembangunan. Arah dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan pada titik-titik yang dituju serta berkesinambungan. Hilangnya pedoman Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada era reformasi disebut sebagai masalah pada pembangunan yang berjalan saat ini. Saat ini pembangunan yang dilakukan, pola dan coraknya tergantung pada penguasa yang memegang pemerintahan dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota.

Akibat yang demikian membuat pembangunan, selain tidak berkesinambungan juga tidak memiliki arah ke depan yang pasti. Pembangunan dalam satu periode belum tentu dilanjutkan oleh penguasa berikutnya, sebab berpegang pada misi dan visi pemenang pilpres dan pilkada. Dampak yang terjadi adalah banyaknya proyek besar nasional yang mangkrak, padahal bila hal demikian dilanjutkan, manfaatnya akan terasa bagi rakyat.

Belajar pada pengalaman Orde Baru yang 'sukses' memprogram pembangunan lewat pedoman yang ada, GBHN, ditambah adanya keinginan agar pembangunan saat ini dan selanjutnya berkesinambungan meski penguasa berbeda, di MPR ada keinginan untuk menghidupkan kembali 'GBHN'. Haluan negara yang diinginkan itu disebut dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Rupanya para politisi di MPR tidak mudah untuk menyepakati keinginan ini. Berbagai alasan, mulai dari soal kedudukan hukum, pertanggungjawaban, membatasi kreasi, serta masih adanya trauma pada Orde Baru membuat keinginan itu mengalami pasang surut dan tarik ulur.

Masalah pokok dari menghidupkan kembali haluan negara adalah apakah dasar hukumnya nanti disangkutkan dalam UUD, dalam Ketetapan MPR, ataukah cukup lewat undang-undang. Di sinilah perdebatan di MPR menghangat. Ketika ada keinginan perlu mengamendemen UUD untuk meletakkan haluan negara pada konstitusi maka timbul perdebatan yang sangat kuat hingga ada tuduhan amendemen ditunggangi oleh kepentingan yang lain.

Bila lewat undang-undang hasil haluan negara tersebut bisa dijudicial review oleh pihak yang lain. Undang-undang sejenis pun juga sudah ada. Ketika lewat Ketetapan MPR, pertanyaannya adalah apakah lembaga ini masih berhak mengeluarkan ketetapan.

Intinya adalah bagaimana haluan negara memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tidak mudah diotak-atik dan direvisi.

Dari perdebatan yang ada dan masih kuatnya keinginan untuk membuat haluan negara lagi, Ketua MPR Dr. Bambang Soesatyo SH., SE., MBA., memberi solusi dari kebuntuan masalah yang ada. Solusi tersebut terungkap dalam buku yang berjudul: *PPHN Tanpa Amendemen, pemikiran analitik dasar hukum pokok-pokok haluan negara dalam menghadapi industri 5.0 dan Indonesia emas 2045*.

Buku karya Politisi Partai Golkar tersebut merupakan buku yang ke-30 dari berbagai judul yang telah diterbitkan. Buku bersampul merah dan ada foto dirinya itu dibagi dalam empat bab dengan ketebalan 340 halaman. Masing-masing bab menjelaskan secara detail tentang sejarah pembangunan, pembangunan, dan politik pembangunan. Tak hanya itu, di buku ini juga ada kupasan mengenai perbandingan rencana pembangunan dengan Jepang, Cina, Rusia, dan Irlandia.

Di Bab III, pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu mengupas di mana sebaiknya PPHN diletakkan pada dasar hukumnya. Dirinya memberikan beberapa alternatif untuk bagaimana menetapkan PPHN. Alternatif yang disodorkan adalah: *pertama*, perubahan terbatas amendemen UUD yang memasukkan kewenangan MPR menyusun PPHN. *Kedua*, revisi penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sehingga Tap MPR dalam hierarki perundangan-undangan hidup kembali. *Ketiga*, revisi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dengan menambahkan substansi kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan PPHN. *Keempat*, PPHN ditetapkan dalam UU menggantikan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). *Kelima*, MPR menetapkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan lembaga tinggi negara untuk menghasilkan konsensus nasional yang berbasis pada kewenangan masing-masing lembaga tinggi negara guna memastikan PPHN berjalan berkesinambungan, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dari sekian alternatif tersebut, Bamsoet menyebut konsep *kelima* merupakan konsep terbaik. Dengan alasan konvensi ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik hukum di Indonesia dan internasional. Satu lagi ditambahkan oleh Bamsoet adalah bahwa dasar hukum PPHN harus di atas undang-undang. □



AWG



MPR  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI



**MUDAH DI AKSES  
EFEKTIF & EFISIEN**

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,  
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN  
MPR RI DALAM GADGET ANDA**

**“ Segera  
Unduh  
Aplikasinya !**

**DI PLAY STORE**  
<http://bit.ly/bukudigitalmpri>

MPR.GO.ID



@MPRGOID



Buku Digital MPR RI  
SETJEN MPR RI

**MPR  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT**

